KEBUMEN

RENSTRA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
2025-2029

www.disparbud.kebumenkab.go.id

Plesirbumen | Plesir Kebumen | Pariwisata Kebumen

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

1) Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2) Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199003 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk perencanaan strategis lima tahunan yang berpedoman pada Visi Bupati Terpilih Kabupaten Kebumen, yaitu **"KEBUMEN BERDAYA: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya".**

Renstra ini memuat arahan strategis, program, dan kegiatan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kebumen. Kami berkomitmen untuk memajukan sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, maju, sejahtera, dan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitas Kabupaten Kebumen.

Dalam penyusunan dokumen ini, kami melibatkan berbagai pihak, baik dari internal pemerintah daerah maupun masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini merupakan wujud sinergi yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi pembangunan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kebumen.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, Renstra ini memerlukan komitmen, kerja keras, dan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal implementasi Renstra ini demi kemajuan Kabupaten Kebumen yang lebih berdaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi didalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya kita bersama mendapat ridha dari Allah SWT dan selalu membawa manfaat besar bagi masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

Drs.FRANS HAIDAR,MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681229 199009 1 001

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
DAFTAR GAMBAR			iv
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.	Latar Belakang	1
	2.	Landasan Hukum	2
	3.	Maksud dan Tujuan	4
	4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN		6
	1.	Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	6
	2.	Permasalahan Dan Isu - Isu Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	62
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		89
	1.	Tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	89
	2.	Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	93
	3.	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	109
	4.	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	117
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		121
	1.	Uraian Program	121
	2.	Uraian Kegiatan	123
	3.	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif	125
	4.	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	143
	5.	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	146
BAB V	PENUTUP		151

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Komposisi Sumberdaya Manusia pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen..... 31

Tabel 2.2 Data Sumberdaya Sarana dan Prasarana 36

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen..... 43

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen..... 52

Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen..... 64

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah... 73

Tabel 2.7 Program Unggulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen..... 78

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah..... 91

Tabel 3.2 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029..... 97

Tabel 3.3 Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen..... 101

Tabel 3.4 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029..... 105

Tabel 3.5 Penahapan Renstra Perangkat daerah..... 110

Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah..... 118

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, SubKegiatan Renstra Perangkat Daerah..... 126

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ SubKegiatan dan Pendanaan..... 134

Tabel 4.3 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembanggunan Daerah..... 144

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... 147

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi dan tatalaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen..... 7

Gambar 2.2. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah..... 79

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah..... 90

Gambar. 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah..... 94

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah..... 121

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional yang berperan penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen, yaitu: "KEBUMEN BERDAYA" (Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen memiliki tanggung jawab dalam mengelola dua urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:

- Urusan Pariwisata: Meliputi pengelolaan destinasi wisata, pengembangan pariwisata berkelanjutan, promosi wisata, serta pemberdayaan pelaku industri pariwisata. Urusan ini berkontribusi langsung dalam mendukung pilar "Kebumen Maju" dan "Kebumen Sejahtera" melalui peningkatan ekonomi berbasis pariwisata.
- Urusan Kebudayaan: Meliputi pelestarian dan pengembangan seni budaya lokal, cagar budaya, tradisi, serta pembinaan komunitas budaya. Urusan ini berkontribusi pada pilar "Kebumen Berbudaya" dengan memperkuat identitas daerah yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan kebangsaan.

Kedua urusan ini memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen, terutama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk periode lima tahun. Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan urusan yang diampu, adalah:

- Memberikan arah yang jelas dan terukur bagi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.
- Mengintegrasikan program-program pembangunan dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah.
- Menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Mendorong efektivitas pelaksanaan urusan pariwisata dan kebudayaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan melalui proses yang partisipatif dan berbasis data. Tahapan utamanya meliputi:

- Analisis Lingkungan Strategis: Mengidentifikasi tantangan dan peluang eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal.
- Kajian Kebijakan dan Dokumen Terkait: Menyelaraskan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Kebumen, kebijakan nasional, dan arah pembangunan provinsi.
- Penjaringan Masukan Publik: Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelaku pariwisata, komunitas budaya, akademisi, dan organisasi masyarakat.
- Penyusunan Draft dan Finalisasi: Mengintegrasikan masukan dari konsultasi publik, evaluasi, serta harmonisasi dengan perangkat daerah lain.

Renstra OPD merupakan turunan langsung dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- RPJMD: Sebagai acuan utama yang memuat visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.
- RKPD: Renstra menjadi landasan penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan.
- Rencana Strategis Nasional dan Provinsi: Menyelaraskan tujuan dan sasaran strategis dengan kebijakan yang lebih tinggi.
- Renja OPD: Renstra dijabarkan dalam Renja OPD sebagai rencana operasional tahunan.

Dengan pendekatan yang strategis, integratif, dan kolaboratif, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya "KEBUMEN BERDAYA" sesuai visi dan misi Bupati terpilih.

2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (terbaru pengganti PP No. 50/2011).
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Kepariwisataan.
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permenparekraf Nomor 1 Tahun 2023.
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

20. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman operasional dan arah kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan selama periode lima tahun ke depan.

Renstra ini merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025, sekaligus pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Dokumen ini disusun untuk memastikan setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi.

Dengan demikian, Renstra ini menjadi rambu arah pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan agar lebih terukur, efektif, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan, serta menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertujuan untuk:

- Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan bidang pariwisata dan kebudayaan yang terukur dan realistis, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.
- Mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029, dan RPJMD Kabupaten Kebumen 2025–2029, sesuai arahan Inmendagri 2/2025.
- Menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program prioritas bidang pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang mampu memperkuat daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penerapan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja program (IKP) yang selaras dengan indikator kinerja daerah (IKD) sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

- Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pelestarian kebudayaan daerah sebagai pilar pembangunan ekonomi kreatif dan identitas Kebumen berdaya, sebagaimana visi pembangunan daerah yang tercantum dalam Perda No 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Kebumen 2025–2029.
- Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pariwisata dan kebudayaan yang transparan, inklusif, partisipatif, dan berbasis kinerja.
- Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap tahun selama periode 2025–2029, serta sebagai alat evaluasi capaian kinerja pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan daerah.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Kinerja Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi tentang : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

1. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

a. Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa sebelumnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, dan tugas DISPARBUD atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe B, membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen yang memimpin melaksanakan fungsi tersebut dan membawahi Sekretariat, Bidang Pengembangan Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Kebudayaan. Sesuai dengan analisis kinerja Dinas Pariwisata dan Pariwisata Kabupaten Kebumen SOTK yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

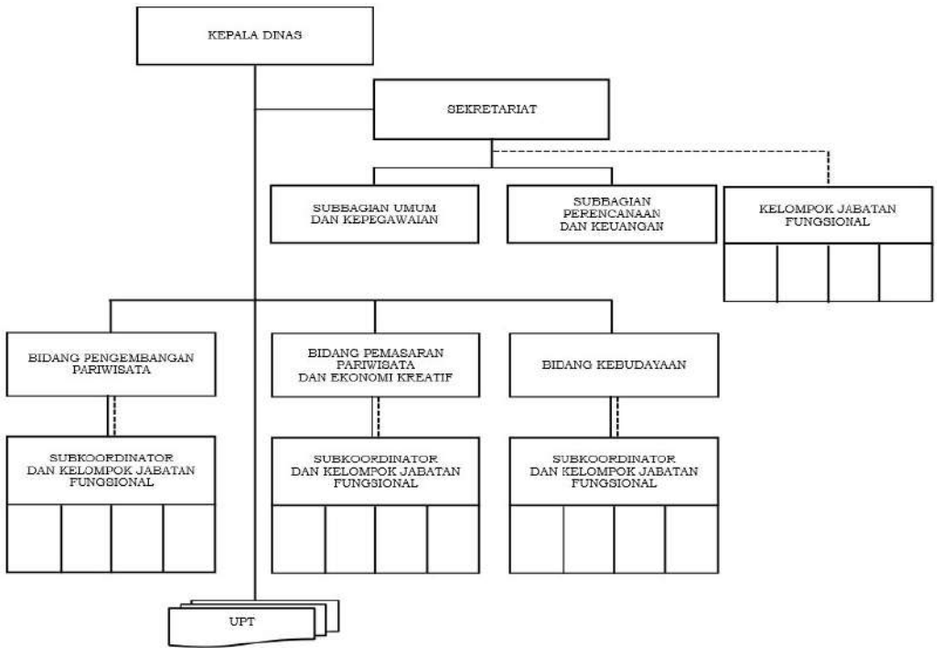

Adapun tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang pada pasal 4 Perda tersebut di atas yaitu Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan bagan pada gambar 1 diatas, maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Disparbud Kabupaten Kebumen sampai pada tingkat Sekretariat/Bidang di Disparbud Kabupaten Kebumen atau tingkat Seksi di Disparbud Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

B. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
2. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
6. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan dan keuangan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;

4. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
5. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program;
6. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
7. menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
9. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tabel 2.1
Analisis Beban Kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan	Kelebihan Kekurangan -/+
Jf Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	1	0
JF Perencana Ahli Pertama	1	2	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	0	3	-3
Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
Pengelola Data dan Informasi	0	5	-5
Pengadministrasi Perkantoran	6	9	-3
Operator Layanan Operasional	3	27	-24

Berdasarkan analisis beban kerja pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan menunjukkan bahwa kapasitas SDM saat ini belum mampu mengimbangi tuntutan kinerja, kebutuhan transformasi digital, serta standar tata kelola pemerintahan modern. Total kekurangan pegawai mencapai 36 orang, dengan konsentrasi terbesar pada jabatan Operator Layanan Operasional dan Pengelola Data dan Informasi, dua kelompok jabatan yang menjadi penggerak utama administrasi harian dan manajemen data dinamis dinas.

Ketiadaan pegawai pada jabatan Analis Kebijakan dan Perencana memperlihatkan bahwa fungsi strategis terkait perencanaan program, penyusunan dokumen kinerja, penajaman indikator, serta evaluasi kebijakan belum mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai. Akibatnya, beban pekerjaan analisis kerap dilimpahkan kepada staf administrasi yang tidak memiliki kompetensi fungsional spesifik di bidang perencanaan. Hal ini berpotensi

menurunkan kualitas dokumen Renja, Renstra, PK, RKA, hingga laporan evaluasi kinerja tahunan.

Defisit Pengelola Data dan Informasi (sebanyak 5 orang) merupakan hambatan kritis dalam era transformasi digital. Subbagian saat ini tidak memiliki struktur khusus yang menangani integrasi data kinerja, data operasional wisata, data keuangan, pemantauan realisasi, maupun penyajian informasi melalui dashboard digital. Padahal, tuntutan regulasi nasional mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis data (data-driven governance). Tanpa penguatan formasi ini, akurasi perencanaan dan efektivitas pengambilan keputusan akan terus terhambat.

Kekurangan pegawai paling besar terdapat pada jabatan Operator Layanan Operasional, di mana kebutuhan 27 orang baru terpenuhi oleh 3 orang. Gap sebesar -24 pegawai ini berdampak langsung pada kemampuan Subbagian dalam menjalankan tugas operasional seperti pengelolaan administrasi rutin, pengumpulan dan verifikasi data lapangan, entry dokumen pertanggungjawaban, input SIPD, serta fasilitasi kegiatan lintas bidang. Kekurangan ini menciptakan risiko overload pekerjaan yang tinggi, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan keterlambatan pelayanan internal maupun eksternal.

Secara keseluruhan, kondisi kekurangan SDM ini menuntut strategi penguatan kapasitas yang terencana dan bertahap. Pengisian pegawai harus mengikuti prioritas berbasis urgensi Renstra, dengan memperkuat fungsi operasional, analitis, dan pengelolaan data terlebih dahulu. Dengan penataan ulang SDM yang tepat, Subbagian Perencanaan dan Keuangan akan mampu memenuhi standar akuntabilitas, efisiensi, dan tata kelola modern dalam rangka mencapai sasaran Renstra 2025–2029.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
4. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
5. menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah;

6. menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan;
7. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum;
9. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
10. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi penanganan aduan;
11. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
12. menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
13. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Tabel 2.2
Analisis Beban Kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan	Kelebihan Kekurangan -/+
JF Arsiparis Ahli Pertama	0	1	-1
JF Arsiparis Penyelia	0	1	-1
JF Arsiparis Mahir	0	1	-1
JF Arsiparis Terampil	2	3	-1
JF Pranata Komputer Terampil	1	2	-1
JF Penata Laksana Barang Terampil	1	1	0
Penata Layanan Operasional	1	2	-1
Pengelola Layanan Operasional	3	3	0
Pengandministrasi Perkantoran	3	1	2
Operator Layanan Operasional	9	82	-73

Berdasarkan analisis beban kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini belum mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan administrasi, tata kelola kepegawaian, penataan arsip, manajemen IT dasar, serta operasional perkantoran yang semakin meningkat pada periode Renstra 2025–2029. Subbagian ini merupakan tulang punggung administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga ketidakseimbangan antara beban tugas dan jumlah pegawai memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pelayanan internal maupun eksternal SKPD.
Hasil analisis menunjukkan terdapat kekurangan SDM yang sangat signifikan, yaitu –77 pegawai, dengan defisit terbesar pada jabatan Operator Layanan Operasional (–73). Kesenjangan ini mencerminkan tingginya volume pekerjaan

operasional yang harus ditangani oleh Subbagian, meliputi layanan umum, pengelolaan sarana prasarana, persuratan, pendukung kegiatan, penginputan data, serta pelayanan administrasi inti dinas. Kekurangan tenaga pada jabatan ini menyebabkan beban kerja pegawai yang ada menjadi sangat berat, memicu potensi keterlambatan dalam pelayanan, ketidakefisienan proses, serta penurunan kualitas layanan perkantoran secara keseluruhan.

Selain itu, jabatan fungsional arsiparis mengalami kekurangan pada semua jenjang, mulai dari Ahli Pertama, Penyelia, Mahir, hingga Terampil, dengan total defisit 5 orang. Ketiadaan tenaga arsiparis yang memadai berdampak langsung pada lemahnya tata kelola kearsipan, baik arsip dinamis maupun statis. Padahal Subbagian ini bertanggung jawab atas penyimpanan dokumen penting seperti surat keputusan, SPJ, dokumen perjalanan dinas, data kepegawaian, hingga arsip kebijakan. Ketertinggalan dalam pengelolaan arsip berpotensi menghambat akuntabilitas, menimbulkan risiko kehilangan dokumen, serta menyulitkan penyediaan data dukung dalam proses audit maupun penyusunan laporan kinerja.

Kekurangan pegawai pada jabatan Pranata Komputer Terampil (–1) semakin memperburuk kondisi transformasi digital dinas. Tidak adanya tenaga khusus yang menangani pemeliharaan sistem informasi, database internal, keamanan data, serta dukungan teknis harian menyebabkan Subbagian bergantung pada pegawai non-teknis atau pihak eksternal. Kondisi ini tidak selaras dengan tuntutan Renstra 2025–2029 yang menekankan digitalisasi layanan, integrasi data, dan penguatan sistem informasi manajemen.

Pada saat yang sama, jabatan Penata Laksana Barang Terampil juga tidak defisit 0 orang, berdampak pada pengelolaan barang milik daerah, persediaan, dan aset non-permanen. Ketidakseimbangan ini berpotensi mengganggu ketepatan pelaporan persediaan, menurunkan kualitas penatausahaan barang, dan meningkatkan risiko temuan audit. Sementara itu, kekurangan pada jabatan Pengelola Layanan Operasional (0) dan Penata Layanan Operasional (–1) turut memperlambat alur pelayanan administrasi internal, mulai dari layanan surat-menyurat, fasilitasi kegiatan, hingga penanganan kebutuhan layanan umum.

Pada jabatan Pengadministrasi Perkantoran menunjukkan surplus +2 pegawai. Namun kelebihan ini tidak serta-merta mengatasi kekurangan lain, karena beban fungsional yang tidak tercakup oleh jabatan administrasi tetap membutuhkan tenaga teknis khusus. Fakta ini menunjukkan adanya potensi redistribusi tugas, pelatihan teknis, atau pengembangan

kompetensi untuk mengoptimalkan pegawai yang tersedia, namun tidak dapat dijadikan solusi tunggal bagi defisit struktural yang lebih besar.

Secara keseluruhan, kondisi SDM Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dalam posisi kritis yang menuntut intervensi strategis. Pengisian formasi prioritas harus dilakukan secara bertahap tetapi terarah, dengan fokus pada:

- Operator Layanan Operasional,
- Arsiparis seluruh jenjang,
- Pranata Komputer,
- Penata Laksana Barang,
- Pengelola Layanan Operasional

Penguatan SDM ini merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, memastikan tertib arsip, serta mendukung transformasi digital dinas secara berkelanjutan. Tanpa pengembangan kapasitas SDM yang memadai, pencapaian target Renstra 2025–2029 berpotensi terganggu, terutama pada aspek tata kelola organisasi, pelayanan internal, dan efisiensi operasional.

C. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana di bidang Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian serta penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran event budaya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan cagar budaya;
2. pengelolaan museum;
3. pembinaan sejarah;
4. pelestarian tradisi;
5. pembinaan komunitas dan lembaga adat;
6. pembinaan kesenian;
7. penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran event budaya;dan

8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi pada Bidang Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kebudayaan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Subkoordinator sebagaimana dimaksud adalah Subkoordinator Kebudayaan.

1. Subkoordinator Kebudayaan
   Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kebudayaan.
   Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
   1. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang kebudayaan;
   2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
   3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
   4. menyiapkan bahan pengelolaan cagar budaya;
   5. menyiapkan bahan pengelolaan museum;
   6. menyiapkan bahan pembinaan sejarah;
   7. menyiapkan bahan pelestarian tradisi;
   8. menyiapkan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
   9. menyiapkan bahan pembinaan kesenian;
   10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di kebudayaan; dan
   11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Kebudayaan dibantu oleh 2 tim, yaitu :

1. Tim Kerja Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   Tugas pokok tim:
   - Menyusun rencana kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
   - Melaksanakan pendataan, pemeliharaan, dan pengawasan cagar budaya.
   - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelestarian.
   - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

Tim ini berperan strategis dalam memastikan keberlanjutan aset budaya daerah agar tetap lestari sekaligus dapat dimanfaatkan secara edukatif dan pariwisata budaya.

2. Tim Kerja Pengembangan Kebudayaan

Tugas pokok tim:

- Menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan kebudayaan daerah.
- Memfasilitasi kegiatan seni, tradisi, dan ekspresi budaya masyarakat.
- Melaksanakan pembinaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kebudayaan.
- Mendukung pelaksanaan hibah seni dan pengelolaan objek diduga cagar budaya.

Tim ini menjadi motor penggerak dalam penguatan ekosistem kebudayaan dan partisipasi masyarakat.

Tabel 2.3
Analisis Beban Kerja Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan	Kelebihan Kekurangan -/+
JF Pamong Budaya Ahli Muda	1	5	-4
JF Pamong Budaya Ahli Pertama	1	7	-6
Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	-2
Pengelola Data dan Informasi	0	3	-3
Pengadministrasi Perkantoran	4	2	2

Analisis beban kerja pada Bidang Kebudayaan menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan teknis maupun strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan program pelestarian, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan daerah. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap kemampuan perangkat daerah dalam mengimplementasikan agenda kebudayaan sesuai arah kebijakan nasional, RPJMD 2025–2029, dan tuntutan transformasi kebudayaan berbasis digital.

Secara keseluruhan, Bidang Kebudayaan mengalami kekurangan pegawai sebanyak 13 orang, dengan kekurangan terbesar berada pada jabatan Pamong Budaya Ahli Pertama (–6) dan Pamong Budaya Ahli Muda (–4). Kedua

jabatan ini merupakan inti dari pelaksanaan fungsi teknis kebudayaan, termasuk inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, fasilitasi sanggar dan komunitas budaya, pengembangan program pelestarian, pendampingan kegiatan, kurasi konten budaya, serta koordinasi dengan seniman, budayawan, dan lembaga kebudayaan.

Ketiadaan formasi yang memadai pada jabatan tersebut berdampak langsung pada terbatasnya kemampuan Bidang Kebudayaan dalam memetakan potensi budaya daerah, melaksanakan pembinaan pelaku budaya secara berkelanjutan, mengembangkan ruang kreatif masyarakat, serta menyelenggarakan program strategis seperti digitalisasi warisan budaya dan penyusunan konten edukatif. Kekurangan tenaga pamong budaya juga melemahkan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan kebudayaan yang krusial bagi peningkatan kualitas layanan publik di sektor kebudayaan.

Selain itu, jabatan Penelaah Teknis Kebijakan mengalami defisit –2 pegawai, sehingga tugas analisis kebijakan kebudayaan, penyusunan naskah akademik program, evaluasi efektivitas kegiatan, serta harmonisasi kebijakan dengan ketentuan perundangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Jabatan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan berbasis data dan kajian teknis, yang merupakan elemen kunci dalam perumusan arah kebijakan Renstra Bidang Kebudayaan.

Kekurangan SDM juga terjadi pada jabatan Pengelola Data dan Informasi (–3). Di era transformasi digital, jabatan ini memegang peranan strategis untuk mengelola data inventaris budaya, database komunitas, dokumentasi kegiatan, serta penyajian informasi digital untuk publik. Tidak adanya tenaga yang memadai menyebabkan proses digitalisasi kebudayaan berjalan lambat, padahal kebutuhan penyediaan informasi budaya secara terbuka dan terintegrasi menjadi salah satu indikator penting dalam pengukuran kinerja sektor kebudayaan.

Di sisi lain, jabatan Pengadministrasi Perkantoran menunjukkan surplus +2 pegawai, namun hal ini tidak dapat mengkompensasi kekurangan pada jabatan teknis. Surplus administrasi justru menunjukkan perlunya penataan ulang pembagian kerja atau peningkatan kompetensi pegawai agar dapat mendukung fungsi teknis tertentu, meskipun tetap tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap jabatan fungsional pamong budaya dan teknis kebijakan.

Secara umum, ketidakseimbangan jumlah pegawai ini menimbulkan sejumlah permasalahan strategis, yaitu:

- Terbatasnya kemampuan pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan, termasuk pendataan,

pembinaan, dan fasilitasi komunitas budaya yang terus berkembang.

- Terhambatnya digitalisasi kebudayaan, yang menjadi prioritas nasional melalui program pemajuan kebudayaan dan pengembangan konten edukatif.
- Lemahnya kapasitas analisis dan perumusan kebijakan, karena tidak tersedianya tenaga teknis yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Berpotensi tidak tercapainya target kinerja tahunan dan sasaran strategis Renstra, termasuk indikator pemajuan budaya, revitalisasi ruang kreatif, dan pelestarian warisan budaya.
- Keterbatasan dalam membangun ekosistem budaya berbasis partisipasi masyarakat, akibat minimnya tenaga pamong budaya yang seharusnya berperan dalam pendampingan komunitas.

Oleh karena itu, penguatan SDM pada Bidang Kebudayaan harus menjadi prioritas dalam periode Renstra 2025–2029. Arah kebijakan penguatan kapasitas meliputi pengisian formasi jabatan fungsional pamong budaya secara bertahap, peningkatan jumlah tenaga teknis kebijakan, pengadaan pengelola data budaya, serta penataan ulang pegawai administrasi untuk mendukung efisiensi dan kolaborasi lintas fungsi.

Pemenuhan kebutuhan SDM ini akan meningkatkan kemampuan Bidang Kebudayaan dalam menjalankan mandat pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, memperkuat ekosistem budaya daerah, serta memastikan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan budaya dapat dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berkelanjutan.

D. Bidang Pengembangan Pariwisata

Bidang Pengembangan Pariwisata adalah unsur pelaksana di bidang pengembangan pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengembangan pariwisata, pemberian pertimbangan dalam rangka penetapan tanda daftar usaha pariwisata, pembinaan kegiatan usaha jasa dan sarana pariwisata, pengembangan produk pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

1. pengelolaan, pembinaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
2. pengelolaan kawasan strategis sektor pariwisata;
3. inventarisasi potensi destinasi dan daya tarik wisata, tenaga teknis sarana dan prasarana destinasi dan daya tarik wisata;
4. bimbingan teknis pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata, kerja sama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
5. pembinaan dan ketertiban destinasi dan daya tarik wisata;
6. pemrosesan rekomendasi perizinan di sektor pariwisata;
7. inventarisasi potensi usaha jasa dan sarana wisata;
8. bimbingan teknis, pengelolaan dan pengembangan jasa dan sarana wisata;
9. rekomendasi kegiatan dan perizinan di bidang usaha dan jasa sarana wisata;
10. pelaksanaan kerja sama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pembinaan dan pengembangan bidang usaha jasa dan sarana wisata;
11. pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan bidang usaha dan jasa sarana wisata;
12. pemantauan standarisasi dan klasifikasi usaha bidang pengembangan jasa dan sarana wisata; dan
13. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengembangan Pariwisata dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata. Subkoordinator sebagaimana dimaksud adalah Subkoordinator Destinasi dan Daya Tarik Wisata; dan Subkoordinator Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata.

1. Subkoordinator Destinasi dan Daya Tarik Wisata

   mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang destinasi dan daya tarik wisata.

   Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

   1. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang destinasi dan daya tarik wisata;
   2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi dan daya tarik wisata;
   3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang destinasi dan daya tarik wisata;
   4. menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
   5. menyiapkan bahan pengelolaan kawasan strategis sektor pariwisata;

6. menyiapkan bahan inventarisasi potensi destinasi dan daya tarik wisata;
7. menyiapkan bahan pengelolaan tenaga teknis sarana dan prasarana destinasi dan daya tarik wisata;
8. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan destinasi dan daya Tarik wisata;
9. menyiapkan bahan kerja sama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
10. menyiapkan bahan pembinaan dan ketertiban destinasi dan daya Tarik wisata;
11. menyiapkan bahan pemrosesan rekomendasi perizinan di sektor pariwisata;
12. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi dan daya tarik wisata; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subkoordinator Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang usaha dan jasa sarana pariwisata.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang usaha dan jasa sarana pariwisata;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha dan jasa sarana pariwisata;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha dan jasa sarana pariwisata;
4. menyiapkan bahan inventarisasi potensi usaha jasa dan sarana wisata;
5. menyiapkan bahan bimbingan teknis, pengelolaan dan pengembangan jasa dan sarana wisata;
6. menyiapkan bahan rekomendasi kegiatan dan perizinan di bidang usaha dan jasa sarana wisata;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pembinaan dan pengembangan bidang usaha jasa dan sarana wisata;
8. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan bidang usaha dan jasa sarana wisata;
9. menyiapkan bahan pemantauan standarisasi dan klasifikasi usaha bidang pengembangan jasa dan sarana wisata;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha dan jasa sarana pariwisata; dan

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan Pariwisata dibantu oleh 1 tim, yaitu :

1. Tim Kerja Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

   Tugas pokok tim:
   - Menyusun rencana pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.
   - Melaksanakan pembinaan, penataan, dan pengendalian destinasi wisata.
   - Menginventarisasi potensi destinasi dan sarana prasarana wisata.
   - Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan destinasi.

Tim ini berperan langsung dalam peningkatan kualitas destinasi dan pengalaman wisatawan

Tabel 2.4
Analisis Beban Kerja Bidang Pengembanga Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan	Kelebihan Kekurangan -/+
JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	1	2	-1
JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	1	1	0
Penelaah teknis kebijakan	0	4	-4
Pengelola Data dan Informasi	2	4	-2

Analisis beban kerja Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh fungsi strategis yang menjadi mandat perangkat daerah dalam rangka peningkatan daya saing pariwisata, promosi destinasi, serta pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen. Bidang ini merupakan ujung tombak dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata

dan penguatan ekraf melalui penyusunan strategi pemasaran, fasilitasi pelaku usaha, serta pengembangan konten dan inovasi berbasis potensi lokal.

Namun hasil analisis menunjukkan bahwa Bidang masih menghadapi kekurangan SDM sebanyak 7 pegawai, yang terbagi pada jabatan fungsional inti, yaitu JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada jenjang Ahli Muda, serta jabatan Penelaah Teknis Kebijakan dan Pengelola Data dan Informasi. Kekurangan tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja Bidang, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang membutuhkan tenaga teknis, analitis, dan kreatif dalam jumlah yang memadai.

Jabatan JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda mengalami kekurangan –1 pegawai, sementara pada jenjang Ahli Pertama terdapat kekurangan 0 pegawai. Jabatan ini merupakan garda depan dalam pengembangan destinasi wisata, kurasi produk ekonomi kreatif, pendampingan pelaku usaha, serta fasilitasi event pariwisata. Minimnya jumlah pamong pariwisata berdampak pada terbatasnya kapasitas dinas dalam melakukan pendampingan lapangan, menyusun paket promosi, meningkatkan kualitas layanan pariwisata, dan membangun ekosistem kreatif yang kuat. Kondisi ini menghambat percepatan inovasi, pembinaan komunitas kreatif, serta akselerasi program pengembangan destinasi dan atraksi wisata yang bersifat lintas sektor.

Sementara itu, jabatan Penelaah Teknis Kebijakan menunjukkan kekurangan –4 pegawai, padahal jabatan ini berperan penting dalam penyusunan kebijakan teknis, pengembangan strategi pemasaran, evaluasi program, serta harmonisasi kebijakan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Tanpa dukungan tenaga teknis kebijakan yang memadai, kualitas perumusan strategi pemasaran, penyusunan naskah kebijakan, dan pelaporan kinerja berpotensi tidak optimal, sehingga tidak selaras dengan kebutuhan sektor pariwisata yang dinamis dan kompetitif.

Kekurangan SDM yang sama terjadi pada jabatan Pengelola Data dan Informasi (–2). Jabatan ini menjadi kunci dalam pengembangan basis data destinasi, data wisatawan, data pelaku ekonomi kreatif, sistem pemantauan kinerja pariwisata, serta penyusunan laporan berbasis data. Di era digital marketing pariwisata, ketersediaan data yang valid dan terintegrasi adalah elemen fundamental untuk menyusun strategi promosi berbasis tren, perilaku wisatawan, dan

kebutuhan pasar. Minimnya tenaga pengelola data menghambat pengembangan dashboard informasi pariwisata, keterbukaan data, dan kemampuan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

Kondisi ketidakseimbangan SDM tersebut menimbulkan sejumlah isu strategis bagi Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu:

- Terbatasnya kapasitas perencanaan dan pengembangan destinasi, sehingga implementasi program pengembangan wisata dan ekraf berjalan lambat dan tidak maksimal.
- Lemahnya fungsi pemasaran dan promosi, akibat kurangnya tenaga profesional yang mengelola branding, event, konten promosi, media digital, dan koordinasi dengan pelaku wisata.
- Keterbatasan kemampuan dalam menganalisis dan memanfaatkan data pariwisata, yang menghambat penyusunan strategi promosi berbasis data dan tren pasar.
- Kurangnya kemampuan teknis dalam penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan bidang pariwisata dan ekraf berisiko tidak adaptif terhadap perubahan industri.
- Dampak langsung terhadap pencapaian target Renstra, terutama indikator kinerja yang terkait dengan kunjungan wisatawan, indeks pembangunan ekonomi kreatif, pengembangan destinasi, serta produktivitas pelaku usaha kreatif.

Implikasi dari kondisi tersebut sangat strategis dalam konteks pelaksanaan Renstra 2025–2029. Tanpa penguatan kapasitas SDM, upaya peningkatan daya saing pariwisata, pengembangan ekraf, serta pencapaian target kinerja dinas akan terhambat secara struktural. Oleh karena itu, arah kebijakan penguatan SDM harus difokuskan pada pemenuhan formasi jabatan fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, peningkatan jumlah tenaga analisis kebijakan, serta penambahan pengelola data pariwisata dan ekraf.

Penguatan SDM ini diperlukan agar Bidang memiliki kapasitas yang memadai untuk:

- melaksanakan program promosi yang inovatif dan kompetitif,
- membangun ekosistem pelaku ekraf yang produktif,
- memanfaatkan potensi digital marketing secara optimal,
- mengembangkan database pariwisata yang kuat dan terintegrasi,

- menyusun kebijakan yang responsif dan berbasis data, serta
- memperkuat koordinasi lintas sektor dan kolaborasi multipihak.

Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan SDM Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan prasyarat utama untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2029 serta untuk memperkuat posisi Kabupaten Kebumen sebagai destinasi pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing.

E. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

1. fasilitasi pelaksanaan promosi dan informasi pariwisata;
2. penetapan pedoman perencanaan dan kerjasama pemasaran/promosi pariwisata;
3. penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya;
4. pelaksanaan program promosi pariwisata serta penyediaan informasi pariwisata;
5. pelaksanaan pameran baik di dalam maupun di luar negeri bekerja sama dengan lintas sektoral;
6. penerapan branding pariwisata nasional dan tag line pariwisata, penyediaan dan pengembangan sistem informasi pariwisata;
7. fasilitasi pelaksanaan event wisata, rekreasi dan hiburan umum;
8. pengembangan ekonomi kreatif;
9. pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
10. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
11. penyediaan dan pembinaan potensi kelompok masyarakat pariwisata/kelompok sadar wisata; dan

12. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Subkoordinator sebagaimana dimaksud adalah Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan Subkoordinator Promosi dan Informasi Pariwisata.

1. Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
   Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
   1. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
   2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
   3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
   4. menyiapkan bahan inventarisasi potensi kelompok masyarakat pariwisata/kelompok sadar wisata;
   5. menyiapkan bahan pembinaan potensi kelompok masyarakat pariwisata/kelompok sadar wisata;
   6. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata/penyuluhan wisata;
   7. menyiapkan bahan rekomendasi kegiatan dan perizinan di bidang usaha pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
   8. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap sumber daya pariwisata/penyuluhan wisata;
   9. menyiapkan bahan pengembangan ekonomi kreatif;
   10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
   11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Subkoordinator Promosi dan Informasi Pariwisata

   Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan di bidang promosi dan informasi pariwisata.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang promosi dan informasi pariwisata;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi pariwisata;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi pariwisata;
4. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan promosi dan informasi pariwisata;
5. menyiapkan bahan penetapan pedoman perencanaan dan Kerjasama pemasaran/promosi pariwisata;
6. menyiapkan bahan penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan event budaya dan pariwisata;
7. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pariwisata;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan program promosi pariwisata serta penyediaan informasi pariwisata;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan pameran baik di dalam maupun di luar negeri bekerja sama dengan lintas sektoral;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan branding pariwisata nasional dan tag line pariwisata;
11. menyiapkan bahan penyediaan dan pengembangan sistem informasi pariwisata;
12. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
13. menyiapkan bahan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
14. menyiapkan bahan perizinan di bidang pengusahaan atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
15. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi pariwisata; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibantu oleh 2 tim, yaitu :

1. Tim Kerja Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tugas pokok tim:

- Mengembangkan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

- Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha dan jasa pariwisata.
- Mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Tim ini berfungsi memperkuat daya saing SDM dan pelaku usaha pariwisata daerah

2. Tim Kerja Promosi dan Informasi Pariwisata.

Tugas pokok tim:

- Menyusun dan melaksanakan strategi promosi pariwisata daerah.
- Mengelola informasi pariwisata melalui media cetak, digital, dan event.
- Melaksanakan branding pariwisata dan pengembangan konten promosi.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja promosi pariwisata.

Tim ini menjadi ujung tombak citra dan daya tarik pariwisata Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.5
Analisis Beban Kerja Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan	Kelebihan Kekurangan -/+
JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	2	2	0
JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	1	2	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	0	4	-4
Pengelola Data dan Informasi	1	4	-3

Hasil analisis beban kerja Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan adanya kekurangan SDM yang cukup signifikan, yaitu –8 pegawai, terutama pada jabatan fungsional inti yang berperan langsung dalam

pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program prioritas yang menuntut kemampuan teknis, analitis, dan pengelolaan data yang memadai.

Jabatan JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda mengalami kekurangan 0 pegawai, sedangkan pada jenjang Ahli Pertama defisitnya, yaitu –1 pegawai. Kekurangan ini menyebabkan fungsi pendampingan destinasi, fasilitasi komunitas kreatif, pengembangan paket wisata, serta pelaksanaan event promosi tidak dapat berjalan optimal. Minimnya tenaga pamong pariwisata juga menghambat inovasi program dan interaksi dengan para pelaku ekraf serta pelaku industri pariwisata.

Untuk fungsi analitis, jabatan Penelaah Teknis Kebijakan menunjukkan defisit –4 pegawai, yang berakibat pada lemahnya kemampuan Bidang dalam menyusun kebijakan teknis, mengevaluasi efektivitas program pemasaran wisata, dan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data. Padahal kebutuhan adaptasi kebijakan pada sektor pariwisata cukup tinggi mengingat dinamika tren pasar dan perubahan kebutuhan wisatawan.

Selain itu, jabatan Pengelola Data dan Informasi memiliki kekurangan –3 pegawai. Ketersediaan tenaga pengelola data sangat penting untuk mengembangkan database wisatawan, mengelola statistik pariwisata, serta mendukung strategi pemasaran digital. Tanpa tenaga yang memadai, kemampuan Bidang untuk menghasilkan analisis berbasis bukti (evidence-based marketing) menjadi terbatas dan menghambat pengambilan keputusan strategis.

Secara keseluruhan, kekurangan SDM ini berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis Renstra, terutama target peningkatan kunjungan wisatawan, penguatan branding pariwisata, dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Pemenuhan formasi pegawai pada jabatan Adyatama, Penelaah Teknis Kebijakan, dan Pengelola Data menjadi kebutuhan mendesak agar Bidang memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas strategis dalam pembangunan pariwisata dan ekraf Kabupaten Kebumen.

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

2. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

G. Kelompok Jabatan Fungsional.

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
3. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kerja serta pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diatas, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
9. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

H. Tata Kerja

1. Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.
2. Setiap unsur di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
4. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
8. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
9. Dalam melaksanakan tugas di wilayah setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Dinas melakukan koordinasi dengan Camat.

Dalam pelaksanaan tugas pada bidang-bidang, struktur organisasi disesuaikan dengan ketentuan Permen PAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, di mana jabatan

Sub Koordinator tidak lagi digunakan dan fungsinya dialihkan ke sistem kerja berbasis tim.

b. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

1. Kondisi Kepegawaian

   Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen memiliki peran strategis sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 123 Tahun 2021, dinas ini didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional, dan tenaga non-ASN dengan berbagai latar belakang pendidikan dan golongan kepangkatan.

   Secara lengkap kondisi Sumber daya manusia yang ada di Disparbud Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1.
Komposisi Sumberdaya Manusia pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Awal Tahun 2025

URAIAN	BERDASAR GOLONGAN								BERDASAR PENDIDIKAN							DIKLAT YG DIIKUTI		
	IV	III	II	I	PPPK	P2K	NON ASN	JML	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML	STRUK TURAL	FUNG SIONAL	JML
Eselon II	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Eselon III	4	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	4	4	0	4
Eselon IV	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1
JFU	0	14	13	1	0	0	0	28	1	2	3	13	8	1	28	0	0	0
JF - Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf	0	3	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0
JF- Pamong budaya	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
CPNS	0	5	2	0	0	0	0	7	0	5	2	0	0	0	7	0	0	0
PPPK	0	0	0	0	6	0	0	6	0	3	3	0	0	0	6	0	0	0
P2K	0	0	0	0	0	59	0	59	0	6	3	36	6	8	59	0	0	0
NON ASN	0	0	0	0	0	0	4	4	1	2	0	1	0	0	4	0	0	0
Jumlah	5	25	15	1	6	59	4	115	10	20	12	50	14	9	115	6	0	6
% dari Jml Pegawai	4,35	21,74	13,04	0,87	5,22	51,3	3,48	100	8,7	17,39	10,43	43,48	12,17	7,83	100	100	-	100

Sumber : Disparbud Kab. Kebumen

Berdasarkan tabel tersebut, sebagai berikut:

a. Struktur dan Komposisi Pegawai

Sampai dengan tahun 2025, jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercatat sebanyak 115 orang. Berdasarkan golongan dan status kepegawaian, komposisi pegawai menunjukkan bahwa pegawai P2K merupakan kelompok terbesar yaitu sebanyak 59 orang (51,30%), diikuti oleh pegawai golongan III sebanyak 25 orang (21,74%), dan golongan II sebanyak 15 orang (13,04%). Sementara pegawai Non ASN berjumlah 4 orang (3,48%).

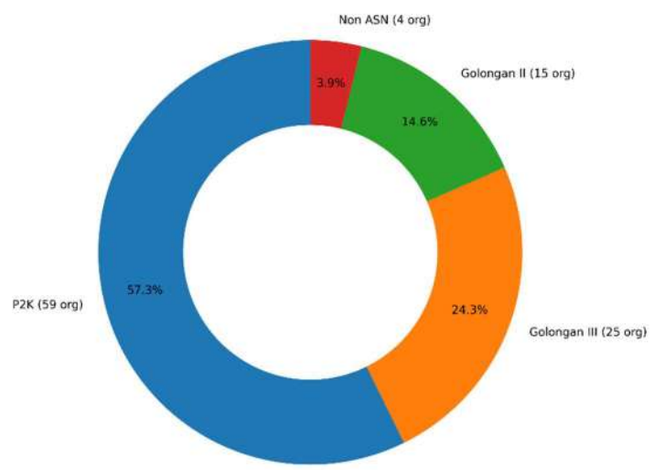

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari sisi pendidikan, komposisi pegawai memperlihatkan bahwa mayoritas pegawai berpendidikan SMA (43,48%), diikuti oleh lulusan S1 (17,39%), S2 (8,70%), D3 (10,43%), SMP (12,17%), dan SD (7,83%). Meskipun terdapat sejumlah pegawai berpendidikan tinggi, proporsinya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan kompetensi teknis yang menuntut penguasaan bidang pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan peningkatan kapasitas SDM melalui program diklat, sertifikasi kompetensi, serta kesempatan studi lanjut agar kompetensi pegawai semakin sejalan dengan tuntutan profesionalisme pelayanan publik di bidang pariwisata dan kebudayaan.

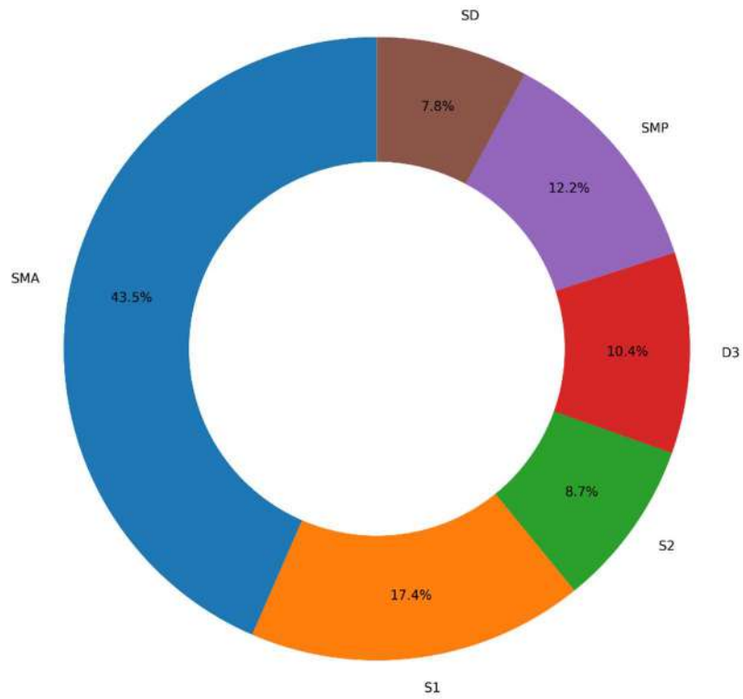

c. Berdasarkan Jabatan

Struktur jabatan terdiri atas pejabat struktural sebanyak 7 orang (Eselon II–IV), jabatan fungsional umum sebanyak 28 orang, serta jabatan fungsional tertentu (JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif serta Pamong Budaya) sebanyak 4 orang. Selain itu, terdapat CPNS sebanyak 7 orang, PPPK sebanyak 6 orang, dan P2K sebanyak 59 orang yang berperan penting dalam pelaksanaan teknis operasional.

Komposisi ini mencerminkan arah penyederhanaan birokrasi sebagaimana kebijakan pemerintah pusat, di mana jabatan fungsional menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas teknis operasional, khususnya dalam pengembangan destinasi wisata, promosi, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya daerah.

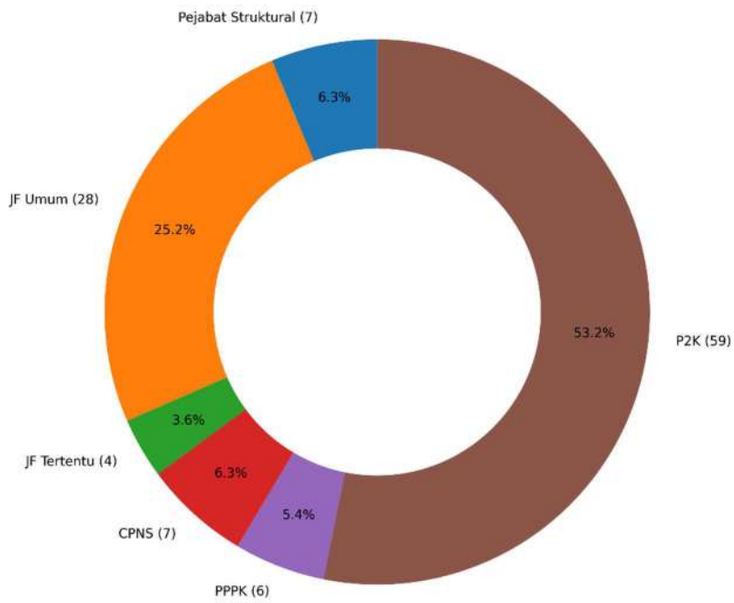

d. Berdasarkan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Tingkat partisipasi pegawai dalam pendidikan dan pelatihan masih relatif rendah, dengan hanya 6 pegawai (5,22%) yang tercatat mengikuti diklat struktural hingga tahun 2025 dan belum ada pegawai yang mengikuti diklat fungsional. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pengembangan kompetensi perlu mendapatkan perhatian serius.

Dinas perlu menyusun rencana pengembangan SDM jangka menengah yang terintegrasi dalam RENSTRA, meliputi pelatihan teknis kepariwisataan, pengelolaan event, ekonomi kreatif, serta pelestarian budaya. Selain itu, perlu ditingkatkan akses pelatihan berbasis digital serta kemitraan dengan lembaga sertifikasi kompetensi pariwisata dan kebudayaan tingkat nasional.

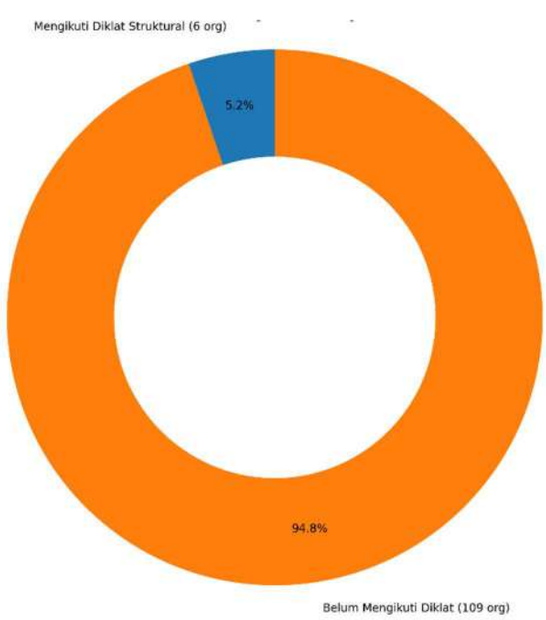

2. Kondisi Sarana/Prasana Yang dimiliki

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai. Kondisi sarana prasarana saat ini dirasakan sudah/belum cukup memadai disamping itu banyak sarana prasarana ynag perlu peremajaan dan tentunya perlu pemeliharaan setiap tahunnya.

Secara detail, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki berdasarkan data awal tahun 2024 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Data sumberdaya Sarana dan Prasarana

NO	JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
	Gedung :							
1	Gedung Kantor Disporawisata di Kebumen	1	-	-	1	-	-	1
2	Gedung Sapta Pesona	1	-	-	1	-	-	1
3	Gedung Kantor Obwis PAP Krakal	1	-	-	1	-	-	1
4	Gedung Kantor Obwis Pantai Karangbolong	1	-	-	1	-	-	1
5	Bangunan kantor dan loket Goa Petruk	-	1	-	1	-	-	1
6	Bangunan Kantor Pengurus Obwis Goa Jatijajar	1	-	-	1	-	-	1
7	Bangunan Kantor Obwis Pantai Suwuk	1	-	-	1	-	-	1
8	Bangunan Kantor Obwis Pantai Petanahan	1	-	-	1	-	-	1
9	Bangunan Kantor Obwis Pantai Logending	1	-	-	1	-	-	1
10	Bangunan Kantor Waduk Sempor	1	1	-	2	-	-	1
11	Bangunan Kantor Waduk Wadaslintang	-	-	1	1	-	-	1
	Kendaraan :							
12	Mobil Roda 4	5	-	1	6	3	3	5
13	Truck	1	-	-	1	1	1	-
14	Kontainer Sampah	-	-	3	3	5	5	3
15	Sepeda Motor Roda 2	26	3	3	32	5	5	3
16	Sepeda Motor Roda 3	2	-	3	5	5	5	3
	Sarpras Elektronik:							
17	P.C Unit	10	5	12	27	8	8	3
18	Laptop	22	-	7	29	5	5	3
19	Printer	21	-	13	34	5	5	5
20	UPS	11	-	7	18	5	5	5
21	Kamera Elektronik	5	-	4	9	5	5	3
22	Video Kamera	3	-	1	4	3	3	3
23	Drone	1	-	1	2	2	2	3
24	TV	12	-	1	13	5	5	3
25	Sound System	3	-	3	6	-	-	-
26	CCTV	37	-	-	37	-	-	-

NO	JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
27	A.C Unit	30	2	3	35	-	-	-
28	Projector	3	-	2	5	3	3	3
29	Loud Speaker	37	-	-	37	5	-	5
30	Megaphone	24	-	-	24	-	-	-
31	Handy Talky	6	-	5	11	6	-	6
32	Wireless	3	2	-	5	2	-	2
33	Kipas Angin	8	-	-	8	2	-	2
34	Telephone	1	-	-	1	-	-	-
	Sarpras Kantor:							
35	Lemari Besi/Arsip	18	-	-	18	3	3	-
36	Lemari Kayu	17	-	-	17	-	-	-
37	Lemari Kaca	7	-	-	7	-	-	-
38	Lemari Es	4	-	-	4	-	-	-
39	Rak Besi	14	-	-	14	3	-	3
40	Filing Cabinet	26	2	-	28	10	-	10
41	Meja Kerja Eselon II	1	-	-	1	-	-	-
42	Meja Kerja Eselon III	4	-	-	4	-	-	-
43	Meja Kerja Eselon IV	8	-	-	8	-	-	-
44	Kursi Kerja Eselon II	1	-	-	1	-	-	-
45	Kursi Kerja Eselon III	4	-	-	4	-	-	-
46	Kursi Kerja Eselon IV	9	-	-	9	-	-	-
47	Meja kerja staf	16	-	-	16	20	20	20
48	Kursi Kerja Staf	69	-	-	69	10	10	10
49	Meja rapat	19	-	-	19	6	6	-
50	Kursi rapat	92	-	-	92	-	-	-
51	Kursi tungu	10	-	-	10	5	5	-
52	Kursi tamu	6	-	-	6	5	5	-
53	Sofa	6	-	-	6	-	-	-
54	Kompor gas	1	-	-	1	1	1	-
55	Kitchen Set	1	-	-	1	-	-	-
56	Genset	6	1	2	9	2	2	-
57	Mesin Potong Rumput	15	5	7	27	3	3	3
58	Meja Receptionist	1	-	-	1	-	-	-
59	Apar	9	-	-	9	-	-	-
60	Mesin Pompa Air	7	-	1	8	-	-	-
61	Gerobak dorong	5	1	1	7	9	9	-

Berdasarkan tabel 2.2 terlihat bahwa Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen secara umum berada dalam kondisi baik, meskipun beberapa fasilitas strategis membutuhkan peningkatan kualitas dan kapasitas. Dari hasil inventarisasi tahun 2025, total sarpras meliputi gedung operasional, kendaraan dinas, perangkat elektronik, dan sarana perkantoran dengan mayoritas berada dalam kondisi layak.

Pada kelompok **gedung operasional**, sebagian besar fasilitas berada dalam kondisi baik, kecuali beberapa unit yang memerlukan pemeliharaan berkala mengingat lokasi wisata yang berada di kawasan pesisir dan gua rentan terhadap kerusakan.

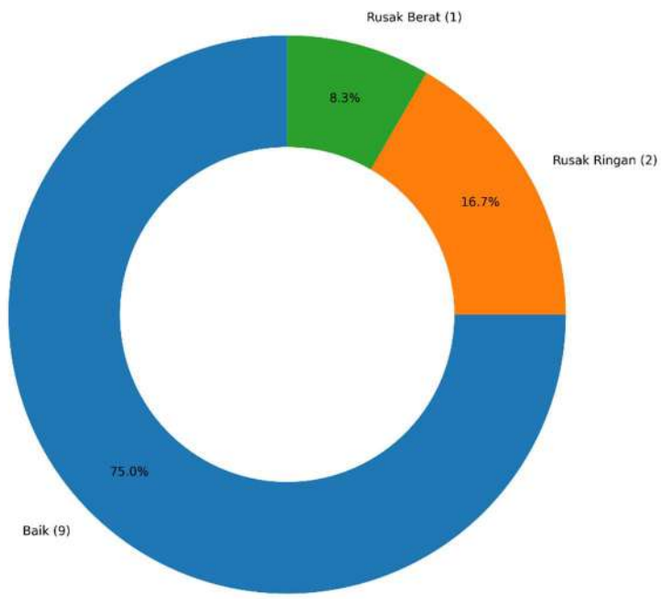

Kondisi **kendaraan** Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total 44 unit kendaraan, sebanyak 34 unit berada dalam kondisi baik, 3 unit mengalami kerusakan ringan, dan 10 unit mengalami kerusakan berat. Kerusakan terbesar terdapat pada kendaraan pendukung operasional kebersihan dan pengawasan destinasi, seperti kontainer sampah dan sepeda motor roda tiga. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pada periode 2025–2029, diperlukan penambahan 19 unit kendaraan serta pemeliharaan berkala terhadap 16 unit guna memastikan keberlangsungan pelayanan, pengelolaan destinasi, dan mobilitas petugas secara optimal.

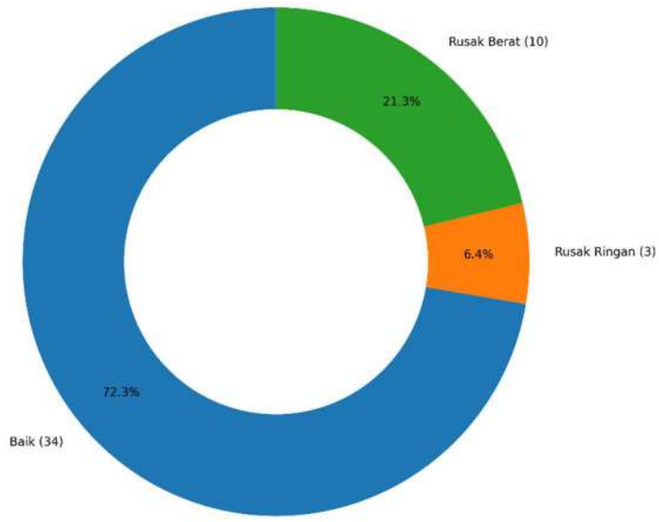

Sarpras elektronik Disparbud masih mampu mendukung pelayanan, namun kerusakan berat pada 59 unit menunjukkan perlunya strategi peremajaan perangkat secara bertahap. Peningkatan kebutuhan digitalisasi layanan (e-ticketing, promosi digital, pusat layanan geopark, integrasi data wisata) menuntut peningkatan kapasitas perangkat elektronik pada periode 2025–2029. Pemeliharaan berkala, penguatan manajemen aset, dan pengadaan perangkat baru merupakan prioritas penting dalam mendukung transformasi layanan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kebumen..

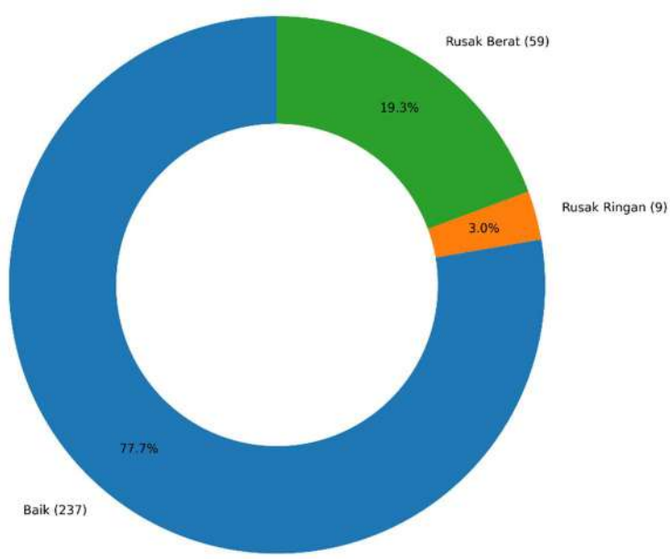

Sementara itu, Kondisi **sarpras kantor** Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 menunjukkan kinerja aset yang sangat baik, di mana dari total 396 unit berada dalam kondisi layak pakai. Kerusakan yang muncul relatif kecil, terdiri dari 9 unit rusak ringan dan 11 unit rusak berat, terutama pada sarpras pendukung kegiatan lapangan seperti genset dan mesin potong rumput. Sementara itu, sarpras inti yang mendukung operasional administrasi—

seperti meja kerja, kursi staf, lemari arsip, serta fasilitas ruang rapat—secara umum masih sangat memadai.

Namun, proyeksi kebutuhan lima tahunan memperlihatkan perlunya penambahan 77 unit dan pemeliharaan 46 unit untuk memastikan kualitas layanan internal tetap optimal seiring meningkatnya beban kerja organisasi, jumlah destinasi yang dikelola, serta kebutuhan pelayanan berbasis digital. Secara strategis, prioritas penguatan sarpras kantor diarahkan pada peningkatan sarpras staf, peralatan operasional lapangan, serta efektivitas ruang rapat sebagai pusat koordinasi kebijakan pariwisata dan kebudayaan.

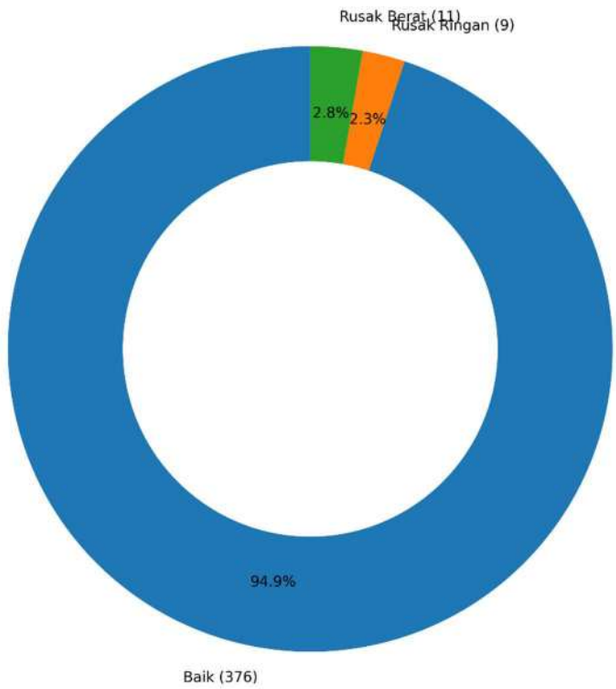

Secara keseluruhan, kondisi sarpras Disparbud menunjukkan bahwa dalam lima tahun ke depan diperlukan strategi pemeliharaan rutin, pembaruan barang yang mengalami kerusakan berat, serta penambahan sarpras untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan data kondisi sarana dan prasarana kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2025, sebagian besar aset berada dalam kondisi baik, yaitu sebanyak 376 unit (±94,9%). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum sarana kerja masih mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat 20 unit aset (±5,1%) yang berada dalam kondisi tidak optimal, terdiri atas 9 unit rusak ringan (±2,3%) dan 11 unit rusak berat (±2,8%).

Apabila dikaitkan dengan jumlah SDM, khususnya pegawai yang secara langsung memanfaatkan dan mengelola aset kantor, maka rasio aset terhadap SDM tergolong cukup tinggi. Dengan jumlah pegawai mencapai 115 orang, setiap pegawai pada prinsipnya bergantung pada ketersediaan dan kelayakan sarana kerja yang memadai. Dalam konteks ini, keberadaan aset rusak ringan dan rusak berat berpotensi menurunkan efisiensi kerja, memperlambat proses administrasi, serta meningkatkan beban operasional bagi pegawai yang harus berbagi atau menggunakan sarana pengganti.

Kondisi rusak ringan pada sebagian aset menunjukkan perlunya pemeliharaan rutin dan perbaikan cepat agar kerusakan tidak berkembang menjadi rusak berat. Sementara itu, aset dengan kondisi rusak berat mencerminkan adanya keterbatasan dalam siklus peremajaan sarana, baik akibat usia teknis aset maupun keterbatasan alokasi anggaran pemeliharaan dan penggantian. Jika tidak segera ditangani, aset rusak berat berpotensi menimbulkan pemborosan biaya jangka panjang serta menghambat kelancaran pelayanan dan kinerja organisasi.

Dalam perspektif modernisasi sarana dan prasarana, kondisi ini juga menunjukkan adanya tantangan antara kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas kerja dengan ketersediaan anggaran. Di tengah tuntutan transformasi digital, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kinerja sektor pariwisata dan kebudayaan, sarana kerja yang modern, ergonomis, dan berbasis teknologi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Namun demikian, keterbatasan anggaran belanja modal dan pemeliharaan menyebabkan proses modernisasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penataan sarana dan prasarana yang terukur, antara lain melalui:

- Prioritisasi penanganan aset rusak berat untuk mendukung fungsi pelayanan utama.
- Pemeliharaan preventif terhadap aset rusak ringan agar tidak meningkatkan biaya perbaikan di masa mendatang.
- Perencanaan modernisasi sarpras secara bertahap yang disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah.
- Penyesuaian perencanaan aset dengan jumlah dan kebutuhan SDM, sehingga setiap pegawai dapat bekerja secara optimal dengan dukungan sarana yang memadai.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya berorientasi pada ketersediaan fisik aset, tetapi juga mendukung efektivitas kerja SDM serta keberlanjutan kinerja organisasi dalam jangka menengah dan panjang.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

1. Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

   Selama periode Rencana Strategis sebelumnya (2021–2024), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Pelaksanaan program tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan, pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.

   Secara umum, kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen pada periode tersebut dapat dikategorikan cukup baik, dengan sejumlah capaian kinerja utama yang menunjukkan kontribusi positif terhadap pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di daerah. Capaian kinerja pelayanan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 selanjutnya disajikan pada T-C.23 (tabel 2.3) dan Tabel T-C.24 (tabel 2.4) pada Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

No	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Persentase Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	**Urusan Bidang Kebudayaan**	**Persentase Budaya yang Dilestarikan (Persen)**	20.82	25.05	29.82	34.05	30.00	34.89	60.30	65.00	144.09	139.28	202.21	190.90
2	Program Pengembangan Kebudayaan	prosentase kesenian yang dikembangkan (persen)	21.88	28.13	34.38	40.63	60.00	42.86	44.44	41.27	274.22	152.36	129.26	101.58
3	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen (persen)	13	26	39	52	13	32.33	44.57	52.67	100.00	124.35	114.28	101.29
4	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Paket Pemeliharaan dan pengelolaaan Kampung Jawa Kebumen (paket)	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5		Jumlah Pentas selapanan Kampung Jawa Kebumen (kali)	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah penghayat kepercayaan yang dibina (orang)	50	50	50	50	50	50	50	50	100.00	100.00	100.00	100.00
7		Jumlah peserta pelatihan seni di Kampung Jawa Kebumen (orang)	50	50	50	50	50	50	50	50	100.00	100.00	100.00	100.00
8		Jumlah peserta sosialisasi tentang Pemajuan Kebudayaan (orang)	50	50	50	50	50	50	50	50	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan kesenian yang diselenggarakan (kali)	17	17	17	17	17	17	17	17	100.00	100.00	100.00	100.00
11		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (jenis)	25	25	25	25	25	25	25	25	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Persentase Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah peserta kegiatan dialog seniman dan pelaku seni (orang)	75	75	75	75	75	75	75	75	100.00	100.00	100.00	100.00
13		Jumlah lembaga kebudayaan yang difasilitasi (PEPADI dan DKD) (lembaga)	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (persen)	19.78	21.98	25.27	27.47	0.00	26.92	76.15	88.73	0	122.47	301.35	323.01
15	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan (persen)	20	21	25	29	20.00	26.92	76.15	88.73	100.00	126.09	304.60	305.97
16	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi/ dikelola secara terpadu (obyek)	0	1	6	6	0	1	6	6	0	100.00	100.00	100.00
17		Jumlah peserta bimtek juru kunci, komunitas dan pemerhati cagar budaya (orang)	50	50	50	50	50	50	50	50	100.00	100.00	100.00	100.00
18		Jumlah peserta bimtek Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) (orang)	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
19	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang di alih mediakan (obyek)	10	3	10	10	10	3	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00
20		Jumlah dokumen kajian pengusulan warisan budaya (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
21		Jumlah cagar budaya yang didata termasuk dalam wilayah geopark (obyek)	0	30	30	30	0	30	30	30	0	100.00	100.00	100.00
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD (persen)**	1.84	1.90	1.91	2.03	**0.65**	**1.10**	**1.31**	**1.91**	35.33	57.89	68.59	94.09

No	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Persentase Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
23	***PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA***	***Persentase penyediaan sarana prasarana pariwisata (persen)***	***80.90***	***82.77***	***84.64***	***86.52***	***80.90***	***82.71***	***88.72***	***86.86***	100.00	99.93	104.82	100.39
24	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (kegiatan)	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
25	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota (orang)	500	525	550	575	500	525	550	575	100.00	100.00	100.00	100.00
26	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola (unit)	9	9	9	9	9	9	9	9	100.00	100.00	100.00	100.00
27	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pariwisata kab/kota (dokumen)	7	4	4	5	7	4	4	5	100.00	100.00	100.00	100.00
28	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikembangkan dan dikelola (destinasi)	9	5	10	11	9	5	10	11	100.00	100.00	100.00	100.00
29	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat (kegiatan)	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00	100.00	100.00	100.00
30	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
31	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah unit bidang usaha pariwisata yang terbina/ sosialisasi (bidang)	4	2	4	4	4	2	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00
32	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola pemda (obwis)	8	8	8	8	8	8	8	8	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Persentase Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
33	***PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA***	***Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (persen)***	***24.00***	***19.00***	***20.00***	***25.00***	***13.18***	***67.94***	***32.47***	***38.69***	54.92	357.58	162.35	154.76
34	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara (orang)	1,000,100	1,200,130	1,300,160	1,400,200	966,941	1.623.865	2.151.109	2.983.422	96.68	135.31	165.45	213.07
35	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/event pemasaran pariwisata yang dilaksanakan (kegiatan)	12	15	16	17	12	15	16	17	100.00	100.00	100.00	100.00
36	***PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF***	***Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar (persen)***	***18.75***	***20.00***	***20.00***	***20.00***	***20***	***20.00***	***20.00***	***20.00***	106.67	100.00	100.00	100.00
37	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (kegiatan)	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
38	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Tingkat Dasar (orang)	200	220	250	270	200	220	250	270	100.00	100.00	100.00	100.00
39	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah (persen)***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	100.00	100.00	100.00	100.00
40	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	6	6	6	6	6	6	6	6	100.00	100.00	100.00	100.00
41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (dokumen)	2	4	4	4	2	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00
42	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	0	2	2	2	0	2	2	2	0	100.00	100.00	100.00

No	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Persentase Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
43	administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kegiatan diklat dalam 1 tahun (kali)	0	1	1	1	0	1	1	0	0	100.00	100.00	0.00
44	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah orang yang mengikuti diklat (orang)	0	55	60	60	0	55	60	60	0	100.00	100.00	100.00
45	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (kegiatan)	0	4	4	4	0	4	4	4	0	100.00	100.00	100.00
46	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00
47	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (orang)	66	66	66	66	66	66	66	66	100.00	100.00	100.00	100.00
48	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (dokumen)	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00
49	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00
50	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (unit)	580	580	585	588	580	580	585	588	100.00	100.00	100.00	100.51
51	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00
52	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00
53	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (dokumen)	720	720	720	720	720	720	720	720	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Persentase Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
54	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00
55	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	58	60	62	63	58	60	62	63	100.00	100.00	100.00	101.61
56	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	23	37	40	42	12	9	15	28	52.17	24.32	37.50	70.00
57	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel (unit)	6	19	23	24	6	19	23	24	100.00	100.00	100.00	104.35
58	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	17	20	17	18	17	20	17	18	100.00	100.00	100.00	105.88
59	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00
60	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00
61	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyesuaian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00
62	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00
63	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (unit)	51	51	54	56	51	51	54	56	100.00	100.00	100.00	103.70

No	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Persentase Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
64	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	37	37	37	37	37	37	37	37	100.00	100.00	100.00	100.00
65	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara (unit)	5	5	5	5	5	5	5	5	100.00	100.00	100.00	100.00
66	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara (unit)	7	7	10	12	7	7	10	12	100.00	100.00	100.00	120.00
67	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara (unit)	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, dapat dilihat bahwa dari dua indikator kinerja utama yang menjadi ukuran kinerja Disparbud Kabupaten Kebumen, semuanya pada akhir tahun renstra hanya satu indikator yang mencapai target. Namun demikian indikator kinerja tersebut akan terus dipertahankan dan pencapaiannya akan ditingkatkan karena inilah tupoksi Disparbud Kabupaten Kebumen, akan tetapi pencapaian ini juga terus berjalan fluktuatif.

Tren kinerja pelestarian budaya menunjukkan peningkatan yang baik selama 2021–2023, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebelum mengalami koreksi wajar pada 2024. Proyeksi 2025–2026 menunjukkan stabilisasi pada level yang lebih realistis sesuai penyesuaian target Renstra. Secara keseluruhan, kinerja urusan kebudayaan berada pada posisi baik , menandakan keberhasilan program pelestarian budaya dan banyaknya partisipasi komunitas.

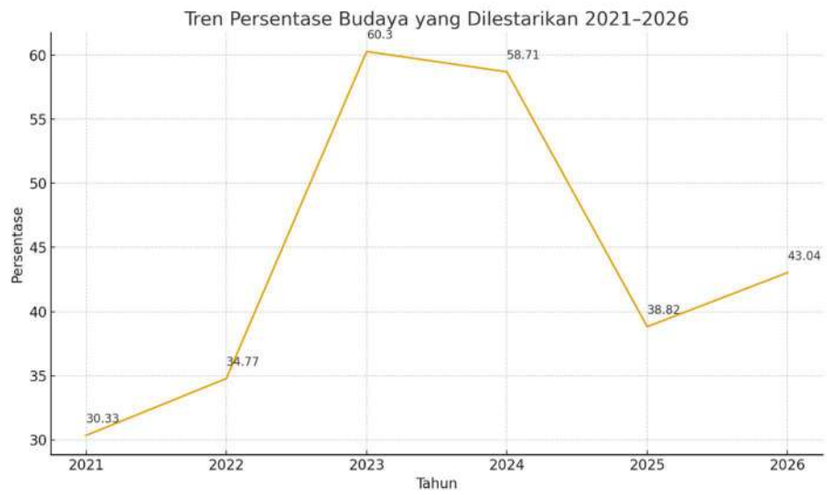

Sementara itu, tren kontribusi pariwisata terhadap PAD memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari 2021 hingga mencapai puncak pada 2024, meskipun belum dapat melampaui target Renstra. Koreksi yang terjadi pada 2025 bersifat moderat dan kembali menunjukkan peningkatan pada 2026. Secara umum, kinerja pariwisata menunjukkan pertumbuhan positif, namun masih membutuhkan optimalisasi pendapatan dan penguatan kunjungan wisata untuk mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja utama maupun yang bukan utama akan terus dipertahankan dan pencapaiannya akan terus ditingkatkan dengan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Permedagri Nomor 90 Tahun 2019.

Evaluasi Kinerja Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Setiap tahun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja setiap tahunnya. Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 95 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Dan secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Persentase antara Realisasi dan Anggaran				Rerata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**0,00**	**1.912.000.000**	**4.139.238.000**	**2.546.220.000**	**0,00**	**1.876.678.472**	**3.896.224.927**	**2.533.074.055**	**0,00%**	**98,15%**	**94,13%**	**99,48%**	**39,00%**	**36,31%**
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**0,00**	**195.000.000**	**125.977.000**	**116.409.000**	**0,00**	**188.285.580**	**122.745.669**	**116.260.250**	**0,00%**	**96,56%**	**97,43%**	**99,87%**	**-21,50%**	**-20,05%**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	0	130.000.000	81.867.000	78.501.000	0	127.095.630	80.100.127	78.500.950	0,00%	97,77%	97,84%	100,00%	-20,57%	-19,49%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0,00	65.000.000	44.110.000	37.908.000	0,00	61.189.950	42.645.542	37.759.300	0,00%	94,14%	96,68%	99,61%	-23,10%	-20,88%
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**0**	**1.717.000.000**	**4.013.261.000**	**2.429.811.000**	**0**	**1.688.392.892**	**3.773.479.258**	**2.416.813.805**	**0,00%**	**98,33%**	**94,03%**	**99,47%**	**47,14%**	**43,77%**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0	1.667.000.000	3.489.786.000	2.304.216.000	0	1.640.976.494	3.251.839.258	2.292.646.805	0,00%	98,44%	93,18%	99,50%	37,69%	34,33%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0	50.000.000	523.475.000	125.595.000	0	47.416.398	521.640.000	124.167.000	0,00%	94,83%	99,65%	98,86%	435,47%	461,96%
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**0**	**336.350.000**	**20.169.774.000**	**1.494.719.960**	**0**	**288.685.100**	**19.704.577.373**	**1.470.143.910**	**0,00%**	**85,83%**	**97,69%**	**98,36%**	**2902,04%**	**3316,55%**
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**0**	**336.350.000**	**20.169.774.000**	**1.494.719.960**	**0**	**288.685.100**	**19.704.577.373**	**1.470.143.910**	0,00%	85,83%	97,69%	98,36%	2902,04%	3316,55%
Pelindungan Cagar Budaya	0	246.350.000	87.456.000	84.277.000	0	221.296.100	83.693.950	82.836.900	0,00%	89,83%	95,70%	98,29%	-34,07%	-31,60%

Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Persentase antara Realisasi dan Anggaran				Rerata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Pengembangan Cagar Budaya	0	90.000.000	20.082.318.000	1.410.442.960	0	67.389.000	19.620.883.423	1.387.307.010	0,00%	74,88%	97,70%	98,36%	11060,35%	14461,46%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.830.535.000**	**7.303.014.000**	**6.836.327.773**	**6.883.050.000**	**6.415.400.254**	**6.747.361.490**	**6.522.217.273**	**6.637.387.975**	**81,93%**	**92,39%**	**95,41%**	**96,43%**	**-2,85%**	**-0,79%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**40.000.000**	**70.000.000**	**62.108.000**	**81.310.000**	**38.079.696**	**66.486.295**	**54.944.830**	**81.120.300**	**95,20%**	**94,98%**	**88,47%**	**99,77%**	**9,82%**	**15,14%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	47.108.000	68.244.000	38.079.696	37.421.978	40.087.715	68.177.550	95,20%	93,55%	85,10%	99,90%	31,32%	38,60%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	30.000.000	15.000.000	13.066.000	0	29.064.317	14.857.115	12.942.750	0,00%	96,88%	99,05%	99,06%	-31,45%	-30,88%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**6.826.950.000**	**6.051.570.000**	**5.479.424.773**	**5.672.299.000**	**5.568.456.473**	**5.538.450.912**	**5.213.574.010**	**5.452.732.200**	**81,57%**	**91,52%**	**95,15%**	**96,13%**	**-2,97%**	**-0,64%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.826.950.000	5.976.570.000	5.447.424.773	5.473.082.000	5.568.456.473	5.475.963.544	5.183.326.847	5.257.836.322	81,57%	91,62%	95,15%	96,07%	-4,19%	-1,95%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	75.000.000	32.000.000	199.217.000	0	62.487.368	30.247.163	194.895.878	0,00%	83,32%	94,52%	97,83%	232,61%	246,37%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0**	**415.353.000**	**522.753.000**	**370.000.000**	**0**	**392.761.152**	**511.018.525**	**362.758.995**	**0,00%**	**94,56%**	**97,76%**	**98,04%**	**-1,68%**	**0,55%**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	50.000.000	30.000.000	0	0	47.907.525	29.510.000	0	0,00%	95,82%	98,37%	#DIV/0!	-70,00%	-69,20%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	365.353.000	492.753.000	370.000.000	0	344.853.627	481.508.525	362.758.995	0,00%	94,39%	97,72%	98,04%	4,98%	7,48%

Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Persentase antara Realisasi dan Anggaran				Rerata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**273.300.000**	**329.276.000**	**197.900.000**	**213.692.000**	**255.530.722**	**328.352.555**	**196.283.750**	**213.356.372**	**93,50%**	**99,72%**	**99,18%**	**99,84%**	**-15,96%**	**-15,76%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.500.000	42.000.000	30.400.000	30.400.000	38.493.151	41.883.255	30.290.000	30.399.000	99,98%	99,72%	99,64%	100,00%	-13,81%	-13,66%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.000.000	56.075.000	33.000.000	52.950.000	62.897.904	55.805.650	32.981.500	52.893.672	99,84%	99,52%	99,94%	99,89%	9,65%	9,74%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.000.000	75.000.000	42.000.000	55.500.000	76.978.631	74.683.400	41.999.000	55.484.500	99,97%	99,58%	100,00%	99,97%	-5,93%	-5,83%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.758.000	3.352.000	3.355.000	3.448.000	98,50%	95,77%	95,86%	98,51%	0,00%	1,43%
Penyediaan Bahan/Material	42.000.000	41.467.000	25.000.000	23.342.000	41.999.650	41.427.700	24.857.550	23.135.000	100,00%	99,91%	99,43%	99,11%	-23,17%	-23,46%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	111.234.000	64.000.000	48.000.000	32.403.386	111.200.550	62.800.700	47.996.200	64,81%	99,97%	98,13%	99,99%	-33,73%	-33,55%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**157.185.000**	**10.000.000**	**105.000.000**	**105.000.000**	**151.165.000**	**9.626.000**	**103.235.000**	**99.730.000**	**96,17%**	**96,26%**	**98,32%**	**94,98%**	**475,00%**	**484,53%**
Pengadaan Mebel	20.000.000	0	15.000.000	15.000.000	18.050.000	0	14.680.000	14.670.000	90,25%	0%	97,87%	97,80%	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.185.000	10.000.000	90.000.000	90.000.000	133.115.000	9.626.000	88.555.000	85.060.000	97,03%	96,26%	98,39%	94,51%	400,00%	408,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**378.100.000**	**252.470.000**	**273.500.000**	**300.642.000**	**247.501.427**	**241.586.923**	**250.598.662**	**288.212.578**	**65,46%**	**95,69%**	**91,63%**	**95,87%**	**9,13%**	**9,37%**

Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Persentase antara Realisasi dan Anggaran				Rerata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.943.500	2.994.500	1.987.500	1.982.400	92,55%	99,82%	99,38%	99,12%	-16,67%	-16,94%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	355.000.000	227.470.000	256.500.000	250.000.000	224.637.327	216.666.173	233.701.562	237.774.828	63,28%	95,25%	91,11%	95,11%	5,11%	4,80%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.000.000	22.000.000	15.000.000	48.642.000	20.920.600	21.926.250	14.909.600	48.455.350	99,62%	99,66%	99,40%	99,62%	96,23%	96,50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**155.000.000**	**174.345.000**	**195.642.000**	**140.107.000**	**154.666.936**	**170.097.653**	**192.562.496**	**139.477.530**	**99,79%**	**97,56%**	**98,43%**	**99,55%**	**-8,09%**	**-7,18%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.000.000	110.000.000	112.210.000	99.907.000	110.933.936	108.127.343	109.427.346	99.604.030	99,94%	98,30%	97,52%	99,70%	-4,48%	-3,89%
Pemeliharaan Mebel	2.000.000	4.345.000	4.300.000	4.200.000	1.990.000	4.190.000	4.300.000	4.200.000	99,50%	96,43%	100,00%	100,00%	-1,68%	0,15%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000	10.000.000	18.500.000	12.000.000	13.997.000	10.000.000	18.433.000	11.673.500	99,98%	100,00%	99,64%	97,28%	24,93%	23,83%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.000.000	50.000.000	60.632.000	24.000.000	27.746.000	47.780.310	60.402.150	24.000.000	99,09%	95,56%	99,62%	100,00%	-19,58%	-16,92%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**3.090.282.000**	**8.050.556.000**	**3.100.585.000**	**6.725.227.040**	**2.958.584.532**	**7.775.978.209**	**3.011.941.094**	**6.546.329.085**	**95,74%**	**96,59%**	**97,14%**	**97,34%**	**27,71%**	**28,04%**
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**221.644.000**	**650.000.000**	**203.683.000**	**1.127.108.040**	**210.262.850**	**633.178.168**	**202.133.000**	**1.125.188.670**	**94,87%**	**97,41%**	**99,24%**	**99,83%**	**192,35%**	**194,29%**
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	221.644.000	650.000.000	203.683.000	1.127.108.040	210.262.850	633.178.168	202.133.000	1.125.188.670	94,87%	97,41%	99,24%	99,83%	192,35%	194,29%

Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Persentase antara Realisasi dan Anggaran				Rerata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**2.746.916.000**	**7.270.556.000**	**2.821.902.000**	**5.545.420.000**	**2.632.824.132**	**7.017.178.367**	**2.739.206.265**	**5.368.545.465**	**95,85%**	**96,52%**	**97,07%**	**96,81%**	**17,66%**	**17,51%**
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	304.238.000	300.000.000	95.000.000	88.081.000	287.338.100	291.575.000	79.111.607	83.615.800	94,45%	97,19%	83,28%	94,93%	-37,81%	-33,59%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	24.913.000	0	0	0	19.195.000	0	0	0	77,05%	0%	0%	0%	0	0
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	289.298.000	5.488.746.000	343.554.000	880.407.000	270.353.585	5.287.447.131	341.244.300	851.844.630	93,45%	96,33%	99,33%	96,76%	31,26%	28,04%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.128.467.000	1.481.810.000	2.383.348.000	4.576.932.000	2.055.937.447	1.438.156.236	2.318.850.358	4.433.085.035	96,59%	97,05%	97,29%	96,86%	76,44%	76,21%
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**121.722.000**	**130.000.000**	**75.000.000**	**52.699.000**	**115.497.550**	**125.621.674**	**70.601.829**	**52.594.950**	**94,89%**	**96,63%**	**94,14%**	**99,80%**	**-36,02%**	**-34,65%**
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	63.500.000	65.000.000	30.000.000	11.851.000	61.077.000	63.100.374	27.604.729	11.808.750	96,18%	97,08%	92,02%	99,64%	-57,17%	-56,74%
Pengelolaan Investasi Pariwisata	58.222.000	65.000.000	45.000.000	40.848.000	54.420.550	62.521.300	42.997.100	40.786.200	93,47%	96,19%	95,55%	99,85%	-20,00%	-18,19%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**995.333.000**	**1.244.321.000**	**2.390.924.000**	**2.028.931.000**	**917.471.400**	**1.214.238.775**	**2.320.188.566**	**2.003.003.918**	**92,18%**	**97,58%**	**97,04%**	**98,72%**	**38,50%**	**38,71%**
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**995.333.000**	**1.244.321.000**	**2.390.924.000**	**2.028.931.000**	**917.471.400**	**1.214.238.775**	**2.320.188.566**	**2.003.003.918**	**92,18%**	**97,58%**	**97,04%**	**98,72%**	**38,50%**	**38,71%**
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	771.749.000	0	0	0	702.512.900	0	0	0	91,03%	0%	0%	0%	0	0

Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Persentase antara Realisasi dan Anggaran				Rerata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	223.584.000	1.244.321.000	2.390.924.000	2.028.931.000	214.958.500	1.214.238.775	2.320.188.566	2.003.003.918	96,14%	97,58%	97,04%	98,72%	38,50%	38,71%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**50.725.000**	**125.000.000**	**60.000.000**	**73.452.000**	**47.783.196**	**120.421.172**	**59.515.950**	**73.179.942**	**94,20%**	**96,34%**	**99,19%**	**99,63%**	**-14,79%**	**-13,81%**
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**50.725.000**	**125.000.000**	**60.000.000**	**73.452.000**	**47.783.196**	**120.421.172**	**59.515.950**	**73.179.942**	**94,20%**	**96,34%**	**99,19%**	**99,63%**	**-14,79%**	**-13,81%**
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50.725.000	125.000.000	60.000.000	73.452.000	47.783.196	120.421.172	59.515.950	73.179.942	94,20%	96,34%	99,19%	99,63%	-14,79%	-13,81%
	11.966.875.000	**18.971.241.000**	**36.696.848.773**	**19.751.600.000**	**10.339.239.382**	**18.023.363.218**	**35.514.665.183**	**19.263.118.885**	**86,40%**	**95,00%**	**96,78%**	**97,53%**	**23,63%**	**25,64%**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen,2025

Dari tabel 2.4 diatas Selama periode 2021–2024, kinerja pengelolaan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menunjukkan tren positif dengan tingkat penyerapan yang relatif tinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data, rerata pertumbuhan anggaran tercatat sebesar 23,63%, sementara rerata pertumbuhan realisasi anggaran mencapai 25,64%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan, mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program.

Program Pengembangan Kebudayaan mencatat rerata pertumbuhan anggaran sebesar 39,00% dan realisasi 36,31%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan alokasi pada tahun 2023, dengan tingkat realisasi tetap tinggi meskipun terjadi penyesuaian anggaran pada tahun 2024. Program ini menunjukkan kinerja yang stabil dan berkontribusi terhadap pelestarian budaya daerah.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan, terutama akibat peningkatan alokasi dari basis awal yang relatif kecil. Kondisi ini mencerminkan adanya penguatan kebijakan daerah terhadap pelestarian cagar budaya sebagai aset strategis.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjukkan tren relatif stabil dengan rerata pertumbuhan anggaran -2,85% dan realisasi -0,79%. Penurunan ini mencerminkan upaya efisiensi belanja operasional tanpa mengurangi kualitas layanan internal, yang tercermin dari tingkat realisasi yang tetap tinggi.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mencatat pertumbuhan yang seimbang antara anggaran (27,71%) dan realisasi (28,04%). Hal ini menunjukkan perencanaan yang realistis serta pelaksanaan program yang efektif dalam mendukung pengembangan destinasi dan pemberdayaan masyarakat.

Program Pemasaran Pariwisata menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pertumbuhan anggaran dan realisasi yang hampir seimbang, masing-masing sebesar 38,50% dan 38,71%. Program ini menjadi penopang utama peningkatan kinerja sektor pariwisata.

Sementara itu, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami penurunan rerata pertumbuhan anggaran (-14,79%) dan realisasi (-13,81%). Penurunan ini menunjukkan perlunya penataan kembali kebijakan agar pengembangan SDM tetap sejalan dengan pembangunan fisik dan destinasi.

d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Kelompok sasaran layanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen mencakup seluruh pihak yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari program, kegiatan,

dan kebijakan di bidang pariwisata, kebudayaan, serta ekonomi kreatif.

Sasaran ini dirancang tidak hanya untuk masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kebumen, tetapi juga untuk memperkuat jejaring kerja sama antar daerah dalam pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan regional. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Masyarakat Umum dan Wisatawan

   Individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Kebumen yang memanfaatkan destinasi wisata, menikmati layanan informasi pariwisata, serta berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya.

   Kelompok ini menjadi penerima manfaat utama dari penyediaan fasilitas wisata, event budaya, tur edukatif, serta program promosi destinasi unggulan Kebumen.

2. Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

   Pemilik dan pengelola hotel, homestay, restoran, biro perjalanan, pemandu wisata, pelaku UMKM ekonomi kreatif, pengrajin, seniman, serta pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata dan kebudayaan.

   Mereka merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang produktif, berdaya saing, serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal.

3. Komunitas Budaya, Seniman, dan Lembaga Adat

   Sanggar seni, lembaga adat, pengelola cagar budaya, komunitas sejarah, pengurus museum, dan organisasi kesenian yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal serta pengembangan ekspresi seni tradisional maupun kontemporer.

   Kelompok ini berfungsi sebagai penjaga identitas dan karakter budaya daerah yang menjadi fondasi pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

4. Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Terkait

   Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen seperti Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, serta instansi vertikal lainnya yang menjadi mitra dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pariwisata dan kebudayaan.

   Sinergi antar-perangkat daerah ini mendukung integrasi kebijakan lintas sektor dan memastikan konsistensi pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

5. Dunia Usaha, Akademisi, dan Media

Asosiasi profesi, lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset, organisasi non-pemerintah, dan media massa yang berperan dalam promosi, edukasi, serta pengembangan inovasi kebijakan di sektor pariwisata dan kebudayaan.

Kelompok ini menjadi jembatan antara pemerintah dan publik dalam membangun kesadaran wisata, penguatan citra daerah, serta dokumentasi potensi budaya dan destinasi.

6. Mitra Kerja Sama Antar Daerah dan Lembaga Regional

Pemerintah daerah lain di lingkup Provinsi Jawa Tengah, kawasan selatan-selatan Jawa (Serayu Selatan–Joglosemar), maupun kerja sama antar kabupaten yang memiliki potensi pariwisata dan kebudayaan saling terhubung dengan Kebumen.

Termasuk pula lembaga regional, BUMD, BUMDes, serta jaringan tourism board dan komunitas lintas daerah yang menjadi mitra dalam pengembangan kerja sama promosi, paket wisata lintas destinasi, pertukaran budaya, serta penguatan konektivitas pariwisata.

Kelompok ini menjadi pilar utama dalam membangun kolaborasi daerah berbasis potensi wilayah dan kemitraan berkelanjutan.

e. Mitra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen menjalin kemitraan dengan berbagai pihak strategis yang berperan saling mendukung dan melengkapi. Dari unsur pemerintahan, kemitraan dibangun dengan instansi vertikal dan horizontal, termasuk kementerian/lembaga terkait, perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta pemerintah daerah lain, guna mewujudkan sinkronisasi program, keterpaduan kebijakan, dan penguatan tata kelola pelayanan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Dari unsur masyarakat, kemitraan melibatkan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelola destinasi wisata, pelaku seni dan budaya, komunitas budaya, serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang berperan aktif dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan layanan kepariwisataan dan kebudayaan. Selain itu, media massa dan komunitas digital turut menjadi mitra strategis dalam mendukung promosi, diseminasi informasi, dan peningkatan partisipasi publik.

Sementara itu, dari unsur swasta dan dunia usaha, kerja sama dilakukan dengan pelaku industri pariwisata, lembaga pendidikan dan penelitian, asosiasi profesi, serta lembaga perbankan dan nonperbankan untuk mendukung pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi, serta penguatan daya tarik dan daya saing destinasi wisata dan produk budaya daerah. Melalui dukungan kemitraan yang beragam tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen berupaya

mewujudkan pelayanan yang kolaboratif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pariwisata serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.

f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudaayaan Kabupaten Kebumen.

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam menunjang pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis perangkat daerah. Bentuk dukungan BUMD diarahkan pada penguatan pengelolaan aset pariwisata daerah serta optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata.

PT Aneka Usaha Kebumen Jaya berperan sebagai mitra melalui kerja sama pemanfaatan aset daerah, khususnya dalam bentuk penyewaan dan pengelolaan objek wisata milik Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pola kerja sama tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan destinasi wisata, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan penerimaan daerah dari sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bank Jateng berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah, khususnya melalui fasilitasi penyetoran dan pengelolaan penerimaan PAD pariwisata. Peran Bank Jateng dalam sistem penerimaan daerah mendukung akuntabilitas, ketertiban administrasi, serta transparansi pengelolaan pendapatan dari sektor pariwisata.

Melalui sinergi dengan BUMD tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen berupaya memperkuat pengelolaan destinasi wisata, meningkatkan optimalisasi PAD sektor pariwisata, serta mendorong tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam pemberian pelayanan dilaksanakan melalui berbagai bentuk kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor guna mendukung pengelolaan pariwisata dan kebudayaan secara terpadu, aman, dan berkelanjutan. Kerja sama tersebut mencakup sinergi antar-pemerintah daerah, kemitraan dengan BUMN/BUMD, serta kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga pendukung lainnya.

Salah satu bentuk kerja sama antar-daerah yang strategis adalah kerja sama pengelolaan Objek Wisata Waduk Wadaslintang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka pengelolaan destinasi wisata lintas wilayah yang memiliki keterkaitan geografis dan fungsi kawasan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan, kualitas pelayanan kepada pengunjung, serta optimalisasi potensi pariwisata bagi kedua daerah secara seimbang dan saling menguntungkan.

Selain itu, kerja sama pengelolaan Objek Wisata Pantai Logending dilaksanakan bersama Perum Perhutani, di mana pengelolaan wisata dilakukan melalui anak perusahaan Perum Perhutani, yaitu Econique PT Perhutani Alam Wisata (Palawi Risorsis). Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan kawasan hutan untuk pariwisata dilakukan secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi, fasilitas wisata, serta pelayanan kepada pengunjung.

Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta, antara lain PT Asuransi Jasa Raharja Putera, dalam rangka pemberian perlindungan asuransi bagi pengunjung objek wisata. Kerja sama ini mendukung peningkatan aspek keselamatan dan keamanan wisatawan, memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko kecelakaan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan objek wisata daerah.

Melalui berbagai bentuk kerja sama daerah tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen berupaya memperkuat tata kelola pengelolaan destinasi wisata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pengembangan pariwisata daerah yang aman, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. Permasalahan Dan Isu - Isu Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Permasalahan dan isu strategis pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen ditandai oleh masih adanya variasi kualitas layanan antar destinasi dan kegiatan kebudayaan, keterbatasan pemanfaatan inovasi serta teknologi informasi dalam pelayanan dan promosi, serta belum optimalnya sinergi dan jejaring kerja sama lintas sektor dalam mendukung pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian kebudayaan daerah. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum meratanya kualitas pengalaman wisata dan efektivitas pelayanan publik di sektor pariwisata dan kebudayaan.

Di sisi lain, dinamika perkembangan pariwisata regional dan nasional, meningkatnya ekspektasi wisatawan, serta tuntutan daya saing destinasi yang semakin kompetitif menuntut pelayanan yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap perubahan. Selain itu, kebutuhan akan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal menjadi tantangan tersendiri yang harus diintegrasikan dalam setiap bentuk pelayanan.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya perumusan strategi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, penguatan pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta pengembangan kemitraan yang lebih luas dan terintegrasi. Strategi pelayanan diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan wisatawan secara efektif, meningkatkan daya saing pariwisata daerah, serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Pertumbuhan sektor pariwisata dalam arti luas belum mampu memberikan kesejahteraan kepada para pelaku usaha pariwisata. Fluktuatifnya kunjungan wisatawan juga banyak faktor yang mempengaruhinya.

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam periode 2025-2029 menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Penyelesaian isu-isu strategis ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, serta dukungan anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan yang terintegrasi.

Renstra 2025-2029 akan menjadi landasan penting untuk mengatasi permasalahan yang ada dan merumuskan solusi-strategi yang dapat mendorong pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kebumen ke arah yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen menjadi awal dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun kedepan. Rencana progran, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifpun akan lebih realible dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, didasarkan pula pada pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
	URUSAN PARIWISATA			
1	Belum optimalnya peningkatan perekonomian daerah inklusif dan berdaya saing berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal	Belum optimalnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	• Belum terintegrasinya promosi dan pengelolaan destinasi wisata dengan potensi lokal (UMKM, ekonomi kreatif). • Kualitas dan daya tarik destinasi belum merata sehingga kunjungan wisatawan rendah. • Terbatasnya infrastruktur pendukung wisata (akses jalan, sarana publik, fasilitas informasi). • Koordinasi lintas sektor dan keterlibatan swasta/masyarakat masih terbatas.	• Kunjungan wisatawan belum meningkat secara signifikan. • Daya tarik destinasi kalah bersaing dengan daerah tetangga. • Promosi digital pariwisata masih minim. • Pemanfaatan potensi lokal belum menghasilkan nilai ekonomi optimal.
	URUSAN KEBUDAYAAN			
2	Meningkatnya potensi pergeseran nilai budaya	Masih belum banyaknya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional sehingga jumlah grup kesenian dari Kebumen pada tahun 2023 tidak bertambah	• Minimnya program regenerasi dan pembinaan kesenian tradisional bagi generasi muda. • Kesenian tradisional kurang dipromosikan dengan cara yang menarik bagi anak muda. • Terbatasnya dukungan insentif dan fasilitas bagi pelaku seni tradisi. • Terpengaruhnya pola konsumsi budaya oleh arus globalisasi dan modernisasi.	• Stagnasi jumlah grup kesenian tradisional. • Berkurangnya eksistensi kesenian tradisional di ruang publik. • Kesenian tradisional kurang diminati wisatawan sebagai atraksi. • Hilangnya identitas budaya lokal di kalangan generasi muda.

Pohon Kinerja Urusan Kebudayaan disusun untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antara tujuan pembangunan daerah dengan sasaran, indikator, serta rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan. Pohon kinerja ini menegaskan kontribusi Urusan Kebudayaan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta peningkatan kualitas warisan budaya daerah, melalui penguatan pelestarian seni, budaya, dan adat istiadat yang melibatkan peran aktif masyarakat.

Struktur pohon kinerja menunjukkan alur pencapaian kinerja secara bertahap, dimulai dari ultimate outcome berupa meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan kualitas warisan budaya daerah, yang diturunkan ke intermediate outcome berupa meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya, dan adat istiadat. Selanjutnya, capaian tersebut didukung oleh immediate outcome yang mencakup peningkatan pengembangan kebudayaan serta peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, yang dioperasionalkan melalui pengelolaan kebudayaan berbasis masyarakat, pelestarian kesenian tradisional, dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.

Melalui pohon kinerja ini, seluruh proses perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, serta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan disusun secara terarah dan terukur, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penetapan indikator kinerja, serta evaluasi capaian Urusan Kebudayaan secara konsisten dan akuntabel.

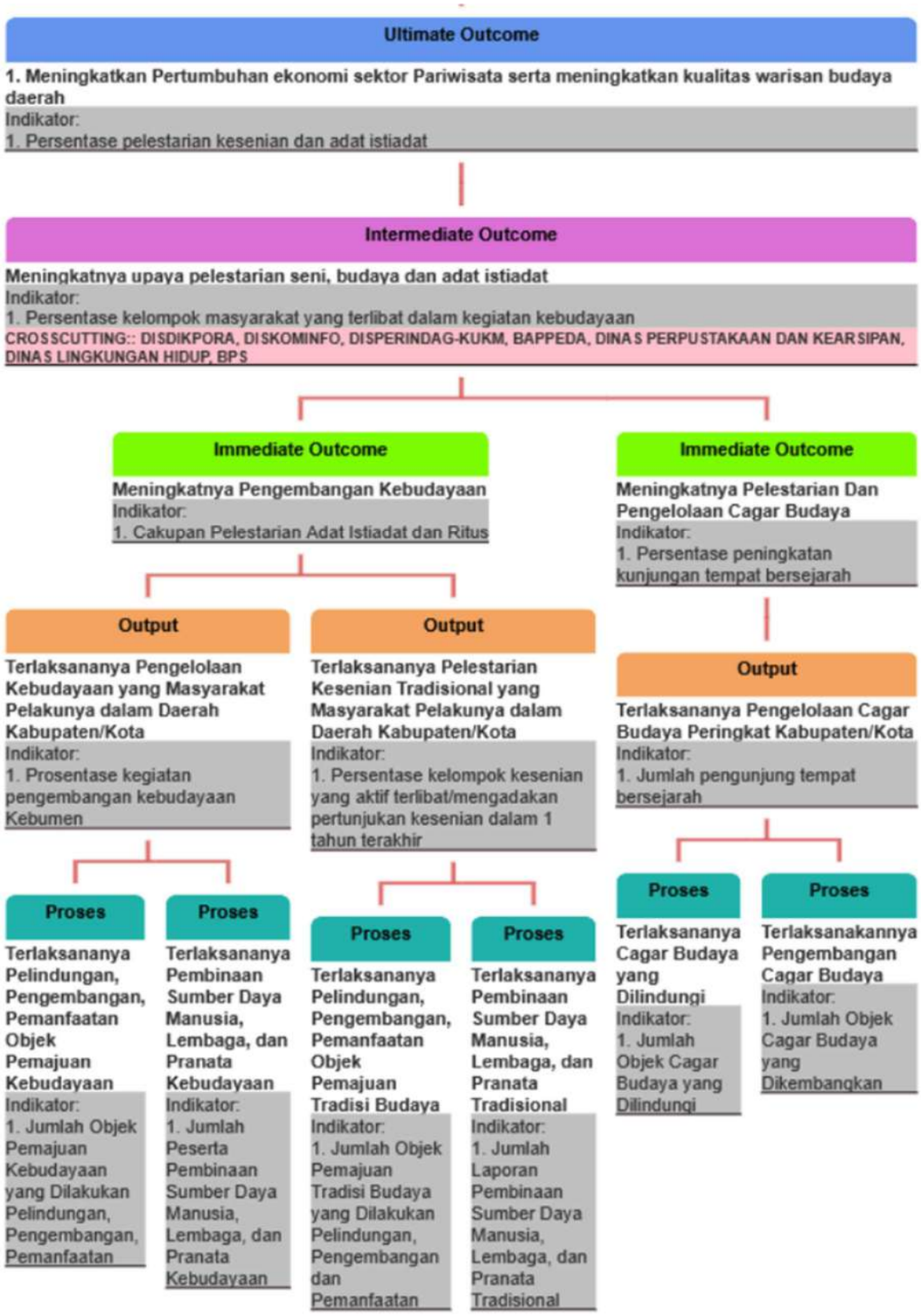
Ultimate Outcome
1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah
Indikator:
1. Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat
Intermediate Outcome
Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat
Indikator:
1. Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan
CROSSCUTTING:: DISDIKPORA, DISKOMINFO, DISPERINDAG-KUKM, BAPPEDA, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BPS
Immediate Outcome
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan
Indikator:
1. Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus
Immediate Outcome
Meningkatnya Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Indikator:
1. Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah
Output
Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen
Output
Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir
Output
Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Jumlah pengunjung tempat bersejarah
Proses
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Indikator:
1. Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Proses
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Indikator:
1. Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Proses
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Indikator:
1. Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Proses
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Indikator:
1. Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Proses
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi
Indikator:
1. Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi
Proses
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya
Indikator:
1. Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan

Pohon Kinerja **Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** disusun untuk menggambarkan keterkaitan logis dan berjenjang antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pohon kinerja ini menegaskan peran Urusan Pariwisata dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, yang diukur melalui rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebagai indikator utama kinerja sektor.

Struktur pohon kinerja menunjukkan bahwa pencapaian tujuan tersebut diturunkan ke dalam intermediate outcome berupa meningkatnya kualitas obyek wisata, meningkatnya kunjungan pariwisata, serta meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif. Sasaran antara tersebut selanjutnya dioperasionalkan melalui immediate outcome yang mencakup peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, peningkatan pemasaran pariwisata, serta peningkatan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, yang menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing destinasi dan minat kunjungan wisatawan.

Pencapaian kinerja Urusan Pariwisata diwujudkan melalui pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, penetapan tanda daftar usaha pariwisata, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelaku ekonomi kreatif. Seluruh proses tersebut disusun secara terukur dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penetapan indikator kinerja, serta evaluasi kinerja Urusan Pariwisata secara konsisten dan akuntabel.

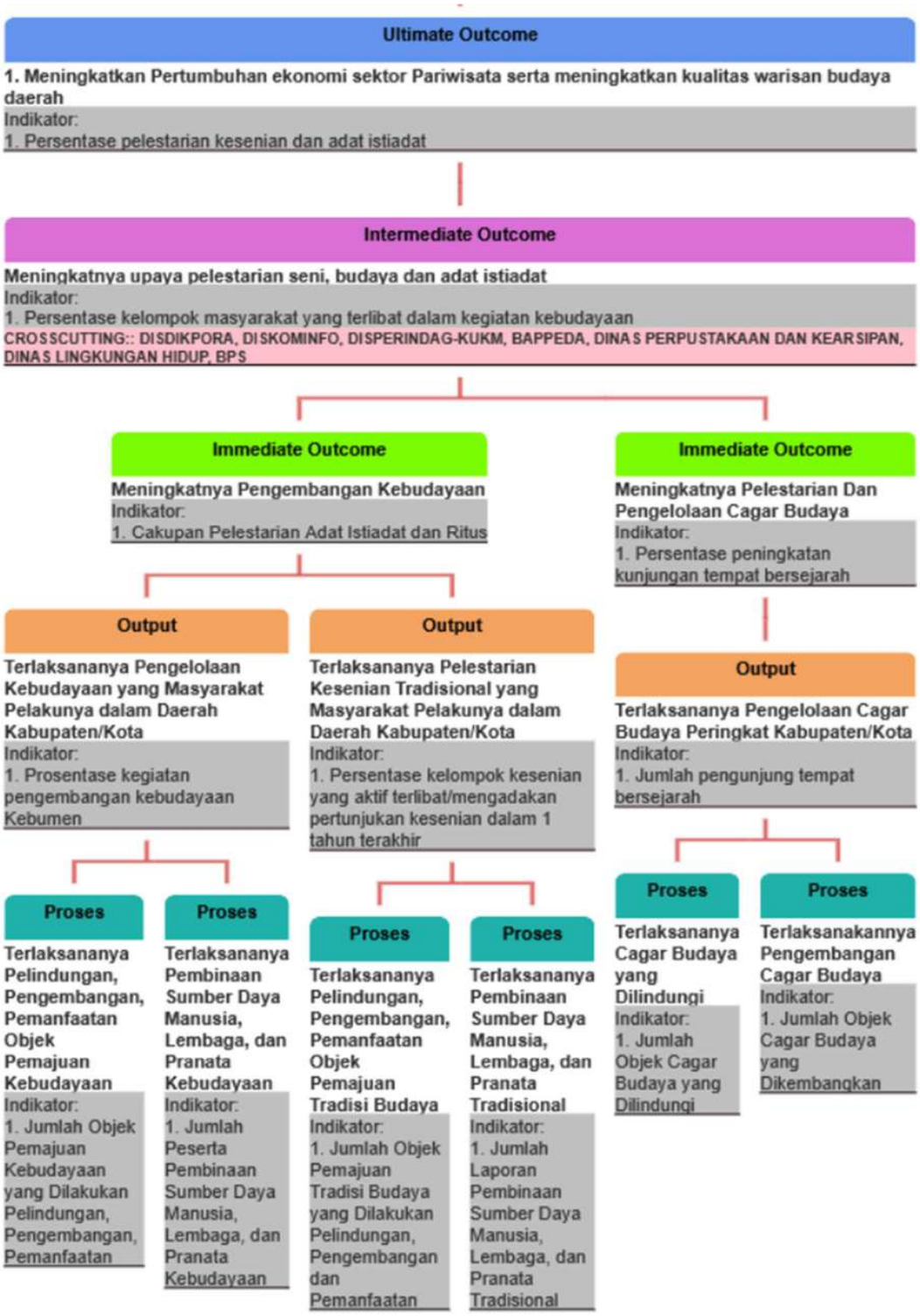
Ultimate Outcome
1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah
Indikator:
1. Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat
Intermediate Outcome
Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat
Indikator:
1. Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan
CROSSCUTTING:: DISDIKPORA, DISKOMINFO, DISPERINDAG-KUKM, BAPPEDA, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BPS
Immediate Outcome
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan
Indikator:
1. Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus
Immediate Outcome
Meningkatnya Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Indikator:
1. Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah
Output
Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen
Output
Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir
Output
Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Jumlah pengunjung tempat bersejarah
Proses
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Indikator:
1. Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Proses
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Indikator:
1. Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Proses
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Indikator:
1. Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Proses
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Indikator:
1. Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Proses
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi
Indikator:
1. Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi
Proses
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya
Indikator:
1. Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan

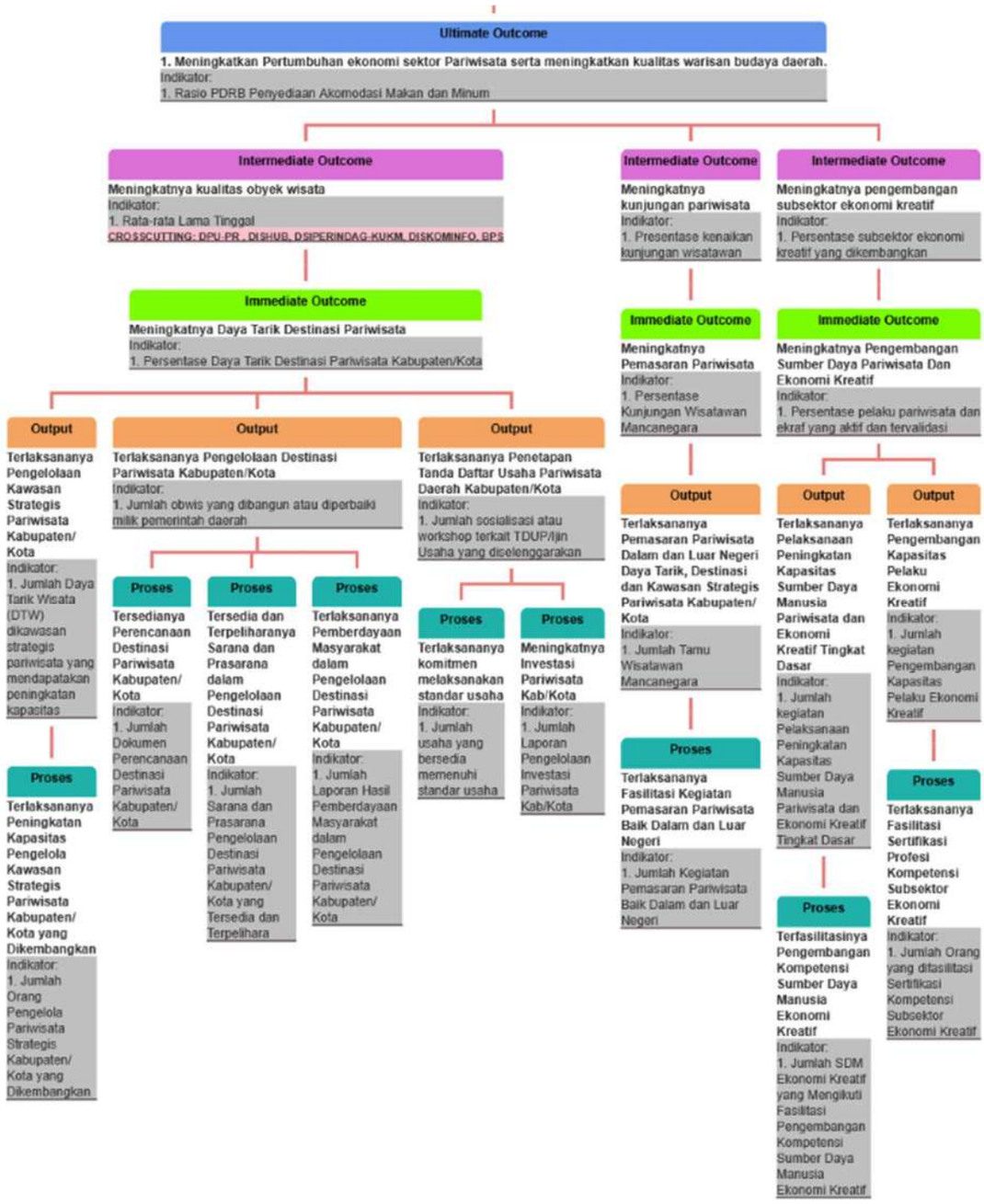
Ultimate Outcome
1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah.
Indikator:
1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas obyek wisata
Indikator:
1. Rata-rata Lama Tinggal
CROSSCUTTING: DPU-PR , DISHUB, DSIPERINDAG-KUKM, DISKOMINFO, BPS
Intermediate Outcome
Meningkatnya kunjungan pariwisata
Indikator:
1. Presentase kenaikan kunjungan wisatawan
Intermediate Outcome
Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif
Indikator:
1. Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan
Immediate Outcome
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Indikator:
1. Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Immediate Outcome
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata
Indikator:
1. Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Immediate Outcome
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Indikator:
1. Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi
Output
Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) dikawasan strategis pariwisata yang mendapatakan peningkatan kapasitas
Output
Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Jumlah obwis yang dibangun atau diperbaiki milik pemerintah daerah
Output
Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Jumlah sosialisasi atau workshop terkait TDUP/Ijin Usaha yang diselenggarakan
Output
Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Output
Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Indikator:
1. Jumlah kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Output
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Indikator:
1. Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Proses
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan
Indikator:
1. Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan
Proses
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Proses
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara
Proses
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Proses
Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha
Indikator:
1. Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha
Proses
Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota
Indikator:
1. Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
Proses
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Indikator:
1. Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Proses
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Indikator:
1. Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Proses
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif
Indikator:
1. Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif

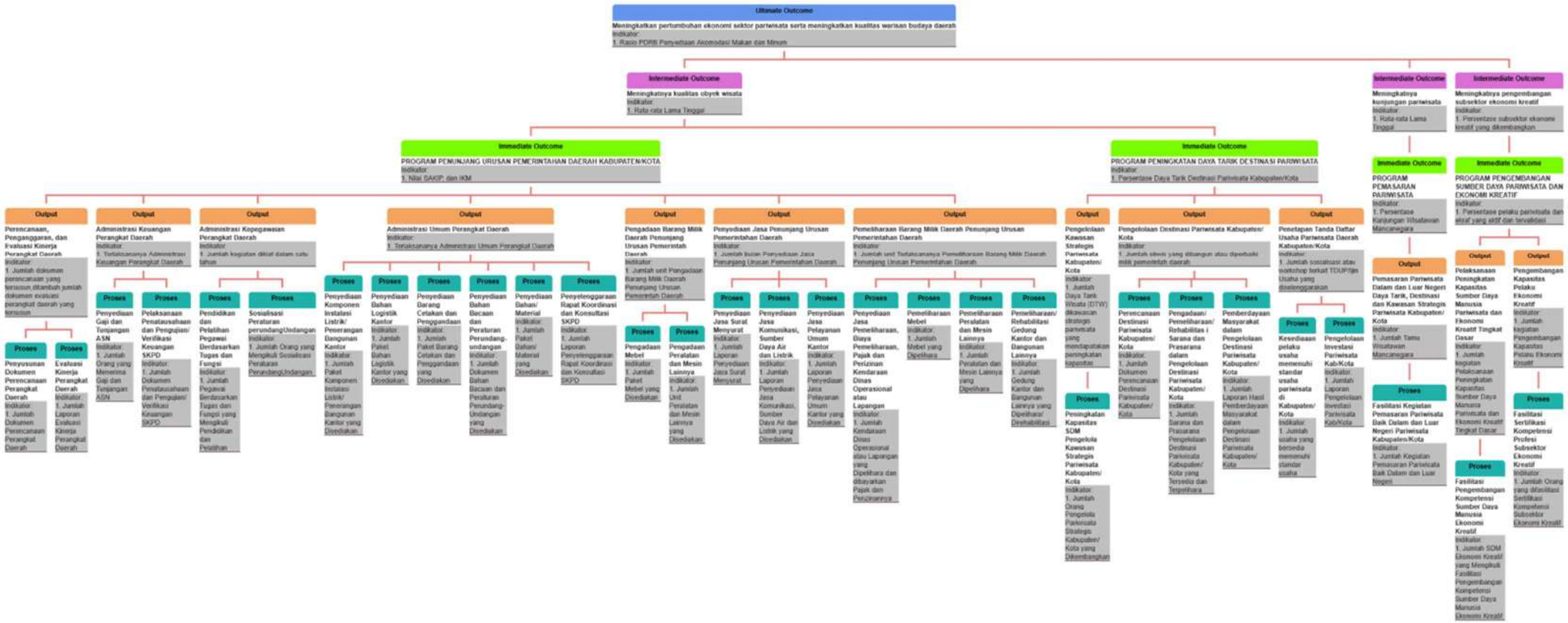
Ultimate Outcome
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah
Indikator:
1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas obyek wisata
Indikator:
1. Rata-rata Lama Tinggal
Immediate Outcome
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator:
1. Nilai SAKIP dan IKM
Output
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
1. Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun ditambah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun
Proses
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Proses
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator:
1. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Proses
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator:
1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Proses
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Output
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator:
1. Jumlah kegiatan dikat dalam satu tahun
Proses
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator:
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Proses
Sosialisasi Peraturan perundang/Undangan
Indikator:
1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang/Undangan
Output
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator:
1. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Proses
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Indikator:
1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Proses
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator:
1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Proses
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator:
1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Proses
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
Proses
Penyediaan Bahan/ Material
Indikator:
1. Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan
Proses
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Output
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator:
1. Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Proses
Pengadaan Mebel
Indikator:
1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Proses
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator:
1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Output
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator:
1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Proses
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Proses
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Proses
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Output
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator:
1. Jumlah unit Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Proses
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator:
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Proses
Pemeliharaan Mebel
Indikator:
1. Jumlah Mebel yang Dipelihara
Proses
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator:
1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Proses
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator:
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
Output
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) dikawasan strategis pariwisata yang mendapatkan peningkatan kapasitas
Proses
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan
Output
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah sitwis yang dibangun atau diperbaiki milik pemerintah daerah
Proses
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Proses
Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara
Proses
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Output
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Jumlah sosialisasi atau workshop terkait TDUP/tpn Usaha yang diselenggarakan
Proses
Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha
Proses
Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
Indikator:
1. Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
Intermediate Outcome
Meningkatnya kunjungan pariwisata
Indikator:
1. Rata-rata Lama Tinggal
Immediate Outcome
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Indikator:
1. Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Output
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Proses
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Intermediate Outcome
Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif
Indikator:
1. Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan
Immediate Outcome
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Indikator:
1. Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi
Output
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dasar
Indikator:
1. Jumlah kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Proses
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Indikator:
1. Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Output
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Indikator:
1. Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Proses
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
Indikator:
1. Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif

b. Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Pada urusan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kabupaten Kebumen memiliki kekayaan destinasi wisata alam, budaya, dan geologi yang besar. Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah belum optimal, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan hasil pembangunan. Permasalahan ini berkaitan dengan isu KLHS mengenai kualitas daya dukung lingkungan dan pengelolaan destinasi secara berkelanjutan. Pada tingkat global, berkembang tren pariwisata berkelanjutan, sementara pada tingkat nasional terdapat target peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB, dan pada tingkat regional terjadi peningkatan daya saing destinasi se-Jawa Tengah. Kondisi ini menegaskan isu strategis berupa belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, masih terdapat destinasi pariwisata yang sedang berkembang namun menghadapi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung, yang berdampak pada kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan. Permasalahan ini relevan dengan isu KLHS terkait dampak pembangunan terhadap lingkungan dan kenyamanan wisatawan, serta isu global mengenai standar pelayanan dan aksesibilitas internasional, isu nasional tentang percepatan pembangunan destinasi prioritas, dan isu regional berupa konektivitas antar destinasi. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan isu strategis berupa keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata yang berdampak pada kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan.

Selanjutnya, pengembangan potensi wisata alam berbasis masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan aspek keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kondisi ini relevan dengan isu KLHS mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi dan pengurangan dampak lingkungan, serta agenda global SDGs 8 dan SDGs 11, kebijakan nasional tentang desa wisata berkelanjutan, dan kebijakan regional terkait pengembangan desa wisata tingkat provinsi. Dari keterkaitan tersebut, dirumuskan isu strategis berupa belum terintegrasinya pengembangan pariwisata dengan aspek keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Di sisi lain, terdapat potensi digitalisasi dan ekonomi kreatif pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya tingkat digitalisasi promosi dan layanan pariwisata berkaitan dengan isu KLHS mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dan energi melalui teknologi,

serta isu global era industri 4.0 dan pariwisata digital, isu nasional transformasi digital sektor pariwisata, dan isu regional berupa pengembangan platform promosi bersama. Berdasarkan analisis tersebut, isu strategis yang disimpulkan adalah rendahnya tingkat digitalisasi promosi dan layanan pariwisata sehingga daya saing Kabupaten Kebumen masih perlu ditingkatkan pada level regional maupun nasional.

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi pelayanan, analisis capaian kinerja, serta pemetaan permasalahan yang telah dirumuskan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen menetapkan sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus pembangunan pada periode Renstra 2025–2029. Isu strategis ini disusun melalui teknik penarikan isu strategis perangkat daerah (Tabel 2.6) dan mencakup urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata dan Ekraf.

Tabel 2.6
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yg relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yg relevan dengan PD			Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Urusaan Kebudayaan						
Keragaman seni dan tradisi budaya lokal	Kurangnya minat generasi muda terhadap seni tradisional	Pelestarian warisan budaya takbenda	UNESCO heritage & kreativitas budaya	program pemajuan kebudayaan	kompetisi seni antar kabupaten	Kurangnya minat generasi muda terhadap seni tradisional yang berimplikasi pada potensi pergeseran nilai budaya dan stagnasi jumlah grup kesenian di Kabupaten Kebumen
Urusaan Pariwisata dan Ekraf						
Kekayaan destinasi wisata alam, budaya, dan geologi di Kebumen	Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah belum optimal	Kualitas daya dukung lingkungan destinasi wisata; pengelolaan berkelanjutan	tren pariwisata berkelanjutan	target kontribusi pariwisata ke PDB	peningkatan daya saing destinasi se-Jawa Tengah	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah
Destinasi pariwisata yang masih berkembang	Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata	Dampak pembangunan terhadap lingkungan dan kenyamanan wisatawan	standar pelayanan & aksesibilitas internasional	percepatan pembangunan destinasi prioritas	konektivitas antar destinasi	Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata yang berdampak pada kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yg relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yg relevan dengan PD			Isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Potensi wisata alam berbasis masyarakat	Belum terintegrasinya pengembangan pariwisata dengan aspek keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi; pengurangan dampak lingkungan	SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)	konsep desa wisata berkelanjutan	kebijakan desa wisata provinsi	Belum terintegrasinya pengembangan pariwisata dengan aspek keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal
Potensi digitalisasi dan ekonomi kreatif pariwisata	Rendahnya tingkat digitalisasi promosi dan layanan pariwisata	Efisiensi penggunaan sumber daya dan energi pada teknologi pariwisata	era industri 4.0 dan pariwisata digital	transformasi digital sektor pariwisata	platform promosi bersama	Rendahnya tingkat digitalisasi promosi dan layanan pariwisata sehingga daya saing Kabupaten Kebumen masih perlu ditingkatkan pada level regional maupun nasional.

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029

1. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2025-2029 selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2025-2029 harus memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global, nasional, regional, dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Pembangunan Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen 2025 - 2029, bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 adalah :

KEBUMEN BERDAYA

"Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

KEBUMEN

Kebumen menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, Kebumen merupakan suatu daerah otonom (selanjutnya disebut Daerah) yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebumen menunjukkan identitas wilayah dan masyarakat Kebumen yang bangga dengan daerahnya sendiri yang memiliki keragaman potensi geologi, keanekaragaman hayati, dan keberagaman budaya serta ekosistemnya. (RPJPD Kab.Kebumen, 2025-2045)

BERIMAN

Kebumen Beriman sesungguhnya akronim dari Kebumen bersih, indah, manfaat, aman, dan nyaman. Namun slogan sekaligus identitas kebesaran Kebumen ini menghilang seiring perkembangan zaman. Padahal masyarakat kebanyakan sudah merasakan memiliki dengan sebutan Kebumen Beriman. Karenanya pokok Visi Beriman sejatinya ingin mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki masyarakat terhadap Kebumen Beriman. (Kebumen kembali Beriman).

Kebumen kembali Beriman merupakan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen secara menyeluruh yang didasarkan atas nilai-nilai budaya lokal dan nilai religiusitas berbasis pesantren dan pendidikan keagamaan.

MAJU

Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui: penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan Informasi Publik yang aksessibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tecno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunnan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

SEJAHTERA

Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sector pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

BERBUDAYA

Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua tentu banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 5 tahun ke depan, maka kami menawarkan konsep/slogan "KEBUMEN BERDAYA". Konsep/slogan ini merupakan akronim dari visi yang kami tawarkan yaitu: **KEBUMEN BERDAYA** "Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya"

Misi Pembangunan Tahun 2025-2029

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen mendukung misi ke 2 dan ke-5 yaitu:

2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan

Penjelasannya: Misi ini untuk mewujudkan visi Kebumen Sejahtera, maka kerangka kerja yang harus dilakukan adalah: meningkatkan produktifitas sector pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan keberlanjutan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.

5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai kegamaan dan budaya lokal.

Penjelasannya: Misi ini untuk mencapai visi Kebumen Berbudaya. Artinya bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama (religiusitas) dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib, dan aman. Maka agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestaran cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

PROGRAM UNGGULAN BUPATI TERPILIH

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 yang sesuai untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen didukung beberapa program unggulan di antaranya :

Tabel 2.7
Program Unggulan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kebumen

No	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/ Sub Program	Program Prioritas
1.	Plesir Bareng & Bakulan Laris	Program ini diarahkan untuk memperkuat sinergisitas pengembangan sektor pariwisata, UMKM dan pedagang kecil guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat melalui : optimalisasi tatakelola wisata milik daerah, mendorong wisata berbasis masyarakat, bela dan beli produk Kebumen, optimalisasi kerja sama pengembangan wisata kawasan geopark, dan atau kerjasama dengan pihak ketiga lainnya	• Program Pemasaran Pariwisata • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun	Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa,seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.	• Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pengembangan Kebudayaan

2. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekraf, Kementerian Kebudayaan Dan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah

   Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Bersinergi dengan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, Renstra Kementerian pariwisata dan ekraf, Renstra Kementrian Kebudayaan dan Renstra SKPD Propinsi Jawa Tengah (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah). Berikut gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan pusat dan daerah:

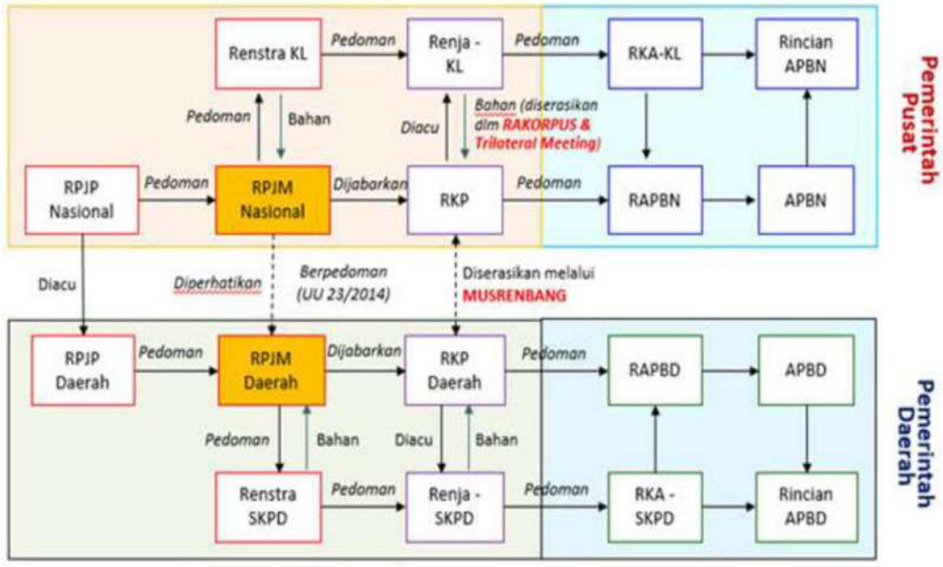

Gambar 2.2
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 2025-2029.

   Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu dilakukan telaahan terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Telaahan ini dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi program Disparbud Kabupaten Kebumen dengan kebijakan pusat.

   Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2025-2029 sejalan dengan RPJMN yang menekankan transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan. Kemenparekraf menetapkan beberapa fokus strategis, antara lain:

   1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan dan Berkelanjutan

      Pemerintah pusat mengarahkan pengembangan destinasi wisata yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat, termasuk pengembangan desa wisata, wisata alam, wisata budaya, serta wisata minat khusus.

   2. Digitalisasi dan Inovasi Layanan Kepariwisataan

      Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran destinasi, penyediaan data wisata yang akurat, sistem reservasi, dan layanan terpadu wisata berbasis digital.

3. Penguatan Produk Ekonomi Kreatif dan Event Berbasis IP Lokal

   Kemenparekraf mendorong penciptaan dan penguatan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi serta penyelenggaraan event dan festival bertaraf nasional/internasional berbasis kekayaan lokal untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata

   Melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal agar memperoleh manfaat langsung dari pengembangan pariwisata.

5. Kepariwisataan Berkelanjutan dan Inklusif

   Mengarusutamakan prinsip keberlanjutan (sustainable tourism) serta inklusivitas dalam seluruh program dan kegiatan, dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, budaya, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Renstra Disparbud Kabupaten Kebumen 2025-2029 akan mengadopsi dan menyesuaikan beberapa strategi utama, yaitu:

- Mengembangkan destinasi wisata unggulan dan desa wisata berbasis potensi lokal, misalnya wisata alam (goa, pantai, waduk) dan wisata budaya yang unik di Kebumen.
- Mengintegrasikan teknologi digital dalam promosi, layanan, dan pengelolaan pariwisata daerah agar lebih mudah diakses wisatawan.
- Mendorong lahirnya event budaya dan ekonomi kreatif yang mengangkat kekayaan tradisi serta melibatkan generasi muda Kebumen.
- Memperkuat kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata daerah melalui pelatihan, sertifikasi, dan kemitraan dengan pusat/provinsi.
- Menjamin keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya dalam setiap program pengembangan destinasi.

Dengan mengacu pada Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diharapkan Renstra Disparbud Kabupaten Kebumen 2025-2029 dapat menjadi dokumen perencanaan yang selaras dengan kebijakan nasional, mampu meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, dan sekaligus melestarikan nilai budaya lokal.

4. Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan terhadap Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 2025–2029

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, penting untuk melakukan telaahan terhadap arah kebijakan dan strategi nasional bidang kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kebudayaan. Telaahan ini bertujuan agar kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab permasalahan aktual bidang kebudayaan di Kabupaten Kebumen.

Renstra Kementerian Kebudayaan periode 2025–2029 mengacu pada RPJMN dan Agenda Pembangunan Nasional di bidang kebudayaan yang berfokus pada penguatan identitas budaya bangsa, pelestarian warisan budaya, serta pengembangan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Fokus strategis tersebut meliputi:

1. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan
   Melalui inventarisasi, pengamanan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan nilai-nilai budaya lokal, termasuk warisan budaya takbenda dan benda, agar tidak punah atau tergeser oleh arus globalisasi.
2. Penguatan Peran Generasi Muda dalam Kebudayaan
   Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional melalui pendidikan budaya, fasilitasi sanggar, beasiswa, serta pemberian ruang ekspresi kreatif yang sesuai dengan selera masa kini.
3. Digitalisasi dan Dokumentasi Kebudayaan
   Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendokumentasian, promosi, dan akses publik terhadap kekayaan budaya daerah serta pengembangan konten kreatif berbasis budaya.
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya
   Mendorong transformasi nilai budaya menjadi produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya.
5. Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Kebudayaan
   Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan sanggar dan kelompok kesenian, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, komunitas budaya, dan sektor swasta.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 2025–2029 perlu menyusun strategi yang mengacu pada beberapa aspek berikut:

- Program pelestarian dan pembinaan kesenian tradisional yang lebih intensif, menarik bagi generasi muda, serta memanfaatkan pendekatan kreatif dan teknologi.
- Fasilitasi ruang ekspresi dan pembinaan sanggar seni di tingkat desa/kelurahan untuk mendukung regenerasi pelaku budaya.
- Pemanfaatan teknologi digital untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan mengajarkan budaya lokal Kebumen kepada masyarakat luas.
- Integrasi ekonomi kreatif berbasis budaya dalam program pariwisata daerah sehingga budaya menjadi daya tarik wisata sekaligus sumber penghidupan pelaku seni.
- Penguatan kemitraan lintas sektor dengan lembaga pendidikan, komunitas, dan pihak swasta untuk memperluas jangkauan dan keberlanjutan program kebudayaan.

Dengan mengacu pada Renstra Kementerian Kebudayaan, Renstra Disparbud Kabupaten Kebumen 2025–2029 diharapkan mampu memperkuat identitas budaya lokal, meningkatkan keterlibatan generasi muda, serta memanfaatkan budaya sebagai modal pembangunan daerah yang berkelanjutan.

5. Telaahan Renstra Disporapar Provinsi Jawa Tengah terhadap Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 2025-2029

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen untuk periode 2025-2029, perlu diadakan telaahan terhadap arah kebijakan, strategi, dan isu strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Disporapar Jateng). Telaahan ini penting agar kebijakan Disparbud Kebumen tidak hanya relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga sinergis dengan kebijakan provinsi, sehingga memaksimalkan alokasi sumber daya dan dukungan dari tingkat provinsi.

Berdasarkan dokumen Renstra Disporapar Jateng periode terkini (2024-2026 dan perencanaan menuju 2025-2029), terdapat beberapa poin strategis sebagai berikut:

Fokus Strategis Disporapar Jawa Tengah

1. Sinergi Vertikal dan Horizontal
   - Disporapar Jawa Tengah menekankan agar setiap program dan kebijakan di tingkat kabupaten/kota selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta terjadi koordinasi antar OPD di provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota.
   - Penyusunan Renstra Disporapar Jateng mengacu kebijakan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan lembaga nasional lainnya.
2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan
   - Pengembangan sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif, pelaku budaya dan pemuda menjadi bagian strategi provinsi. Hal ini termasuk pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan.
   - Penguatan kelembagaan, sinkronisasi kebijakan, pengembangan unit pelaksana di tingkat lokal agar pelayanan pariwisata dan budaya di kabupaten/kota lebih responsif.
3. Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
   - Provinsi memfokuskan program pada peningkatan kualitas daya tarik wisata, termasuk event/atraksi yang menarik wisatawan dan menarik kembali potensi wisata lokal yang kurang diberdayakan.
   - Pemasaran pariwisata yang lebih terpadu dan efektif, termasuk promosi digital, penggunaan branding provinsi, dan kolaborasi promosi antar kabupaten/kota.
4. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung
   - Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pariwisata agar bisa mendukung kenyamanan wisatawan serta meningkatkan aksesbilitas ke destinasi.
   - Fasilitas publik terkait (penginapan, jalan akses, sanitasi, informasi wisata) termasuk dalam prioritas provinsi.
5. Budaya dan Pemuda sebagai Komponen Integral Pariwisata
   - Provinsi Jawa Tengah menjadikan budaya dan kesenian lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata. Strategi ini meliputi regenerasi seni tradisional, pelibatan pemuda dalam budaya, serta event budaya yang menjadi magnet wisata.
   - Keterkaitan antara budaya dan pemuda juga diutamakan agar nilai-nilai lokal dan identitas budaya tetap lestari dan relevan dengan zaman.

Renstra Disparbud Kebumen disusun dengan memperhatikan hasil telaahan Renstra Disporapar Provinsi Jawa Tengah yang menekankan sinergi vertikal & horizontal, pengembangan destinasi dan event budaya, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, serta pembangunan infrastruktur pendukung wisata dan budaya. Disparbud Kebumen akan mengintegrasikan strategi pembangunan destinasi wisata unggulan lokal dan budaya, promosi bersama dengan provinsi, pembinaan regenerasi kesenian tradisional, dan penguatan fasilitas publik agar daya tarik wisatawan meningkat, sekaligus menjaga lestarinya nilai budaya dan melibatkan generasi muda sebagai pelaku dan penerus budaya."

6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Sementara telaah tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kebumen, yang meliputi daratan meliputi wilayah Kabupaten yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan dengan "tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten" adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Secara spesifik terkait dengan pariwisata dan kebudayaan, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa dalam pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata, Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Geologi Karangsambung dengan fokus wisata pendidikan dan cagar alam kegeologian. Selain itu tegas disebutkan bahwa kawasan peruntukan permukiman harus melengkapi kawasan-kawasan yang tumbuh menjadi kawasan pusat permukiman baru dengan sarana dan prasarana yang memadai termasuk pengembangan sarana pendidikan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan

perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi kemasyarakatan (ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

SDGs yang di dukung pariwisata di Kabupaten Kebumen yakni untuk target SDGs pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal, dengan indikator:

- Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.
- Jumlah wisatawan mancanegara
- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
- Jumlah devisa sektor pariwisata

SDGs yang di dukung kebudayaan di Kabupaten Kebumen yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, dengan indikator :

- Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP).
- Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata dan Kabudayaan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perumusan, pelaksanakan, pengevaluasian dan pelaporan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan memiliki peran yang strategis untuk mengawal kawasan pusat permukiman baru dilengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Penyusunan master plan Geopark Kebumen untuk meningkatkan sektor pariwisata. Selain itu bidang pariwisata dan kebudayaan juga harus menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungan dan komitmen menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. Muatan pariwisata dan kebudayaan, lingkungan khususnya yang terkait Kawasan Geologi Karangsambung dengan fokus wisata pendidikan dan

cagar alam kegeologian, dan budaya dapat diintegrasikan dalam kurikulum inti, muatan lokal ataupun ekstrakurikuler.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), berkenaan dengan konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Tercantun dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan hidup dapat dihindari.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor, penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen bahwa faktor penghambat dalam pencapaian misi antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan potensi budaya daerah dan sektor pariwisata dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
2. Minimnya inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan industri pariwisata dan destinasi objek wisata;
3. Peningkatan potensi pariwisata dan potensi ekonomi kreatif belum optimal.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian misi antara lain:

1. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai satu kesatuan dalam perwilayahan dengan melakukan pengembangan yang terkoordinasi antar instansi untuk mencapai sinergi yang optimal dalam pengembangan pariwisata;
2. Memberi kesempatan yang luas kepada setiap masyarakat agar kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan dan kawasan pariwisata di wilayah desa-desa;
3. Memberi dukungan sarana dan prasana pendukung pada kawasan pariwisata.

7. Pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044, Wilayah Pengembangan (WP) adalah pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi

pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar kabupaten/kota. Sepuluh WP di Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian wilayah kabupaten/kota sebagai berikut: Kabupaten Kebumen masuk dalam WP Keburejo, meliputi: Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Keburejo berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan yang terkait dengan Kab. Kebumen:

a. Pengembangan Geo-Tourism (Geopark Karangsambung dan Pantai) yang Terintegrasi dengan Borobudur dan Terpadu dengan Pariwisata DIY
   1. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
      - Peningkatan dan standarisasi jalan provinsi pendukung akses dan konektivitas untuk pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang; akses ke Jalan Nasional (JJLS) dan perbatasan dengan Provinsi DIY.
      - Mendorong peningkatan aksesibilitas dan pemenuhan keselamatan jalan wisata Pantai Geopark Karangsambung Karangbolong- KSPN Dieng.

   2. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui
      - Pengembangan daya tarik wisata Geopark Karangsambung dan Pantai.
      - Mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya.
      - Pengembangan desa wisata Geopark Kebumen.
      - Pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang.

8. Pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044, arah pengembangan wilayah yang berkaitan dengan urusan pariwisata dan kebudayaan difokuskan pada penguatan struktur ruang dan pola ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian nilai budaya, serta pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan.

- RTRW menetapkan Kawasan Pariwisata sebagai salah satu elemen strategis dalam pola ruang kabupaten. Arah pengembangan kawasan tersebut meliputi pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan kualitas pariwisata budaya, pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), penguatan ekonomi kreatif, serta penyediaan sarana–prasarana penunjang untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas destinasi. Kebijakan ini sejalan dengan visi

penataan ruang yang menempatkan pariwisata sebagai salah satu basis pembangunan ekonomi daerah.

- RTRW menetapkan sejumlah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan, antara lain Kawasan Pariwisata Terpadu Pesisir Ayah dan Kawasan Kota Pusaka Gombong. Kedua kawasan tersebut diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan pariwisata alam dan budaya, serta menjadi pengungkit sosial–ekonomi masyarakat melalui pengembangan kegiatan wisata, perdagangan–jasa, dan pelestarian cagar budaya. Penetapan KSK ini memberikan landasan spasial bagi pengembangan program prioritas pada sektor pariwisata dan kebudayaan.
- RTRW memberikan arahan pengembangan prasarana wilayah yang secara langsung mendukung pelayanan pariwisata, seperti peningkatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan utilitas kawasan. Pengembangan prasarana ini diperlukan untuk memperbaiki aksesibilitas destinasi, memperkuat konektivitas antar-wilayah wisata, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan kegiatan budaya.
- melalui ketentuan zonasi kawasan, RTRW mengatur pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata di kawasan lindung, kawasan waduk, kawasan pesisir, dan kawasan karst dengan prinsip kehati-hatian dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketentuan ini memastikan bahwa pengembangan pariwisata tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, kelestarian bentang alam karst, serta keberlanjutan ekosistem yang menjadi daya tarik wisata.

Secara keseluruhan, arah pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Kebumen memberikan kerangka spasial yang komprehensif bagi penguatan pelayanan pariwisata dan kebudayaan. Dokumen ini menjadi dasar alokasi program dan kegiatan Disparbud dalam RENSTRA 2025–2029, terutama dalam pengembangan destinasi prioritas, penataan kawasan pariwisata, pelestarian warisan budaya, peningkatan ekonomi kreatif, serta pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata yang terintegrasi dengan struktur ruang kabupaten.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat arah pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kebumen untuk periode 2025–2029. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dirumuskan merupakan penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD Kabupaten Kebumen, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMN , serta mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan potensi unggulan daerah, permasalahan pelayanan yang dihadapi, isu strategis yang berkembang secara global, nasional, maupun regional, serta aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang lebih profesional, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kabupaten Kebumen.

3.1. Tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai arah pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kebumen agar lebih terencana, terukur, dan berkesinambungan. Tujuan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2025-2029 serta kebijakan pembangunan nasional di bidang pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Secara substansial, tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah:

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah”

Tujuan tersebut mengandung makna bahwa pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kebumen tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan dan aktivitas ekonomi semata, tetapi juga pada penguatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing sektor pariwisata serta pelestarian dan pemajuan warisan budaya daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pariwisata dimaknai sebagai upaya mengoptimalkan potensi destinasi wisata, ekonomi kreatif, dan jasa pendukung pariwisata agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan kualitas warisan budaya daerah dimaknai sebagai komitmen untuk melindungi, mengembangkan, dan

memanfaatkan kekayaan budaya lokal secara berkelanjutan, termasuk seni tradisi, adat istiadat, dan cagar budaya, dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan generasi muda. Upaya ini bertujuan menjaga identitas dan jati diri daerah sekaligus menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai tambah dalam pengembangan pariwisata yang berkarakter dan berdaya saing.

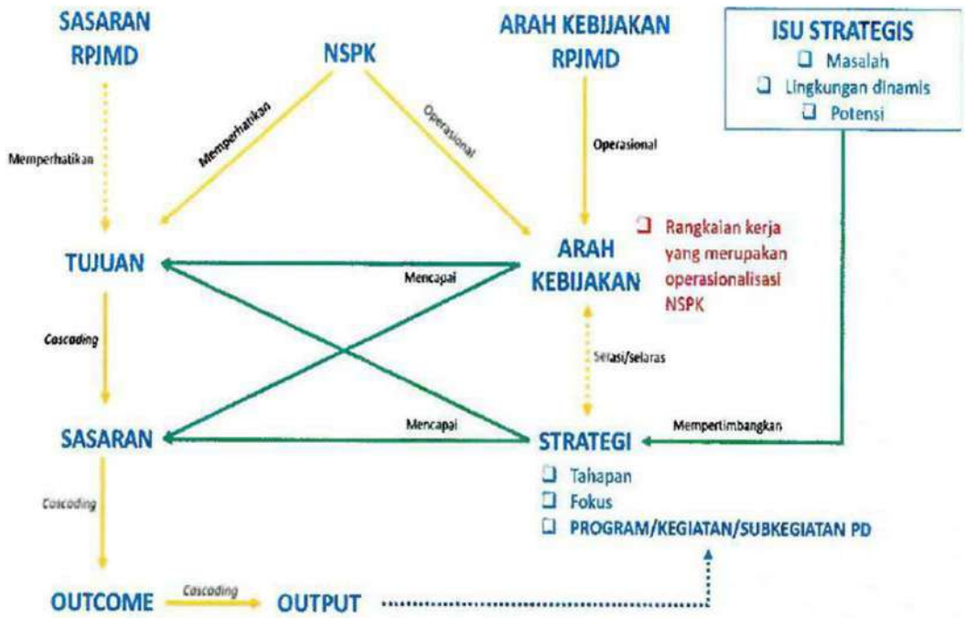

Gambar. 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah

Dengan demikian, tujuan Renstra ini menegaskan keterpaduan antara pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan pelestarian kebudayaan, sehingga pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kebumen dapat berjalan secara seimbang, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah tahun 2025–2029.

Tabel 3.1.

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah		Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat (%)	75,00	79,17	83,33	87,50	91,67	95,83	100	
		Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,85	2,82	3,18	3,36	3,54	3,72	3,90	
		Meningkatnya kualitas obyek wisata	Rata-rata Lama Tinggal (hari)	1,15	1,17	1,20	1,24	1,27	1,30	1.33	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Presentase kenaikan kunjungan wisatawan (%)	38,69	1,75	2,00	2,27	2,50	2,70	3,50	
		Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	11,76	11,76	11,76	17,65	17,65	23,53	29,41	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, 2025

Dengan tujuan yang bersifat menyeluruh tersebut, setiap sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan pada bab-bab berikutnya diarahkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata dan kebudayaan yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Perumusan tersebut menekankan keterpaduan antara pengembangan destinasi, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan ekonomi kreatif, serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Tujuan ini sekaligus menjadi pernyataan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya sektor pariwisata dan kebudayaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat identitas dan karakter budaya lokal, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan strategis yang hendak dicapai selama periode lima tahun. Sasaran ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus pedoman dalam penyusunan indikator kinerja.

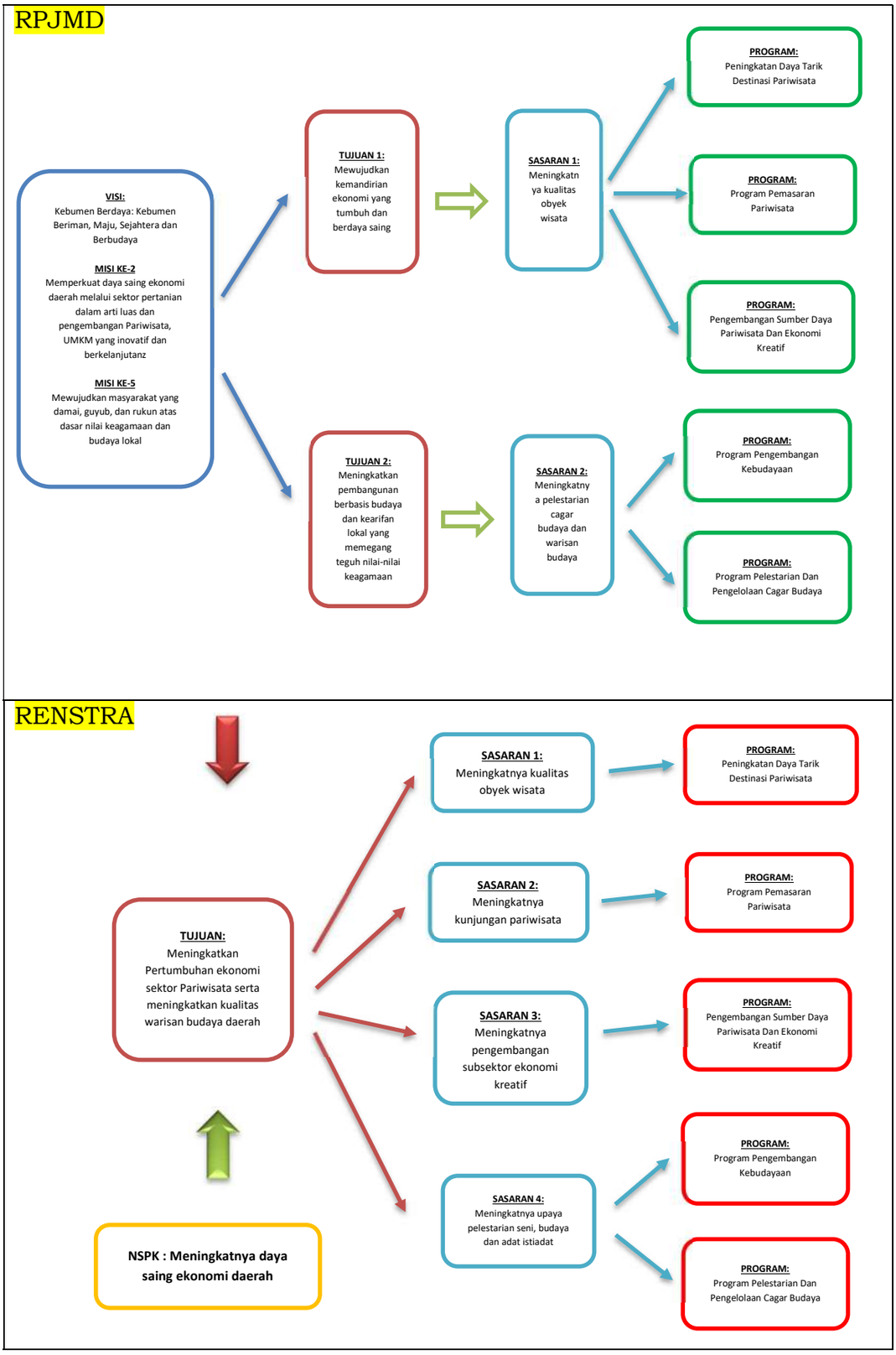

Gambar. 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Secara umum, sasaran pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya Upaya Pelestarian Seni, Budaya Dan Adat Istiadat

  Sasaran ini dimaknai sebagai penguatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan seni, budaya, serta adat istiadat lokal sebagai identitas dan jati diri masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya pelestarian diarahkan tidak hanya pada aspek dokumentasi dan perlindungan, tetapi juga pada regenerasi pelaku seni, peningkatan partisipasi generasi muda, serta pemanfaatan seni dan budaya dalam kegiatan edukasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, seni dan budaya daerah tetap hidup, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai luhur yang dimilikinya.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Objek Wisata

  Sasaran ini menekankan pada peningkatan mutu pengelolaan objek wisata agar memenuhi aspek daya tarik, amenitas, aksesibilitas, dan keamanan. Peningkatan kualitas objek wisata dilakukan melalui penataan destinasi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penguatan standar pelayanan, serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkesan bagi wisatawan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan destinasi wisata di Kabupaten Kebumen.
- Sasaran Meningkatnya Kunjungan Pariwisata

  Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara melalui strategi promosi yang terintegrasi, penguatan branding pariwisata daerah, serta pengembangan event dan atraksi wisata yang berkelanjutan. Peningkatan kunjungan pariwisata tidak hanya diukur dari aspek kuantitas, tetapi juga dari kualitas kunjungan, seperti lama tinggal dan tingkat belanja wisatawan, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah.
- Sasaran Meningkatnya Pengembangan Subsektor Ekonomi Kreatif

  Sasaran ini dimaknai sebagai upaya mendorong pertumbuhan dan penguatan subsektor ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi lokal, seni, budaya, dan pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar. Melalui pengembangan subsektor ekonomi kreatif, diharapkan tercipta nilai tambah ekonomi, peluang usaha dan lapangan

kerja baru, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Tabel 3.2

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
VISI :											
Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya											
MISI 2 :											
Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan Pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan											
	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3	5,40-6,30	5,80-6,30	6,50-7,00	6,90-7,30	7,40-8,00	7,80-8,30
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta rupiah	27,29	27,78	30,99	34,2	37,42	40,63	43,84
		Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	10,35	10,87	11,47	12,07	12,67	13,27	13,87

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
MISI 5 :											
Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal											
	Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan		Indeks Kebudayaan	Indeks	11,5	12,26	14,72	17,18	19,65	22,11	22,48
		Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan	Persen	7,64	12,1	13,38	14,65	15,92	17,83	18,47

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029

Pada tabel 3.2 diatas Pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kebumen pada periode Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi Kabupaten Kebumen, yaitu "Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya." Visi tersebut menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kekuatan nilai budaya, harmoni sosial, serta keberlanjutan pembangunan.
Dalam kerangka tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan strategis terutama dalam mendukung Misi 2 dan Misi 5 RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Dukungan terhadap Misi 2

Misi 2 RPJMD diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas serta pengembangan pariwisata dan UMKM yang inovatif dan berkelanjutan. Sejalan dengan misi tersebut, tujuan pembangunan yang relevan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap tujuan tersebut tercermin melalui sasaran meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata, yang diukur melalui indikator kinerja ekonomi sektor pariwisata, khususnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Peningkatan indikator ini menunjukkan semakin optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Target kinerja yang ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan arah kebijakan yang progresif dan realistis, dengan tetap memperhatikan kapasitas daerah, dukungan infrastruktur, serta peran pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan, nilai tambah ekonomi, dan keberlanjutan usaha pariwisata.

Dukungan terhadap Misi 5

Selain aspek ekonomi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga berperan penting dalam mendukung Misi 5, yaitu mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal. Misi ini menempatkan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan sosial dan karakter masyarakat.
Tujuan yang selaras dengan misi tersebut adalah meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran strategis berupa meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya, baik yang bersifat benda maupun tak benda.
Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator Indeks Kebudayaan serta persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan. Target yang meningkat secara konsisten setiap tahun mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya Kebumen sekaligus menjadikannya sebagai modal sosial dan daya tarik pariwisata budaya.
Melalui pelestarian budaya yang terencana dan partisipatif, diharapkan nilai-nilai kearifan lokal dan keagamaan dapat terus hidup dan

berkembang di tengah masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung citra Kabupaten Kebumen sebagai daerah yang berbudaya dan berkarakter.

Tabel 3.3
Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Bidang
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tujuan				
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota			
Sasaran.1				
Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum			
		Tujuan :		
		Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Pengembangan Pariwisata
		Sasaran :		
		Meningkatnya kualitas obyek wisata	Rata-rata Lama Tinggal (hari)	Pengembangan Pariwisata
		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Presentase kenaikan kunjungan wisatawan (%)	Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Bidang
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tujuan				
Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan	Indeks Kebudayaan			Kebudayaan
Sasaran.2				
Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan			Kebudayaan
		Tujuan :		
		Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah	Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat (%)	Kebudayaan
		Sasaran :		
		Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan (%)	Kebudayaan

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029

Tabel 3.3 menggambarkan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah Tahun 2025–2029.

Dukungan terhadap Tujuan RPJMD Bidang Ekonomi Daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen, salah satu tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing, yang diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota. Tujuan ini menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, RPJMD menetapkan Sasaran 1, yaitu meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata, dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sasaran ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui aktivitas usaha jasa pariwisata.

Menindaklanjuti sasaran RPJMD tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan Tujuan Renstra, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah. Pencapaian tujuan Renstra ini diukur melalui indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%), yang mencerminkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Tujuan ini dilaksanakan dalam Urusan Pengembangan Pariwisata.

Tujuan Renstra tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa sasaran Renstra, yaitu:

- Meningkatnya kualitas obyek wisata, dengan indikator rata-rata lama tinggal wisatawan (hari), yang mencerminkan meningkatnya daya tarik dan kualitas destinasi wisata;
- Meningkatnya kunjungan pariwisata, dengan indikator persentase kenaikan kunjungan wisatawan (%), sebagai hasil dari penguatan promosi dan pemasaran pariwisata;
- Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif, dengan indikator persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%), sebagai bentuk sinergi antara pariwisata dan ekonomi kreatif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pengembangan Pariwisata serta Urusan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga mendukung pencapaian tujuan RPJMD dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Dukungan terhadap Tujuan RPJMD Bidang Kebudayaan. Selain mendukung tujuan pembangunan ekonomi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga berperan dalam pencapaian tujuan RPJMD lainnya, yaitu meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, yang diukur melalui indikator Indeks Kebudayaan. Tujuan ini menegaskan pentingnya kebudayaan sebagai fondasi pembangunan karakter dan jati diri masyarakat Kabupaten Kebumen.

Untuk mencapai tujuan tersebut, RPJMD menetapkan Sasaran 2, yaitu meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya,

dengan indikator persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) yang dilestarikan. Sasaran ini menjadi dasar bagi penguatan peran perangkat daerah dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya daerah.

Sebagai tindak lanjut, Tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diarahkan pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah, khususnya pada aspek kebudayaan, yang diukur melalui indikator persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat (%). Tujuan ini dilaksanakan dalam Urusan Kebudayaan.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Sasaran Renstra, yaitu meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya, dan adat istiadat, dengan indikator persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan (%). Indikator ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pelestarian kebudayaan sebagai upaya menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Tabel 3.4
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
VISI:					
Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya					
MISI 2 :					
Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan Pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan					
	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	
		Meningkatnya kualitas obyek wisata		Rata-rata Lama Tinggal (hari)	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Meningkatnya kunjungan pariwisata		Presentase kenaikan kunjungan wisatawan (%)	
			Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegar (%)	Program Pemasaran Pariwisata

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif		Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	
			Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi (%)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
MISI 5 :					
Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal					
	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah			Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat (%)	
		Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat		Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan (%)	
			Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus (%)	Program Pengembangan Kebudayaan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Meningkatnya Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah (%)	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029

Dapat dilihat pada tabel 3.4 bahwa program prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 pada sektor pariwisata dan kebudayaan disusun untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Kebumen, yaitu "Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya." Pelaksanaan program tersebut diarahkan terutama untuk mendukung Misi 2 dan Misi 5 RPJMD.

Dalam rangka mendukung Misi 2, yaitu memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan pariwisata dan UMKM yang inovatif dan berkelanjutan, ditetapkan tujuan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah. Pencapaian tujuan ini diukur melalui Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang mencerminkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sasaran, antara lain meningkatnya kualitas obyek wisata, meningkatnya kunjungan pariwisata, dan meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan program prioritas berupa Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program-program ini diarahkan untuk meningkatkan daya tarik destinasi, memperluas jangkauan pemasaran, serta memperkuat kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung Misi 5, yaitu mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal, pembangunan difokuskan pada penguatan dan pelestarian kebudayaan daerah. Tujuan pembangunan pada misi ini adalah meningkatkan kualitas warisan budaya daerah, yang diukur melalui persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya, dan adat istiadat, serta meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Untuk mendukung sasaran tersebut, ditetapkan Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yang diarahkan pada peningkatan cakupan pelestarian adat istiadat, ritus budaya, serta peningkatan kunjungan ke kawasan dan situs bersejarah.

Melalui pelaksanaan program-program prioritas tersebut, sektor pariwisata dan kebudayaan diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat jati diri, nilai budaya, dan harmoni sosial masyarakat Kabupaten Kebumen.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan merupakan rumusan dasar atau cara-cara yang perlu ditetapkan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai sebagai landasan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Strategi pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan dirumuskan dengan memperhatikan lingkungan strategis yang berpengaruh seperti kemampuan anggaran, potensi pengembangan destinasi pariwisata dan warisan budaya, sumber daya aparatur, serta dukungan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian dapat diketahui langkah strategis dan kebijakan yang akan diambil untuk pembangunan dan pengembangan urusan pariwisata dan kebudayaan di wilayah Kabupaten Kebumen.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen adalah:

1. Revitalisasi dan peningkatan kualitas destinasi wisata unggulan daerah, termasuk pengembangan sarana prasarana, aksesibilitas, dan standar pelayanan.
2. Peningkatan promosi, pemasaran, dan branding pariwisata serta budaya daerah melalui media digital, kalender event, dan kerja sama dengan pihak swasta.
3. Penguatan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis pariwisata dan budaya melalui pendampingan, pelatihan, fasilitasi pembiayaan, serta pembukaan akses pasar.
4. Pelestarian, pengembangan, dan digitalisasi warisan budaya serta adat istiadat daerah melalui dukungan kegiatan seni budaya, festival, dan penguatan sanggar seni.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola pariwisata dan budaya baik aparatur maupun masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.
6. Pengembangan destinasi wisata baru berbasis alam, budaya, dan desa wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai lokal.

Strategi cara mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan ke dalam program program, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Tabel. 3.5
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
AK 1. Peningkatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	AK 1. Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi pendukung kegiatan kepariwisataan dan perekonomian lokal pada umumnya	AK 1. Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	AK 1. Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	AK 1. Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif
AK 2. Penyediaan dan fasilitasi revitalisasi dan pengembangan pusat-pusat seni, sanggar budaya, dan ruang kreatif berbasis komunitas	AK 2. Penguatan sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	AK 2. Penguatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	AK 2. Pengembangan kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap	AK 2. Optimalisasi kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap
AK 3. Fasilitasi kegiatan pembinaan keagamaan, adat, dan budaya bagi generasi muda di sekolah, pesantren, dan komunitas masyarakat	AK 3. Pembangunan infrastruktur berbasis potensi wilayah, termasuk kawasan wisata desa, agrowisata, dan ekowisata berbasis masyarakat	AK 3. Penguatan aktivitas pusat-pusat seni, sanggar budaya, dan ruang kreatif berbasis komunitas	AK 3. Penguatan peran tokoh agama, adat, dan budaya sebagai mentor atau pembina generasi muda	AK 3. Perwujudan program pembangunan memperhatikan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat setempat
	AK 4. Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	AK 4. Penguatan pemanfaatan media digital dan platform kreatif untuk menyebarluaskan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya daerah	AK 4. Penguatan tradisi gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati sebagai budaya sosial yang memperkuat persatuan	
	AK 5. Pengembangan creative hub dan coworking space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya		AK 5. Peningkatan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai keagamaan dan budaya lokal untuk membentuk generasi pemimpin berintegritas	

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	AK 6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan festival, pameran, dan pertunjukan seni budaya secara rutin sebagai sarana promosi dan pelestarian		AK 6. Penguatan kelembagaan masyarakat adat dan organisasi keagamaan untuk berperan dalam pengawasan serta pengendalian dampak pembangunan	
	AK 7 Mendorong partisipasi generasi muda dalam pelestarian dan inovasi seni budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM dan kepariwisataan			

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah serta disusun secara selaras dengan strategi pembangunan perangkat daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan penguatan sektor pariwisata dan kebudayaan.

Perumusan arah kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, dinamika lingkungan strategis, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Kebumen. Arah kebijakan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, penguatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Fokus utama arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan kebudayaan, pengembangan destinasi dan daya tarik wisata yang berkelanjutan, penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam promosi dan layanan pariwisata. Melalui arah kebijakan tersebut, diharapkan terwujud pembangunan pariwisata dan kebudayaan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Berikut merupakan penjabaran lebih lanjut terkait keselarasan antara strategi utama strategi prioritas, dan arah kebijakan dengan tema pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Kebumen:

TEMA 2026:

Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Adapun dalam tema tahun 2026 tahap I memiliki strategi utama yaitu:

1. Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM, memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Peningkatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital

2. Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal, memiliki strategi prioritas meliputi:
   b. Penguatan landasan pengembangan pusat kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan seni tradisional sebagai ruang pembelajaran, interaksi sosial, dan pelestarian warisan budaya dalam rangka penguatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penyediaan dan fasilitasi revitalisasi dan pengembangan pusatpusat seni, sanggar budaya, dan ruang kreatif berbasis komunitas.
      - Fasilitasi kegiatan pembinaan keagamaan, adat, dan budaya bagi generasi muda di sekolah, pesantren, dan komunitas masyarakat.

TEMA 2027:
Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Adapun dalam tema tahun 2027 tahap II memiliki strategi utama yaitu:

1. Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru, memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Penguatan pembangunan dan pemerataan nfrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi pendukung kegiatan kepariwisataan dan perekonomian lokal pada umumnya.
      - Penguatan sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
      - Pembangunan infrastruktur berbasis potensi wilayah, termasuk kawasan wisata desa, agrowisata, dan ekowisata berbasis masyarakat.
2. Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM, memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan

distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital.
- Pengembangan creative hub dan coworking space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya.

3. Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal, memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Peningkatan kualitas penyelenggaraan festival, pameran, dan pertunjukan seni budaya secara rutin sebagai sarana promosi dan pelestarian.
      - Mendorong partisipasi generasi muda dalam pelestarian dan inovasi seni budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM dan kepariwisataan.

TEMA 2028:
Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa dan Kawasan Perdesaan.

Adapun dalam tema tahun 2028 tahap III memiliki strategi utama yaitu:

1. Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru. memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Akselerasi pengembangan kemandirian perekonomian desa berbasis infrastruktur pembangunan yang merata dan handal berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM, memiliki strategi prioritas meliputi:

a. Peningkatan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, memperkuat daya saing ekonomi lokal, dan mendorong pemerataan kesejahteraan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
   - Penguatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital.

3. Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal, memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Penguatan pusat kegiatan budaya dan keagamaan di desa sebagai ruang pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi untuk pengolahan potensi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penguatan aktivitas pusat-pusat seni, sanggar budaya, dan ruang kreatif berbasis komunitas.
      - Penguatan pemanfaatan media digital dan platform kreatif untuk menyebarluaskan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya daerah.

TEMA 2029:
Penguatan Daya Saing Daerah menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).
Adapun dalam tema tahun 2029 tahap IV memiliki strategi utama yaitu:

1. Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru, memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Pemantapan perekonomian kerakyatan yang mandiri, kuat dan berdaya saing dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya). Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM, memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Perluasan akses pasar UMKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui platform digital, pameran, dan promosi terintegrasi dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya

(Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya). Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Pengembangan kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap.

3. Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal, memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Pemantapan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya). Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penguatan peran tokoh agama, adat, dan budaya sebagai mentor atau pembina generasi muda.
      - Penguatan tradisi gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati sebagai budaya sosial yang memperkuat persatuan.
      - Peningkatan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai keagamaan dan budaya lokal untuk membentuk generasi pemimpin berintegritas.
      - Penguatan kelembagaan masyarakat adat dan organisasi keagamaan untuk berperan dalam pengawasan serta pengendalian dampak pembangunan.

TEMA 2030:

Perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).

Adapun dalam tema tahun 2030 tahap V memiliki strategi utama yaitu:

1. Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru, memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Perwujudan produktivitas daerah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkokoh kemandirian ekonomi daerah dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju,Sejahtera, Berbudaya). Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM, memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru secara berkelanjutan dan inklusif menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya). Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Optimalisasi kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap.
3. Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal, memiliki strategi prioritas meliputi:

a. Perwujudan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya). Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
   - Perwujudan program pembangunan memperhatikan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat setempat.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan merupakan salah satu prioritas nasional yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam kurun waktu 2025–2029, yaitu mengupayakan tersedianya destinasi wisata dan ruang budaya yang berkualitas melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata serta pelestarian warisan budaya yang berkesinambungan. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pemerataan pembangunan pariwisata, melayani kebutuhan masyarakat dan wisatawan dengan akses yang terjangkau, serta membuka potensi dan keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun daerah perbatasan.

Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan layanan pariwisata dan pengelolaan budaya merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa pengembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa mengemban fungsi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat identitas dan persatuan nasional, serta menjadi perekat kesatuan bangsa melalui promosi potensi daerah dan pelestarian nilai-nilai budaya.

Mewujudkan Visi Kabupaten Kebumen yaitu “KEBUMEN BERDAYA (Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)”, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Kebumen menetapkan tujuan yang mendukung terwujudnya Misi Ke- 2 yaitu “Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan”. Tujuan yang mendukung misi tersebut adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing, dengan sasaran yaitu Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata.

Dan Misi Ke- 5 yaitu "Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal". Tujuan yang mendukung misi tersebut adalah Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan,dengan sasaran yaitu Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya.

Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel. 3.6
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan pembangunan dan pemerataan nfrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi pendukung kegiatan kepariwisataan dan perekonomian lokal pada umumnya	2027
			Penguatan sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	2027
			Pembangunan infrastruktur berbasis potensi wilayah, termasuk kawasan wisata desa, agrowisata, dan ekowisata berbasis masyarakat	2027
		Akselerasi pengembangan kemandirian perekonomian desa berbasis infrastruktur pembangunan yang merata dan handal berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	2028
		Pemantapan perekonomian kerakyatan yang mandiri, kuat dan berdaya saing dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	2029
		Perwujudan produktivitas daerah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkokoh kemandirian ekonomi daerah dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju,Sejahtera, Berbudaya)	Penguatan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	2030
2	Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM	Penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	2026
		Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	2027

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			Pengembangan creative hub dan coworking space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya	2027
		Peningkatan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, memperkuat daya saing ekonomi lokal, dan mendorong pemerataan kesejahteraan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Penguatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	2028
		Perluasan akses pasar UMKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui platform digital, pameran, dan promosi terintegrasi dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Pengembangan kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap	2029
		Mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru secara berkelanjutan dan inklusif menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Optimalisasi kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap	2030
3	Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal	Penguatan landasan pengembangan pusat kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan seni tradisional sebagai ruang pembelajaran, interaksi sosial, dan pelestarian warisan budaya dalam rangka penguatan pelayanan kepada masyarakat	Penyediaan dan fasilitasi revitalisasi dan pengembangan pusatpusat seni, sanggar budaya, dan ruang kreatif berbasis komunitas	2026
			Fasilitasi kegiatan pembinaan keagamaan, adat, dan budaya bagi generasi muda di sekolah, pesantren, dan komunitas masyarakat	2026
		Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan festival, pameran, dan pertunjukan seni budaya secara rutin sebagai sarana promosi dan pelestarian	2027
			Mendorong partisipasi generasi muda dalam pelestarian dan inovasi seni budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM dan kepariwisataan	2027
		Penguatan pusat kegiatan budaya dan keagamaan di desa sebagai ruang pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi untuk pengolahan potensi desa dan pembangunan kawasan perdesaan	Penguatan aktivitas pusat-pusat seni, sanggar budaya, dan ruang kreatif berbasis komunitas	2028
			Penguatan pemanfaatan media digital dan platform kreatif untuk menyebarluaskan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya daerah	2028

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Pemantapan karakter masyarakat berbasis norma agama danidentitas budaya lokal menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Penguatan peran tokoh agama, adat, dan budaya sebagai mentor atau pembina generasi muda	2029
			Penguatan tradisi gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati sebagai budaya sosial yang memperkuat persatuan	2029
			Peningkatan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai keagamaan dan budaya lokal untuk membentuk generasi pemimpin berintegritas	2029
			Penguatan kelembagaan masyarakat adat dan organisasi keagamaan untuk berperan dalam pengawasan serta pengendalian dampak pembangunan	2029
		Perwujudan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Perwujudan program pembangunan memperhatikan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat setempat	2030

Sumber : *RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029*

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Adapun program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selain itu juga mempertimbangkan beberapa faktor lain diantaranya dalam pencapaian visi misi yang dicanangkan kepala daerah Kabupaten Kebumen. Berikut Gambaran Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

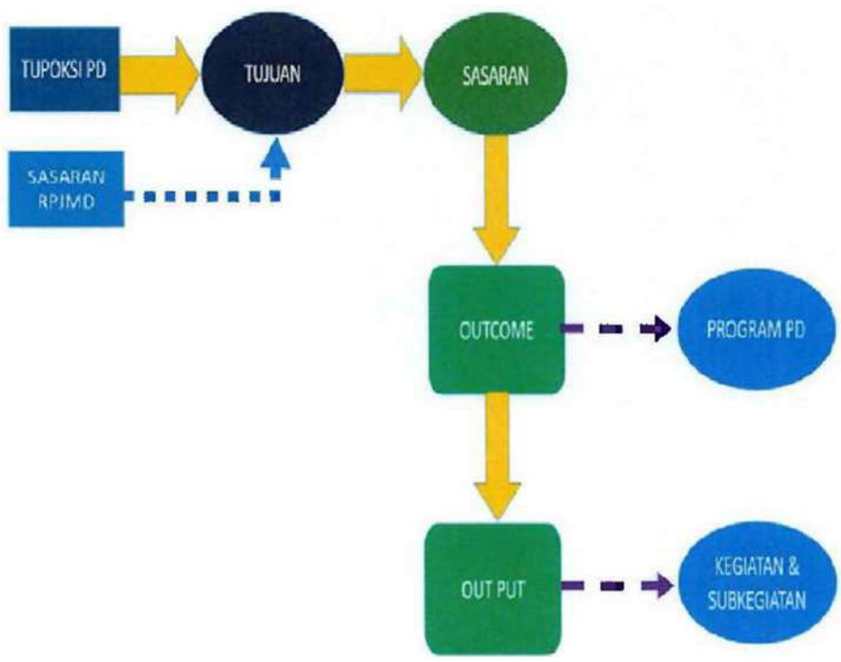

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

1. Uraian Program

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen menetapkan arah program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Setiap program disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta berorientasi pada

pencapaian kinerja pelayanan publik di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan yaitu dari Tahun 2025 - 2029 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

a. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

   Mewujudkan pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan guna menjaga nilai sejarah, identitas budaya, dan kearifan lokal Kabupaten Kebumen, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata berbasis warisan budaya serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian aset budaya daerah

b. Program Pengembangan Kebudayaan.

   Meningkatkan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan seni, budaya, adat istiadat, dan tradisi lokal melalui penguatan peran pelaku budaya dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam rangka memperkokoh jati diri daerah dan mendukung pembangunan sosial budaya yang berkelanjutan.

c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

   Meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan destinasi pariwisata melalui pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan wisatawan, sehingga mampu mendorong peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan

d. Program Pemasaran Pariwisata.

   Meningkatkan efektivitas promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Kebumen melalui strategi pemasaran terpadu, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan jejaring promosi di tingkat regional, nasional, dan internasional guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan citra destinasi pariwisata daerah.

e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

   Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mendorong pengembangan subsektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal melalui inovasi, digitalisasi, dan kemitraan usaha guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan administrasi, dan dukungan manajerial di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen secara efektif, akuntabel, dan profesional guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja perangkat daerah.

2. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra merupakan turunan dari program, yang disusun secara lebih rinci agar implementasi pembangunan dapat terlaksana secara nyata dan terukur. Kegiatan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan spesifik masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat tata kelola penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan. Melalui kegiatan yang tepat sasaran, diharapkan terwujud peningkatan kualitas destinasi wisata, pelestarian seni dan budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Berikut nama kegiatan-kegiatannya :

a. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota.

   Menjamin pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya peringkat kabupaten/kota secara berkelanjutan guna menjaga nilai sejarah dan identitas daerah serta meningkatkan daya tarik wisata budaya.

b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota.

   Melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional melalui pembinaan pelaku seni, peningkatan frekuensi pementasan, dan regenerasi pelaku budaya agar keberlanjutan kesenian lokal tetap terjaga.

c. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota.

   Meningkatkan pengelolaan kebudayaan berbasis komunitas melalui penguatan peran masyarakat, pelaku budaya, dan kelembagaan adat dalam menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan budaya lokal.

d. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

   Mengoptimalkan pengelolaan kawasan strategis pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kawasan, daya saing destinasi, serta kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.

e. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

   Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata melalui pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang memenuhi standar pelayanan pariwisata serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan.

f. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

   Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata melalui pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang memenuhi standar pelayanan pariwisata serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan.

g. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Meningkatkan visibilitas, citra, dan daya saing pariwisata Kabupaten Kebumen melalui promosi terpadu berbasis digital dan jejaring pemasaran di tingkat regional, nasional, dan internasional.

h. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Meningkatkan kompetensi dasar sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif agar mampu memberikan layanan profesional, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan industri.

i. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Mendorong peningkatan kapasitas, kreativitas, dan inovasi pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan akses pasar guna meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

j. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, terintegrasi, dan akuntabel serta meningkatkan efektivitas evaluasi kinerja perangkat daerah.

k. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Menjamin pengelolaan keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian guna mendukung profesionalisme, kinerja, dan kesejahteraan aparatur.

m. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Mendukung kelancaran operasional perangkat daerah melalui penyelenggaraan administrasi umum yang efektif, efisien, dan tertib.

n. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja secara tepat guna dan sesuai standar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

o. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Menjamin tersedianya layanan penunjang operasional perangkat daerah guna mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan.

p. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Menjaga kondisi dan keberfungsian barang milik daerah agar tetap layak pakai, efisien, dan berkelanjutan dalam menunjang pelayanan publik.

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif

Subkegiatan merupakan unit terkecil dalam perencanaan pembangunan yang menjadi turunan dari kegiatan. Subkegiatan dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan dapat dilaksanakan secara lebih spesifik, terarah, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, setiap subkegiatan dijabarkan secara rinci beserta indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif yang dialokasikan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan subkegiatan dapat diukur keberhasilannya, dievaluasi secara berkala, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Indikator kinerja subkegiatan disusun untuk menggambarkan capaian yang hendak diraih, sedangkan target ditetapkan secara tahunan agar perkembangan pelaksanaan dapat dimonitor dari tahun ke tahun. Pagu indikatif yang dicantumkan berfungsi sebagai gambaran kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan subkegiatan tersebut.

Dengan adanya perumusan subkegiatan yang jelas, terukur, dan realistis, diharapkan implementasi program dan kegiatan pada bidang pariwisata dan kebudayaan dapat berjalan efektif serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Secara ringkas, dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	URUSAN KEBUDAYAAN						
	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah				Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat		
		Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat			Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan		
			Meningkatnya Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	
					Jumlah Obyek Cagar Budaya yang dilindungi	Subkegiatan Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek cagar budaya yang di kembangkan	Subkegiatan Pengembangan Cagar Budaya	
			Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan		Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	
				Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Perlindungan dan Pemanfaatan	Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
	URUSAN PARIWISATA						
	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		
		Meningkatnya kualitas obyek wisata			Rata-rata Lama Tinggal		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) dikawasan strategis parwiisata yang mendapatakan peningkatan kapasitas	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten / Kota yang dikembangkan	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obwis yang dibangun atau diperbaiki milik pemerintah daerah	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Subkegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi atau workshop terkait TDUP/Ijin Usaha yang diselenggarakan	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Subkegiatan Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Subkegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
		Meningkatnya kunjungan pariwisata			Persentase kenaikan kunjungan wisatawan		
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata		Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif			Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan		
			Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP dan IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DBHCHT)	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Kebumen, 2025

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN KEBUDAYAAN													
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah	1.34	1.6	180.000.000	1.7	164,000,000	1.81	164,000,000	2.14	176,000,000	2.16	2,700,000,000	
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	53	54.654	180.000.000	55.583	164,000,000	56.589	164,000,000	57.800	176,000,000	59.050	2,700,000,000	
Subkegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang dilindungi	133	133	100.000.000	133	82,000,000	133	82,000,000	133	86,000,000	133	100,000,000	
Subkegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek cagar budaya yang di kembangkan	10	17	80.000.000	18	82,000,000	19	82,000,000	20	90,000,000	21	2,600,000,000	
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	84.78	86.09	1.607.510.000	86.74	674,000,000	87.39	674,500,000	88.04	702,000,000	89.13	800,000,000	
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan	17.32	23,04	1.447.510.000	23.46	510,000,000	23.88	510,500,000	24.30	530,000,000	24.72	600,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	kesenian dalam 1 tahun terakhir												
Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4	4	1.317.510.000	4	375,000,000	4	375,500,000	4	385,000,000	5	450,000,000	
Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2	2.0	130.000.000	2	135,000,000	2	135,000,000	2	145,000,000	2	150,000,000	
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota	Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	18.64	13.97	160.000.000	15.36	164,000,000	15.36	164,000,000	15.36	172,000,000	16.76	200,000,000	
Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Perlindungan dan Pemanfaatan	1	1	80.000.000	1	82,000,000	1	82,000,000	1	86,000,000	1	100,000,000	
Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	115	110	80.000.000	110	82,000,000	110	82,000,000	110	86,000,000	120	100,000,000	
URUSAN PARIWISATA													

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	9.38	14.8	2.868.528.926	17.19	3,615,433,650	19.53	3,618,953,047	21.09	3,680,765,146	27.34	7,528,921,339	
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) dikawasan strategis parwiisata yang mendapatakan peningkatan kapasitas	12	19	300.000.000	22	110,000,000	25	110,000,000	27	120,000,000	35	130,000,000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten / Kota yang dikembangkan	84	133	300.000.000	154	110,000,000	175	110,000,000	189	120,000,000	245	130,000,000	
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obwis yang dibangun atau diperbaiki milik pemerintah daerah	5	6	2.522.528.926	6	3,458,433,650	6	3,460,953,047	6	3,511,765,146	6	7,343,921,339	
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	2	80.000.000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	90,000,000	2	100,000,000	
Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	50	53	551.006.926	54	488,619,650	55	491,139,047	56	531,951,146	58	4,304,107,339	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	3	1.891.522.000	3	2,889,814,000	3	2,889,814,000	3	2,889,814,000	3	2,939,814,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi atau workshop terkait TDUP/Ijin Usaha yang diselenggarakan	1	1	46.000.000	1	47,000,000	1	48,000,000	1	49,000,000	1	55,000,000	
Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1	1	15.000.000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	
Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	1	1	31.000.000	1	32,000,000	1	33,000,000	1	34,000,000	1	35,000,000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara		100	2.200.000.000	100	2,205,000,000	100	2,210,000,000	100	2,225,000,000	100	2,250,000,000	
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	23	28	2.200.000.000	29	2,205,000,000	30	2,210,000,000	30	2,225,000,000	42	2,250,000,000	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7	8	2.200.000.000	8	2,205,000,000	9	2,210,000,000	9	2,225,000,000	10	2,250,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi	11.17	12.9	250.000.000	13.97	260,000,000	15.64	265,000,000	16.76	280,000,000	17.6	325,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1	1	100.000.000	1	105,000,000	1	110,000,000	1	115,000,000	1	125,000,000	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50	80	100.000.000	90	105,000,000	100	110,000,000	110	115,000,000	120	125,000,000	
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	0	1	150.000.000	1	155,000,000	1	155,000,000	1	165,000,000	1	200,000,000	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	0	15	150.000.000	15	155,000,000	15	155,000,000	15	165,000,000	18	200,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP dan IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	75,65; 91,34	74,25; 90,40	8.728.205.559	74,30; 90,45	9,014,203,639	74,35; 90,50	9,299,632,193	74,40; 90,55	9,672,055,144	74,45; 90,60	9,925,934,336	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	6	6	42.905.000	6	45,000,000	6	47,000,000	6	49,000,000	6	51,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	31.600.000	4	33,000,000	4	34,000,000	4	35,000,000	4	36,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	11.305.000	2	12,000,000	2	13,000,000	2	14,000,000	2	15,000,000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	6.037.138.559	12	8,002,117,639	12	8,274,346,193	12	8,614,669,144	12	8,843,348,336	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	50	5.807.138.559	52	7,762,117,639	53	8,034,346,193	54	8,374,669,144	55	8,593,348,336	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	230.000.000	2	240,000,000	2	240,000,000	2	240,000,000	2	250,000,000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DBHCHT)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	140.500.000	12	149,600,000	12	153,700,000	12	162,700,000	12	172,800,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	31.000.000	1	32,000,000	1	33,000,000	1	34,000,000	1	35,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	25.000.000	1	26,000,000	1	27,000,000	1	29,000,000	1	30,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	29.000.000	1	30,000,000	1	31,000,000	1	32,000,000	1	33,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	3.500.000	12	3,600,000	12	3,700,000	12	3,700,000	12	3,800,000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	22.000.000	1	23,000,000	1	24,000,000	1	25,000,000	1	26,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	30.000.000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	39,000,000	12	45,000,000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)	21	26	175.000.000	26	181,000,000	26	182,000,000	26	194,000,000	26	200,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	8	30.000.000	8	31,000,000	8	32,000,000	8	34,000,000	8	35,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	18	145.000.000	18	150,000,000	18	150,000,000	18	160,000,000	18	165,000,000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	2.148.462.000	12	447,186,000	12	448,186,000	12	449,186,000	12	450,186,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000	12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12.0	300.000.000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.846.462.000	12	145,186,000	12	146,186,000	12	147,186,000	12	148,186,000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99	99	184.200.000	99	189,300,000	99	194,400,000	99	202,500,000	99	208,600,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	41	130.000.000	41	132,000,000	41	135,000,000	41	138,000,000	41	140,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	40	4.200.000	40	4,300,000	40	4,400,000	40	4,500,000	40	4,600,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	17	20.000.000	17	21,000,000	17	22,000,000	17	23,000,000	17	24,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	30.000.000	1	32,000,000	1	33,000,000	1	37,000,000	1	40,000,000	
JUMLAH				15.834.244.485		20.932.637.289		16.232.085.240		16.735.820.290		23.529.855.675	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebuman, 2025

4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan merupakan bentuk operasional dari kegiatan yang secara langsung menyentuh aspek teknis pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, subkegiatan disusun untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, keberadaan subkegiatan tidak hanya berfungsi sebagai turunan teknis dari program dan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memastikan ketercapaian program prioritas pembangunan daerah. Dapat dilihat dalam tabel 4.3:

Tabel 4.3

Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembanggunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota : - Subkegiatan Pelindungan Cagar Budaya - Subkegiatan Pengembangan Cagar Budaya	
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota : - Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan - Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota: - Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya - Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	
3	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota: - Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota: - Subkegiatan	
			Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota: - Subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi - Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			- Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota: - Subkegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - Subkegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar: - Subkegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif: - Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen, 2025

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. IKU merupakan tolok ukur strategis yang menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi, tujuan pembangunan daerah, indikator kinerja daerah (IKD), serta sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Dengan demikian, pencapaian IKU perangkat daerah menjadi bagian integral dari keberhasilan pembangunan Kabupaten Kebumen secara menyeluruh.

IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi ukuran yang mencerminkan capaian utama dalam peningkatan kualitas destinasi wisata, jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian seni dan budaya, serta peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Target IKU ditetapkan secara tahunan dalam periode 2025–2029 agar capaian kinerja dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala. dapat dilihat sesuai tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	URUSAN KEBUDAYAAN								
	Indikator Tujuan :								
1	Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat	%	79.17	83.33	87.50	91.67	95.83	100.00	
	Indikator Sasaran :								
1	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100	
	URUSAN PARIWISATA								
	Indikator Tujuan :								
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2.82	3.18%	3.36%	3.54%	3.72%	3.90%	
	Indikator Sasaran :								
2	Rata-rata Lama Tinggal	Hari	1.17	1.2	1.24	1.27	1.3	1.33	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	%	1.75	2.0	2.27	2.5	2.7	3.5	
4	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	11.76	11.8	17.65	17.65	23.53	29.41	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Kebumen, 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	URUSAN KEBUDAYAAN								
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang Dilestarikan	Persen	12,10	13,38	14,65	15,92	17,83	18,47	
2	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	53.800	54.654	55.583	56.589	57.800	59.090	
3	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	Persen	22,63	23,04	23,46	23,88	24,30	24,72	
4	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	Persen	85,43	86,09	86,74	87,39	88,04	89,13	
	URUSAN PARIWISATA								
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,82	3,18	3,36	3,54	3,72	3,90	
6	LPE kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	10,87	11,47	12,07	12,67	13,27	13,87	
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	27	27	28	28	30	40	

Sumber:: RPJMD 2025 -2029 Kabupaten Kebumen

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	URUSAN KEBUDAYAAN								
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	80,13	84,10	88,08	92,05	96,03	100,00	
2	Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan	Persen	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi Dibidang Kebudayaan	Persen	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	
	URUSAN PARIWISATA								
4	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
5	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang Nonbintang)	Persen	70,44	70,44	70,44	70,44	70,44	70,44	
6	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber:: RPJMD 2025 -2029 Kabupaten Kebumen

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor Pariwisata dan Kebudayaan serta menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pariwisata dan Kebudayaan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dokumen Rencana Strategis ini menguraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 2025 - 2029 dengan sebaik-baiknya.
- Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Renja) Tahun 2025 s/d 2029 dan menjadi acuan bagi Unit Kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 s/d 2029.
- Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 s/d 2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 s/d 2029 khususnya sektor Pariwisata dan Kebudayaan.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Kerja unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.
- Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Renja) Tahun 2025 s/d 2029.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan pusat dan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen yang lebih baik.

Kebumen, 19 September 2025

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Drs.FRANS HAIDAR,MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681229 199009 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Dyah Mustika P.S.T, M.Ling	
Krima Karmila, S.Sos., MEng	

LAMPIRAN

Pohon Kinerja

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Ultimate Outcome

Meningkatnya pelestarian budaya
Indikator:
1. Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat

Intermediate Outcome

Meningkatnya eksporesi budaya
Indikator:
1. Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan

Immediate Outcome

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Indikator:
1. Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus

Output

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen

- Proses: **Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan**
  Indikator:
  1. Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
- Proses: **Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan**
  Indikator:
  1. Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Output

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir

- Proses: **Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya**
  Indikator:
  1. Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,Pengembangan dan Pemanfaatan
- Proses: **Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional**
  Indikator:
  1. Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

Immediate Outcome

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Indikator:
1. Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah

Output

Pengelolaan Cagar Budaya Perinokat Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Jumlah pengunjung tempat bersejarah

- Proses: **Pelindungan Cagar Budaya**
  Indikator:
  1. Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi
- Proses: **Pengembangan Cagar Budaya**
  Indikator:
  1. Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan

Ultimate Outcome

Mengembangkan potensi aktivitas perekonomian terkait pariwisata
Indikator:
1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Intermediate Outcome

Meningkatnya lama tinggal wisatawan
Indikator:
1. Rata-rata lama tinggal

Immediate Outcome

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator:
1. Nilai SAKIP dan IKM

Output

Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator:
1. Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun,ditambah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun

- Proses: **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
  Indikator:
  1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Proses: **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  Indikator:
  1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output

Administrasi Keuangan Peranokat Daerah
Indikator:
1. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Proses: **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
  Indikator:
  1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Proses: **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD**
  Indikator:
  1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Output

Administrasi Kepegawaian Peranokat Daerah
Indikator:
1. Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun

- Proses: **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funosi**
  Indikator:
  1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- Proses: **Sosialisasi Peraturan perundangUndanoan**
  Indikator:
  1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Output

Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator:
1. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Proses: **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**
  Indikator:
  1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Proses: **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
  Indikator:
  1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- Proses: **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
  Indikator:
  1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- Proses: **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanaan**
  Indikator:
  1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
- Proses: **Penyediaan Bahan/ Material**
  Indikator:
  1. Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan
- Proses: **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
  Indikator:
  1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator:
1. Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Proses: **Pengadaan Mebel**
  Indikator:
  1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
- Proses: **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
  Indikator:
  1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Output

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator:
1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Proses: **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
  Indikator:
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Proses: **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
  Indikator:
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Proses: **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
  Indikator:
  1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Output

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator:
1. Jumlah unit Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Proses: **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
  Indikator:
  1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- Proses: **Pemeliharaan Mebel**
  Indikator:
  1. Jumlah Mebel yang Dipelihara
- Proses: **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
  Indikator:
  1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
- Proses: **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
  Indikator:
  1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Immediate Outcome

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Indikator:
1. Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Output

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) dikawasan strategis pariwisata yang mendapatakan peningkatan kapasitas

- Proses: **Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**
  Indikator:
  1. Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan

Output

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah obwis yang dibangun atau diperbaiki milik pemerintah daerah

- Proses: **Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**
  Indikator:
  1. Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
- Proses: **Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**
  Indikator:
  1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara
- Proses: **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**
  Indikator:
  1. Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota

Output

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
1. Jumlah sosialisasi atau workshop terkait TDUP/Ijin Usaha yang diselenggarakan

- Proses: **Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/ Kota**
  Indikator:
  1. Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha
- Proses: **Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota**
  Indikator:
  1. Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota

Intermediate Outcome

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
Indikator:
1. Persentase kenaikan kunjungan pariwisata

Immediate Outcome

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Indikator:
1. Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Output

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
Indikator:
1. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

- Proses: **Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota**
  Indikator:
  1. Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

Intermediate Outcome

Meningkatnya sektor ekonomi kreatif
Indikator:
1. Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan

Immediate Outcome

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Indikator:
1. Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi

Output

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Indikator:
1. Jumlah kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Proses: **Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif**
  Indikator:
  1. Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Output

Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Indikator:
1. Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- Proses: **Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif**
  Indikator:
  1. Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif

CASECADING

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Daerah

Sasaran Daerah:
Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata
Indikator:
1. LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Tujuan OPD

Tujuan OPD:
Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah.
Indikator:
1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran OPD

Sasaran OPD:
Meningkatnya kualitas obyek wisata
Indikator:
1. Rata-rata Lama Tinggal
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Program

Sasaran Program:
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Indikator:
Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) dikawasan strategis pariwisata yang mendapatakan peningkatan kapasitas
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
Indikator:
Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah obwis yang dibangun atau diperbaiki milik pemerintah daerah
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah sosialisasi atau workshop terkait TDUP/Ijin Usaha yang diselenggarakan
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha
Indikator:
Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota
Indikator:
Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran OPD

Sasaran OPD:
Meningkatnya kunjungan pariwisata
Indikator:
1. Presentase kenaikan kunjungan wisatawan
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Program

Sasaran Program:
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata
Indikator:
Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Indikator:
Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran OPD

Sasaran OPD:
Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif
Indikator:
1. Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Program

Sasaran Program:
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Indikator:
Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Indikator:
Jumlah kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Indikator:
Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Indikator:
Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif
Indikator:
Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Daerah

Sasaran Daerah:
Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya
Indikator:
1. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan

Tujuan OPD

Tujuan OPD:
Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah
Indikator:
1. Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran OPD

Sasaran OPD:
Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat
Indikator:
1. Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Program

Sasaran Program:
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan
Indikator:
Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Indikator:
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Indikator:
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Indikator:
Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Indikator:
Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Indikator:
Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Program

Sasaran Program:
Meningkatnya Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Indikator:
Persentase peningkatan kunjungan tempat berseiarah
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Indikator:
Jumlah pengunjung tempat berseiarah
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi
Indikator:
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan:
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya
Indikator:
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Soekarno Hatta Nomor 62 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 385662, Faksimile (0287) 385662,
Laman https://disparbud.kebumenkab.go.id,
Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

Kebumen, 17 Maret 2025

Nomor : 900.1.1 / 201 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Undangan

Yth. 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Rabu / 19 Maret 2025

waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai

tempat : Ruang Rapat Sapta Pesona Disparbud

acara : Forum Renstra Tahun 2025- 2029 dan Renja Tahun 2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. kebumen

keterangan : Materi dapat di akses pada https://s.id/ForumRenstra_dan_RenjaPD_Disparbud_Tahun_2025

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Frans Haidar, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812291990091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
8.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
13.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
16.	Camat Alian
17.	Camat Ayah
18.	Camat Buayan
19.	Camat Padureso
20.	Camat Petanahan
21.	Camat Sempor
22.	Ketua DPRD Kebumen Komisi C
23.	Ketua DPRD Kebumen Komisi B
24.	LSM FORMASI Kabupaten kebumen
25.	Ketua PEPADI Kabupaten Kebumen
26.	Ketua Permadani Kabupaten Kebumen
27.	Ketua Pokdarwis Kabupaten Kebumen
28.	Ketua PHRI Kabupaten Kebumen
29.	Ketua ASPERWI Kabupaten Kebumen
30.	Rektor Universitas Putra Bangsa Kebumen
31.	Ketua Komite Ekraf Kabupaten Kebumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

32.	General Manager BP Geopark
33.	Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen
34.	Rektor IAINU Kebumen
35.	Ketua Forum Anak Kebumen
36.	Ketua Youth Forum Geopark
37.	Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Logending
38.	Badan Penyelamat Wisata Tirta Kabupaten Kebumen
39.	Sanggar Kabumian Kebumen
40.	Sekrtaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten kebumen
41.	Kabid Pemasaran dan Ekonomi Kreatif
42.	Kabid Kebudayaan
43.	Kabid pengembangan Destinasi pariwisata
44.	Kasubag Perencanaan dan keuangan
45.	Kasubag Umum dan Kepegawaian
46.	Para Pejabat Fungsional/Subkor
47.	Bendahara Penerimaan
48.	Bendahara Pengeluaran
49.	Analis Perencana dan Pelaporan
50.	Para Admintrasi Keuangan
51.	Pimpinan Pengelola Obyek Wisata Pantai Suwuk
52.	Pimpinan Pengelola Obyek Wisata Waduk Sempor
53.	Pimpinan Pengelola Obyek Wisata Goa Petruk
54.	Pimpinan Pengelola Obyek Wisata Pantai Logending
55.	Pimpinan Pengelola Obyek Wisata Waduk Wadas Lintang
56.	Pengurus Barang
57.	Pengelola Gaji
58.	Arsiparis Trampil
59.	Analis Tata laksana
60.	Pengawas Kepariwisataan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Soekarno Hatta Nomor 62 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 385662, Faksimile (0287) 385662,
Laman https://disparbud.kebumenkab.go.id,
Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

Kebumen, 17 Maret 2025

Nomor	:	900.1.1 / 203 / 2025
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Hal	:	Permohonan Narasumber

Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Terlampir
di
Tempat

Dalam rangka Penyusunan Renstra Tahun 2025- 2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Kebumen, dengan ini mohon berkenan menjadi narsumber pada:

hari/tanggal	:	Rabu/19 Maret 2025
waktu	:	Pukul 09.00 Wib sd Selesai
tempat	:	Ruang Rapat Sapta Pesona Disparbud Kab Kebumen
acara	:	Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
keterangan	:	1.Membawa surat tugas 2.Untuk Narasumber dari Komisi B dan C DPRD Kabupaten Kebumen masing - masing ditambah membawa no rekening tabungan dan no NPWP

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Frans Haidar, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812291990091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.	Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen
5.	Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta No.62 Kota Kebumen Kode Pos : 54311
Telepon (0287) 3856622 Faximilie (0287) 3856622
Laman disparbud.kebumenkab.go.id Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN : KEBUMEN
TANGGAL : 19 MARET 2025
TEMPAT : RUANG RAPAT SAPTA PESONA DISPARBUD KAB. KEBUMEN

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NO. TELEPON	TANDA TANGAN
1	Khusnul Sari M	Geopark Youth	081393832451	
2	KARWIN	POSAL LOGENDING	082110721844	
3	Bambang Supar	DPRD komisi C		
4	Junaidi	Parbud		
5	Khamla N	Disparbud		
6	Agus Kurniawan	Asppenwi	087837810968	
7	Septian Iman T	Disparbud.		
8	Guntoro	Disparbud		
9	Maryanta Putri P.	UPB	082244551029	
10	Istiyati	Disparbud		
11	Sat Siswonirmolo	DKD Kebumen	082135898543	
12	Dr. Yunaningsih	Itda	082242458189	
13	Idris Parmono	Bappeda	081565014921	
14	Ario Setyarini	Disparbud		
15	Kristina Kurnila	Bappeda	081325650514	
16	Puji Bowo.	Dispakinaker	087837695807	
17	Muhamto Utoyo	Disparbud		
18	Jahidin	-"-		
19	Budiyono	Kec. Petanahan		
20	Pancoro SIP.	Kec. Pejurutengah	082359615510	
21	UNGAH	KOMINFO	081227128112	
22	Efi Rochanah	Forman	082138117707	
23	CASLAMAN	BPKSD	085640691129	
24	Kusmanto	Permadani		

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta No.62 Kota Kebumen Kode Pos : 54311
Telepon (0287) 3856622 Faximilie (0287) 3856622
Laman disparbud.kebumenkab.go.id Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NO. TELEPON	TANDA TANGAN
25	Endah wahyu			
26	ki Petruk/M. Bosikun	Sanggar kabumian		
27	T. Sumpeno	kec. sempor		
28	Sulistriyani	Bobusto		
29	Anisatun Nurul	IAINU kebumen		
30	Sanjo	obus ~~Petruk~~ Sunat		
31	Samijan	Obwis petruk		
32	Rizal N.A	Bp Geopark		
33	Muhaji din	kec. Alian		
34	Marlina	Disperpus		
35	Upsya Putri	Forum Anak kebumen		
36	Kironi Giga Pradhita	Forum Anak kebumen		
37	Sarno	kec. Buayan		
38	Dewi K	Desperindag untan		
39	Siti Aisyah	Disperindag untan		
40	[illegible]	Geo Park		
41	Herlina J	Disparbud		
42	Jawahot	Pokdarwis		
43	Sigi L	GeoPark		
44	Vanny. y	Disparbud		
45	Sugito EP	Disparbud		
46	Samudra AL	Disparbud		
47	Frans Haidar	Disparbud		
48	Risky. Prasongko	Dispar bud		
49	Ratna Dwi W	Disparbud		
50	Darno	Disparbud		
51	Heru Brip	Disparbud		
52	Ika	Disparbud		
53	Siti Khosiyah	Disparbud		

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta No.62 Kota Kebumen Kode Pos : 54311
Telepon (0287) 3856622 Faximilie (0287) 3856622
Laman disparbud.kebumenkab.go.id Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NO. TELEPON	TANDA TANGAN
54	Ditha Ayunita R	Obuns Sempor		
55	Tari	Disparbud		
56	Rmte S.P.	Disperbud	08963493471 2	
57	Lisna	Disparbud		
58	Dwy Ratriyana	Disparbud	0896200017 42	
59	Hasan M	Disparbud		
60	Turas.	Disparbud		
61	Bud-Prem	Disparbud		
62	Ibnu Wibowo	Disparbud.		
63	A Darwono.	Disparbud		
64	Hardi M	—	082134809007	
65	Wasimin	— " —		
66	Sahroni	Disparbud	085293743196	
67	Suyono	"		
68	Bram	— " —		
69	Okky	"		
70	Bowo	"		

Kebumen, 19 Maret 2025
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DISPARBUD KEBUMEN

SITI ROSITAH, A.Md
NIP. 196801181991012002

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta No.62 Kota Kebumen Kode Pos : 54311
Telepon (0287) 3856622 Faximilie (0287) 3856622
Laman disparbud.kebumenkab.go.id Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

Form 2

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari/ Tanggal	:	Rabu, 19 Maret 2025
Jam	:	09.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Sapta Pesona Disparbud Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

MENYEPAKATI

KESATU	:	Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.;
KEDUA	:	Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
KETIGA	:	Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini;
KEEMPAT	:	Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini
KELIMA	:	Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 19 Maret 2025
Kepala Perangkat Daerah selaku pimpinan sidang
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

Drs. FRANS HAIDAR MPA
NIP. 196812291990091001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta No.62 Kota Kebumen Kode Pos : 54311
Telepon (0287) 3856622 Faximilie (0287) 3856622
Laman disparbud.kebumenkab.go.id Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

No	Nama	Lembaga/ Institusi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	BAMBANG SUPARDJO	DPRD KOMISI C	DPRD KAB. KEBUMEN	
2.	KRIMA KARMILA S.Sos M.Eng	UNSUR PERANGKAT DAERAH	BAPPEDA KAB. KEBUMEN	
3.	BUDIYONO SPd M. Pd	UNSUR KECAMATAN	KECAMATAN PETANAHAN	
4.	MARYANTA PUTRI . P	UNSUR LEMBAGA	UPB KAB. KEBUMEN	
5.	ETI ROCHANAH	UNSUR MASYARAKAT / LSM	LSM FORMASI	

DELEGASI PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN PADA MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 - 2029

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	M. BASIKUN MUCHLISIN / KI PETRUK	SANGGAR KABUMIAN KAB. KEBUMEN	KEBUMEN	

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta No.62 Kota Kebumen Kode Pos : 54311
Telepon (0287) 3856622 Faximilie (0287) 3856622
Laman disparbud.kebumenkab.go.id Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

DOKUMENTASI
PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH, DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2026, DAN PENYUSUNAN RENSTRA 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta No.62 Kota Kebumen Kode Pos : 54311
Telepon (0287) 3856622 Faximilie (0287) 3856622
Laman disparbud.kebumenkab.go.id Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

DOKUMENTASI
PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH, DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2026, DAN PENYUSUNAN RENSTRA 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta No.62 Kota Kebumen Kode Pos : 54311
Telepon (0287) 3856622 Faximilie (0287) 3856622
Laman disparbud.kebumenkab.go.id Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

NOTULEN

Hari,Tanggal	:	Rabu, 19 Maret 2025
Waktu	:	09.00 WIB s/d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat SAPTA PESONA Disparbud Kab Kebumen
Acara	:	Forum Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Pembahasan/ Hasil Rapat

1. DPRD Kab. Kebumen (Komisi C – Bpk. Bambang Suparjo)
   - DPRD selaku fungsi pengawasan, dan membidangi keuangan dan pendapatan
   - DPRD Suport pada Inpres No. 1 Th. 2025 tentang Efisiensi Anggaran
   - Goal penyusunan Renstra/ Renja adalah bagaimana bisa mencapai target kinerja
   - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten berkontribusi pada pendapatan daerah
   - DPRD sudah membuat inisiatif Perda Digitaliasi Transaksi Derah (Semua pendapatan Derah langsung masuk Rekening Daerah/ RKUD) agar lebih transparan dan akuntable
   - DPRD akan evaluasi tentang aturan aset daerah
   - Investor itu penting, diharapkan ada banyak hotel-hotel berbintang di Kabupaten Kebumen
   - Bagaimana caranya mensinkronkan agenda-agenda perjalanan wisata.
   - Perlunya pembaruan apraisal kerjasama pengelolaan obyek wisata

2. ASPERWI (Bpk Agus Kurniawan)
   - Apa yang telah di paparkan tujuan dari Disparbud harus tercapai
   - Perlunya pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)
   - Membuat kalender event
   - Pariwisata membutuhkan semua UMKM, Biro wisata, dari masyarakt yg mendukung pariwisata. Dan Bagaimana mensinkronkan agenda2 kab.kebumen agar terlaksana dengan baik.

3. Dewan Keseninan Daerah (DKD Kab Kebumen)
   - Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan fasilitas dan ekosistem kebudayaan daerah (Gedung Kesenian, Tempat2 Kesenian) untuk menciptakan budaya daerah yang berkarakter.

4. Pokdarwis Kabupaten Kebumen (Bpk. Taufik Hidayat)
   - Perlunya pengembangan potensi wisata secara maksimal
   - Perlunya di bangun kembali Pusat – pusat Informasi Pariwisata di pintu-pintu masuk Kabupaten Kebumen / Batas kota
   - Desa wisata belum ada alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur wisata.
   - Anggaran perawatan di wisata pemda yg dikelola swasta apakah bisa digeserke bumdes/desa wisata

5. Bappeda Kab Kebumen (Ibu Krima Karmila)
   - Visi Kabupten Kebumen adalah Kebumen Berdaya (Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya
   - Disparbud mengusung misi Bupati yang ke 2 dan ke 5
   - Dalam paparan masih kurang progul " Bakulan Laris"
   - Progul harus tertera di Renstra, dan dukungan program Prioritas

- Pada paparan perlu ditambahkan isu strategis tentang Pengembangan Geopark
- Perlunya pencermatan aktivitas dan perlu masukan dari lembaga/ OPD terkait.

6. BPKPD Kab. Kebumen (Bpk Endra)
   - Tupoksi BPKPD pengelolaan keuangan
   - Perlunya sinkronisasi penganggaran/ keselarasan
   - Pada materi rapat Adanya perbedaan data renja 2026 dengan data renstra 2026 pada subkegiatan (DBHCHT)
   - Penganggaran bergantung juga pada tranfer Pemerintah Pusat
   - Pada materi matrik anggaran disparbud, sudah di tagging jenis anggarannya (DAU)

7. Inpsektorat Kab. Kebumen (Bpk. Dwi Yunaningsih)
   - Pada saatnya akan diadakan review RPJMD oleh inspektorat, kesesuian antara RKPD dan RPJMD perlu di perhatikan
   - Evaluasi kinerja tahun lalu akan di evaluasi melalui E-Sakip
   - Pada bulan april mendatang akan di adakan evaluasi Sakip dan Finalisasi Renstra
   - Layanan keperiwisataan di obyek wisata di tingkatkan, dengan harapan PAD dapat tercapai

8. Dan Lanal Pantai Logending
   - TNI pada tahun 2024 telah meresmikan Kampung Bahari di Desa Argopeni Kec. Ayah.
   - Di dalam Kampung Bahari terdapat 5 cluster (Pendidikan, Pariwisata, Ekonomi, pertahanan,)
   - Harapan dari Danlanal agar supaya Pemda melalui Disparbud Kab Kebumen, untuk berkolaborasi/ Sinkronisasai memasukan programnya kedalam Cluster-cluster yg sdh terbentuk
   - Lanal Pantai Logending setiap tahun melaksakan LDDK, untuk itu kedepan lattihan LDDKnya untuk menunjng progarm Disparbud (outingclas) latihannya di obyek-obyek wisata milik Pemerintah Kab Kebumen

9. Forum Anak Kabupaten Kebumen (Misya Putri Dianda)
   - Pertanyaan : Apakah ada rencana pemerintah daerah untk membangun fasilitas yang ramah anak dan disabilitas, untuk menikmati wisata yang aman dan nyaman
   - Jawab Kadinas : Ada beberapa obyek wisata memang yg kurang ramah anak/ disabilitas, hal ini memang karena kondisi alam

10. Balawista Kab. Kebumen (Bpk Sulistyo)
    - Balawista Kab Kebumen, merupakan salah satunya yang ada di Jawa Tengah
    - Eksitensi Balawista Kab Kebumen , dengan mengikuti lomba Lifeguard
    - Pada tahun 2024 Balawista mengadakan Pelatihan Lifeguard dengan instruktur luar negeri (7 orang) selama 4-5 hari di lokasi obwis Logending dan Jetis
    - Tujuan lembaga balawista ingin menunjukan eksistensi membantu pemritah kab kebumen melalui disparbud. Tenaga tekinis siap mendukung pelatihan life guard
    - Balawista dalam hal ini memakai motto mengutamakan pencegahan

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta No.62 Kota Kebumen Kode Pos : 54311
Telepon (0287) 3856622 Faximilie (0287) 3856622
Laman disparbud.kebumenkab.go.id Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

11. Badan Pengelola GeoPark (BP Geopark)
    - Kabupaten Kebumen masuk dalam Prioritas Nasional Pengembangan Pariwisata
    - Pengumuman Resmi Geopark pada tanggal 17 April 2025 di New York , AS. Ada 15 Geopark yang akan di umumkan di seluruh Dunia
    - Kab Kebumen pada bln Juli akan menjadi Tuan Rumah Festival dan konferensi tingkat Internasional (Simposium, Geotourism Expo, Culture)
    - Dengan adanya Geopark, akan berupaya mengembangkan jejaring dengan swasta
    - Geopark akan ada pertukaran promosi dengan Langkawi Malaysia

Kebumen, 19 Maret 2025
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DISPARBUD

SITI ROSITAH, A.Md
NIP. 196801181991012002

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN